

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio Kelas II
Pontianak**

**JI. A. Yani II KM 13
(0561) 575979
upt_pontianak@postel.go.id
@balmon_pontianak**



SDPPI

DIREKTORAT JENDERAL SISTEM DATA DAN
KOMUNIKASI SOSIAL DAN PUBLIKASI

P O N T I A N A K





LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI
RADIO KELAS II PONTIANAK**



Ringkasan Eksekutif

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Balmon Pontianak memiliki peran strategis dalam menjamin ketertiban, efisiensi, dan kepatuhan terhadap pemanfaatan spektrum frekuensi radio serta penggunaan perangkat telekomunikasi di wilayah Kalimantan Barat. Dalam menjalankan tugasnya, Balmon Pontianak melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio, melakukan monitoring dan identifikasi terhadap gangguan frekuensi, memberikan klarifikasi teknis atas laporan gangguan, serta melakukan penertiban terhadap penggunaan frekuensi atau perangkat yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan. Fungsi tersebut juga mencakup dukungan teknis terhadap penegakan hukum di bidang komunikasi dan informatika.

Seluruh aktivitas tugas dan fungsi tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, khususnya mendukung Prioritas Nasional 6 tentang peningkatan ketahanan ekonomi dan penguatan transformasi digital, serta Prioritas Nasional 7 tentang penguatan stabilitas keamanan dan reformasi birokrasi. Sebagai pengelola salah satu sumber daya alam terbatas yang bernilai strategis, Balmon Pontianak turut berperan penting dalam memastikan ketersediaan dan keteraturan spektrum untuk mendukung layanan publik, penyiaran, pertahanan, serta industri telekomunikasi yang berkelanjutan.

Kinerja Balmon Pontianak juga mencerminkan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian Kominfo dalam Rencana Strategis 2020–2024, terutama pada sasaran tersedianya spektrum frekuensi dan orbit satelit untuk mendukung transformasi digital nasional, meningkatnya kepatuhan penggunaan perangkat telekomunikasi, serta meningkatnya efektivitas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio. Dalam tahun 2024, kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah terlaksana dengan hasil capaian secara umum telah mencapai target, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Kinerja (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%	100%	108.74%
		5. Persentase (%) Terjadinya Operasional	95%	100%	118.81%



	dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT			
	6. Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%	193%	193%
	7. Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%	100%	100%
	8. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%
	9. Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC	100%	120%	120%
	10. Persentase (%) ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN	100%	320%	320%
	11. Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Balmon Pontianak Tahun 2024 2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	94 Target PK Generik Sesuai Arahan Biro Perencanaan menggunakan Capaian tahun sebelumnya (2023) di masing-masing UPT 100% Target PK Generik Sesuai Arahan Biro Perencanaan menggunakan Capaian tahun sebelumnya (2023) di masing-masing UPT	92.19% 95% 98.07% 95%

. Pencapaian pada tahun 2024 merupakan hasil dari komitmen dan profesionalisme seluruh jajaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak dalam menjalankan amanah negara untuk menjaga tertib penggunaan spektrum frekuensi dan perangkat telekomunikasi. Kinerja ini juga menjadi kontribusi langsung dalam mendukung transformasi digital nasional dan mewujudkan ekosistem komunikasi dan informatika yang andal, aman, dan inklusif. Capaian kinerja ini akan dibahas lebih lanjut pada Laporan ini bagian Bab III.



Pada Sasaran Program I “**Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi**” yang terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja.

1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota
Jumlah Kab/Kota di Kalimantan Barat adalah 14 Kab/Kota, disetiap kotanya telah dilakukan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Capaian kegiatan tersebut adalah 100%.
2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio
Target Pemeriksaan Stasiun Radio meliputi sebagai berikut:
 - Target Pemeriksaan Stasiun Radio MW Link secara Open Shelter: 687
 - Target Pemeriksaan Stasiun Radio MW Link secara Remote Site: 3479
 - Target Radio FM: 53
 - Target TV Digital: 11Seluruh target pemeriksaan stasiun radio telah dilakukan seluruhnya, sehingga capaian kegiatan tersebut adalah 100%.
3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio
Terdapat 2 aduan gangguan spektrum frekuensi radio, dan Kantor Balmon Pontianak telah menangani seluruh gangguan tersebut. Capaian kegiatan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio adalah 100%.
4. Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/ Perangkat Telekomunikasi
Jumlah pelanggaran penggunaan Spektrum Frekuensi Radio adalah 76 pelanggaran, dan jumlah pelanggaran penggunaan Alat Perangkat Telekomunikasi adalah 18 pelanggaran. Sehingga total pelanggaran berjumlah 94 pelanggaran. Seluruh jenis pelanggaran tersebut telah ditindak lanjuti dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Target Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi atas hasil temuan ilegal untuk ditindaklanjuti menjadi berizin atau off air adalah 93%. Sehingga nilai presentase capaian target dari 94 pelanggaran yang telah ditindak lanjuti adalah 108.74% dengan capaian kinerja 100%.
5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT
Jumlah perangkat utama siap pakai adalah 20 perangkat, dan jumlah perangkat pendukung siap pakai adalah 178. Terhitung sejak Bulan Januari hingga Desember 2024 perangkat tersebut siap digunakan. Sehingga presentase capaian target adalah 118.81% dengan capaian kinerja 100%.
6. Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT
Pelaksanaan UNAR berbasis CAT pada tahun 2024 dengan jumlah peserta 89. Hal ini melebihi dari target peserta yaitu 46 peserta. Capaian dari kegiatan ini adalah 193%
7. Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL
Indikator Kinerja Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL memiliki target laporan sebanyak 3 kegiatan dalam tahun 2024, dan target ini telah direalisasikan. Sehingga capaian kinerja pada kegiatan ini adalah 100%
8. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat



Sepanjang tahun 2024, Balmon Pontianak telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pelayanan publik dan survei kepuasan Masyarakat di wilayah Kalimantan Barat dengan capaian sebesar 100%

9. Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan Bimtek SRC dengan jumlah peserta 30 orang. Seluruh peserta telah dinilai lulus dan mendapatkan sertifikat. Target pada kegiatan ini adalah 25 sertifikat, sehingga capaian kinerja pada kegiatan ini adalah 120%.

10. Persentase (%) ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN

Pada tahun 2024, Indikator Kinerja Jumlah ISR Maritim memiliki target yang telah ditetapkan sebanyak 35 ISR. Berdasarkan data capaian hingga akhir Desember 2024, jumlah ISR Maritim yang telah diterbitkan mencapai 112 ISR, dengan persentase capaian sebesar 320%.

11. Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)

Target pada kegiatan verifikasi data koordinat site ISR pada tahun 2024 merupakan kelanjutan dari kegiatan pada tahun 2023, dimana dari total 14 Kab/Kota di wilayah Kalimantan Barat telah terlaksana kegiatan verifikasi koordinat pada 6 Kab/Kota di tahun 2023 dengan capaian sebesar 100%, sehingga untuk target di tahun 2024 adalah lanjutan verifikasi koordinat di 8 Kab/Kota dengan target sebanyak 6290 ISR terverifikasi. Sepanjang tahun 2024, Balmon Pontianak telah melaksanakan kegiatan verifikasi data koordinat site ISR dengan capaian sebesar 100%.

Pada Sasaran Program II “**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien**” yang terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja.

1. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2024

Pada tahun 2024, target Perjanjian Kinerja (PK) yang ditargetkan oleh Direktorat Jenderal SDPPI untuk Balmon Pontianak minimal memiliki capaian > 94. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2024 adalah 92,19.

2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di tahun anggaran 2024 menargetkan seluruh Satkernya memiliki capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yaitu 100. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2024 adalah 95.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI
RADIO KELAS II PONTIANAK**



Kata Pengantar



Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Tahun 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi institusi kami kepada publik, khususnya dalam menjalankan mandat sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Sepanjang tahun 2024, seluruh kegiatan yang telah direncanakan dalam Perjanjian Kinerja telah berhasil dilaksanakan dan secara umum telah mencapai target. Capaian ini mencakup pelaksanaan monitoring rutin dan insidental di wilayah Kalimantan Barat, penyelesaian laporan gangguan secara tepat waktu, pelaksanaan penertiban frekuensi bersama instansi terkait, serta sinergi yang erat dengan pemangku kepentingan daerah, aparat penegak hukum, dan pelaku industri komunikasi.

Seluruh kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini telah disusun sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020–2024, khususnya mendukung Prioritas Nasional 6 terkait penguatan infrastruktur digital dan Prioritas



Nasional 7 dalam memperkuat stabilitas keamanan serta reformasi pelayanan publik. Selain itu, capaian kinerja kami juga mendukung secara langsung Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020–2024, khususnya pada sasaran tersedianya spektrum yang optimal, meningkatnya kepatuhan penggunaan perangkat, dan efektifnya sistem pengawasan sumber daya pos dan informatika.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak, baik dari internal Kementerian Kominfo maupun mitra kerja di tingkat daerah. Harapan kami, laporan ini tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban administratif, tetapi juga menjadi cerminan komitmen kami dalam menjaga keandalan ekosistem komunikasi nasional serta mendukung transformasi digital Indonesia.

Pontianak, Juni 2025

Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Pontianak



Indra Sofany



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI
RADIO KELAS II PONTIANAK**



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	3
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	5
BAB II PERJANJIAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	7
B. SASARAN PROGRAM	8
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	12
SASARAN 1 MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI, PENERTIBAN SERTA PELAYANAN PUBLIK SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	
IK-1 PERSENTASE (%) MONITORING PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DI KAB/KOTA	13
IK-2 PERSENTASE (%) PEMERIKSAAN STASIUN RADIO	27
IK-3 PERSENTASE (%) PENANGANAN GANGGUAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO	39
IK-4 PERSENTASE (%) PENERTIBAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	45
IK-5 PERSENTASE (%) TERJAGANYA OPERASIONAL DAN FUNGSI MONITORING DARI STASIUN MONITOR FREKUENSI RADIO DI UPT	52
IK-6 PERSENTASE (%) PESERTA UJIAN NEGARA AMATIR RADIO BERBASIS CAT	55
IK-7 PERSENTASE (%) PENANGANAN PIUTANG DAN KOORDINASI PELIMPAHAN KE KPKNL	62
IK-8 PERSENTASE (%) SOSIALISASI PELAYANAN PUBLIK DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	67
IK-9 PERSENTASE (%) SOSIALISASI/BIMBINGAN TEKNIS SRC/LRC	76
IK-10 PERSENTASE (%) ISR MARITIM NELAYAN PROGRAM MOTS-IKRAN	81
IK-11 PERSENTASE (%) VERIFIKASI DATA KOORDINAT SITE ISR	87
SASARAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	
IK-12 NILAI KINERJA ANGGARAN DITJEN SDPPI TAHUN 2024	95
IK-13 NILAI KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)	95
B. KINERJA LAINNYA	98
BAB IV PENUTUP	105
LAMPIRAN	107



KOMDIGI
DIREKTORAT JENDERAL
INFRASTRUKTUR DIGITAL

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS II PONTIANAK**



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang merupakan bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kementerian Kominfo). UPT ini memiliki peran strategis dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio serta perangkat telekomunikasi, yang merupakan sumber daya terbatas dan bernilai strategis dalam mendukung sistem komunikasi nasional, baik di sektor publik, penyiaran, pertahanan, maupun layanan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Sepanjang tahun 2024, tugas-tugas ini dilaksanakan dalam konteks organisasi yang juga mengalami perubahan penting. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia pada pembentukan Kabinet Indonesia Maju, serta dalam rangka akselerasi transformasi digital nasional, telah ditetapkan perubahan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Perubahan ini mencerminkan pergeseran fokus kelembagaan dari semata-mata pengelolaan informasi dan komunikasi menuju penataan ekosistem digital secara menyeluruh, termasuk keamanan siber, transformasi layanan publik digital, dan tata kelola data nasional. Dalam konteks ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio tetap menjadi unsur teknis penting dalam mendukung infrastruktur digital melalui pengawasan spektrum frekuensi dan perangkat telekomunikasi.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak menyusun laporan atas capaian kinerjanya secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan strategis dan perjanjian kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini bertujuan untuk:

- Memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan tugas, fungsi, dan capaian kinerja Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak sepanjang tahun anggaran 2024;
- Menilai tingkat ketercapaian target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta kontribusi terhadap sasaran strategis Kementerian Kominfo;
- Menjadi instrumen evaluasi dan dasar perbaikan kinerja secara berkelanjutan di masa mendatang;



- Menyediakan informasi akuntabel kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, instansi pusat/daerah, serta auditor internal dan eksternal pemerintah.

Dasar hukum penyusunan laporan ini mengacu pada regulasi terbaru, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan perlunya akuntabilitas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan oleh instansi vertikal di daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 89 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan pembaruan dari PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014. Regulasi ini menegaskan bahwa LAKIN harus disusun berbasis hasil (outcome-based), selaras dengan kerangka logis perencanaan kinerja, dan terintegrasi dengan sistem evaluasi berbasis kinerja.

Laporan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, khususnya agenda prioritas nasional terkait pembangunan infrastruktur digital dan reformasi birokrasi. Selain itu, laporan ini disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020–2024, terutama dalam optimalisasi pengelolaan spektrum frekuensi radio dan peningkatan efektivitas pengawasan terhadap perangkat telekomunikasi.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Balmon Pontianak memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio, serta pengawasan peredaran perangkat telekomunikasi. Fungsi utama meliputi monitoring frekuensi, pengukuran teknis, inspeksi stasiun radio, serta penyuluhan kepada masyarakat. Struktur organisasi terdiri dari:

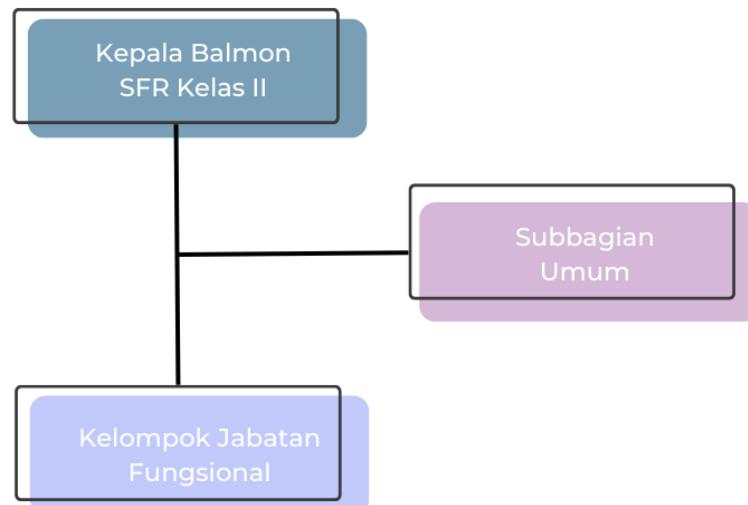
- Kepala Balai
- Subbagian Umum
- Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi
- Tim Kerja Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi
- Tim Kerja Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio dan Konsultasi Publik
- Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio,



Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana dan program;
- pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio;
- pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumah tanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi UPT Balmon Kelas II

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Wilayah Kalimantan Barat sebagai daerah perbatasan memiliki potensi tinggi dalam lalu lintas komunikasi lintas negara. Namun demikian, permasalahan seperti maraknya perangkat ilegal, keterbatasan infrastruktur, serta keterbatasan SDM di daerah terpencil menjadi tantangan utama.

Secara geografis wilayah Kalimantan Barat terletak di bagian barat Pulau Kalimantan atau di antara garis $2^{\circ}08$ LU dan $3^{\circ}05$ LS serta di antara $108^{\circ}0$ BT dan $114^{\circ}10$ BT pada peta bumi, dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di atas Kota Pontianak. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat 146.807



km² (lebih luas dari pada Pulau Jawa : 128.297 km²) terdiri dari 2 kota dan 12 kabupaten, yaitu : Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Melawi, Kabupaten Landak dan Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Sebelah utara Kalimantan Barat terdapat lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia (Serawak, Malaysia Timur) yaitu : Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kab. Bengkayang, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Batas daratan tersebut membujur sepanjang Tanjung Datuk Kab. Sambas hingga Kab. Kapuas Hulu. Kelima kabupaten tersebut membentuk perbatasan darat langsung dengan Serawak Malaysia Timur membentang sepanjang ± 850 km.



Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak (Kalimantan Barat)

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di lapangan dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Regulasi penggunaan spektrum yang belum komprehensif menampung perkembangan teknologi maupun bisnis telekomunikasi di Indonesia;
- Implementasi regulasi spektrum yang belum optimal;



- Permasalahan terkait kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), permasalahan infrastruktur di perbatasan;
- Permasalahan terkait keselamatan maritim dan penerbangan;
- Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perangkat telekomunikasi yang digunakan; dan
- Banyaknya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR).

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan ini disusun mengacu pada Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 dan Pedoman LAKIP, dengan struktur: Ringkasan Eksekutif, Pendahuluan, Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, dan Penutup.



KOMDIGI
DIREKTORAT JENDERAL
INFRASTRUKTUR DIGITAL

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS II PONTIANAK**



BAB II PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yaitu “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menetapkan arah strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kominfo Tahun 2020–2024.

Renstra tersebut menjadi acuan utama bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kominfo, termasuk Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak, dalam menetapkan sasaran kinerja, program, dan kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian target nasional.

Arah Kebijakan dan Tujuan Strategis

Dalam dokumen Renstra, Kementerian Kominfo mengidentifikasi 3 (tiga) tujuan strategis utama yang secara langsung relevan dengan tugas dan fungsi pengelolaan spektrum frekuensi radio, yaitu:

- 1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Informasi serta Infrastruktur TIK Nasional**

Fokus ini berkaitan dengan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur digital secara merata, serta peningkatan kualitas layanan komunikasi, termasuk pengelolaan spektrum frekuensi radio secara efisien dan optimal.

- 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Akuntabel**

Termasuk di dalamnya adalah optimalisasi pengawasan pemanfaatan sumber daya spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi agar sesuai peraturan perundang-undangan.

- 3. Memperkuat Kapasitas dan Reformasi Birokrasi Digital**

Mendukung penggunaan sistem pengawasan digital melalui modernisasi sistem monitoring frekuensi dan peningkatan kompetensi SDM dalam pengawasan perangkat telekomunikasi.

Sasaran Strategis Terkait Balai Monitor

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak memiliki tanggung jawab untuk mendukung sasaran strategis Kementerian, khususnya:

- Optimalisasi pengelolaan spektrum frekuensi radio yang efisien dan bebas gangguan;
- Peningkatan kepatuhan penggunaan perangkat telekomunikasi terhadap regulasi teknis;
- Pemeliharaan dan pengembangan sistem monitoring serta konsultasi publik secara berkelanjutan.



Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Monitor selama Tahun 2024 telah diselaraskan dengan tujuan tersebut, dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dengan pendekatan outcome-based, capaian kinerja instansi diukur berdasarkan kontribusinya terhadap efektivitas pengawasan frekuensi dan perangkat, serta peningkatan layanan publik di bidang komunikasi dan informatika.

Kontribusi terhadap Prioritas Nasional

Melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan spektrum frekuensi radio, penertiban perangkat ilegal, serta pelayanan konsultasi teknis kepada masyarakat dan instansi, Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak mendukung Prioritas Nasional 6 RPJMN, yaitu “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”, serta Prioritas Nasional 7, yaitu “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim”, khususnya dalam konteks pengurangan interferensi yang mengganggu layanan komunikasi penting dan penyelamatan jiwa.

Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian target internal Kementerian Kominfo, tetapi juga terhadap tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

B. SASARAN PROGRAM

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Ditjen SDPPI berperan langsung dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut melalui pelaksanaan tugas pokok. Seluruh program dan kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2024 telah dirancang dan dilaksanakan secara sejalan dengan sasaran strategis tersebut, sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan hasil capaianya disampaikan dalam laporan ini secara transparan dan akuntabel.

Sasaran Kegiatan/Kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi.
2. Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala Balmon dan Atasan Langsung yang memuat 13 indikator kinerja, terdiri dari 11 indikator teknis dan 2 indikator tata kelola. Capaian terhadap indikator ini diukur secara kuantitatif dan dijadikan dasar evaluasi kinerja tahunan. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2024 dapat disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Kinerja (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota 2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio 3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio 4. Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi 5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT 6. Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT 7. Persentase (%) Penanganan Piatang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL 8. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat 9. Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC 10. Persentase (%) ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN 11. Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR	100% 100% 100% 93% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran UPT Balmon Pontianak Tahun 2024 2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	94% 100%

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak pada tahun 2024 adalah sebesar



Rp.11.702.612.000,- dengan komposisi sumber dana RM dan PNBP yang seimbang.



KOMDIGI
DIREKTORAT JENDERAL
INFRASTRUKTUR DIGITAL

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS II PONTIANAK**



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Selama Tahun Anggaran 2024, Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Secara umum, pelaksanaan kinerja berjalan sesuai dengan rencana dan seluruh indikator kinerja utama (IKU) telah mencapai target.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Realisasi kinerja ini menunjukkan bahwa Kantor Balai Monitor Kelas II Pontianak telah bekerja secara efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi, serta memberikan layanan publik yang berkualitas. Indikator kinerja, target, dan capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Kinerja (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%	100%
		2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%
		3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	100%	100%
		4. Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%	100%
		5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	95%	100%
		6. Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%	193%
		7. Persentase (%) Penanganan Piutang	100%	100%



	dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL		
	8. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%
	9. Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC	100%	120%
	10. Persentase (%) ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN	100%	320%
	11. Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Balmon Pontianak Tahun 2024 2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	94 100% 92.19 95%

Pada Sasaran Program I **“Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi”** yang terdapat 11 Indikator Kinerja.

1. IK-1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

a. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang memiliki nilai strategis dalam mendukung penyelenggaraan komunikasi dan informatika, baik untuk kepentingan publik, pertahanan keamanan, pemerintahan, maupun sektor ekonomi. Penggunaan spektrum yang tidak sesuai peruntukannya, tanpa izin, atau menimbulkan gangguan dapat menyebabkan terganggunya layanan komunikasi yang esensial.

Sebagai upaya menjaga keteraturan dan efisiensi pemanfaatan spektrum, diperlukan kegiatan monitoring secara berkala dan sistematis di wilayah kabupaten/kota. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan spektrum di wilayah kerjanya berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, serta mendeteksi sedini mungkin potensi gangguan atau penyalahgunaan frekuensi.

Kegiatan monitoring juga menjadi bagian penting dalam mendukung pengawasan terhadap stasiun radio, perangkat komunikasi, dan layanan



publik lainnya yang menggunakan frekuensi radio, terutama di wilayah perbatasan dan daerah terpencil yang rentan terhadap penggunaan ilegal.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah melakukan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di seluruh Kab/Kota yang ada di Kalimantan Barat, yang bertujuan untuk:

- Tertibnya penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh pemerintah.
- Terdeteksinya secara cepat dan tepat sumber-sumber gangguan frekuensi di wilayah kabupaten/kota.
- Terpetakannya pola penggunaan spektrum secara real-time sebagai dasar pengambilan kebijakan teknis dan regulasi.
- Meningkatnya kesadaran pengguna frekuensi radio terhadap pentingnya kepatuhan terhadap regulasi.
- Terjaganya kualitas layanan komunikasi nirkabel, termasuk layanan siaran, seluler, maritim, dan amatir radio.

c. Capaian Target

Monitoring 15 Pita Frekuensi (70%)

Indikator Kinerja Persentase (%) monitoring penggunaan frekuensi radio di kab/kota memiliki target sebesar 100%. Pada tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak melaksanakan monitoring spektrum frekuensi radio sebanyak 21 kali di 14 wilayah kota/kabupaten Provinsi Kalimantan Barat dengan sasaran kinerja termonitornya penggunaan frekuensi radio di 14 kota/kabupaten 100%, pelaksanaan kegiatan monitoring frekuensi dalam rangka pelacakan penggunaan frekuensi ilegal juga dilaksanakan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pontianak untuk memastikan penggunaan frekuensi radio yang legal dan sesuai ketentuan, serta pelaksanaan kegiatan monitor dan atau pendataan standarisasi perangkat telekomunikasi di 14 kabupaten/kota dari 14 kabupaten/kota yang ada di Prov. Kalimantan Barat untuk memastikan peredaran perangkat telekomunikasi yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian Indikator Kinerja persentase (%) monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kab/kota memenuhi target yaitu sebesar 100% sesuai dengan perjanjian kinerja.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaiannya.

Tabel 4 Capaian monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kab./Kota

No	Kinerja (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%	100	100%



Capaian indikator kinerja berdasarkan dengan RPJMN 2020 – 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-1) 2020-2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Percentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80%	100%	80%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja persentase (%) monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kab/kota Tahun 2024 yang telah dilaksanakan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 6 Jumlah Frekuensi Termonitor per Kabupaten/Kota Termonitor Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Frekuensi Termonitor
Bengkayang	89
Kapuas Hulu	36
Kayong Utara	67
Ketapang	112
Kota Pontianak	413
Kota Singkawang	94
Kubu Raya	2632
Landak	103
Melawi	56
Mempawah	75
Sambas	75
Sanggau	100
Sekadau	60
Sintang	71
Grand Total	3983

Tabel diatas menunjukkan data jumlah frekuensi yang termonitor per Kabupaten / Kota secara rinci, dari 14 daerah Kabupaten/Kota total frekuensi termonitor yaitu sebanyak 3983 frekuensi, dimana Kab. Kubu Raya menjadi daerah yang paling



banyak jumlah frekuensi radio yang termonitor. Monitoring frekuensi radio di Kabupaten / Kota di tahun 2024 menggunakan 2 jenis stasiun monitoring, yaitu stasiun monitoring transportable dan stasiun monitoring bergerak/mobile. banyaknya jumlah frekuensi radio yang termonitor juga dapat dilihat melalui gambar grafik dibawah ini.



Gambar 3 grafik jumlah frekuensi termonitor berdasarkan kota/kabupaten

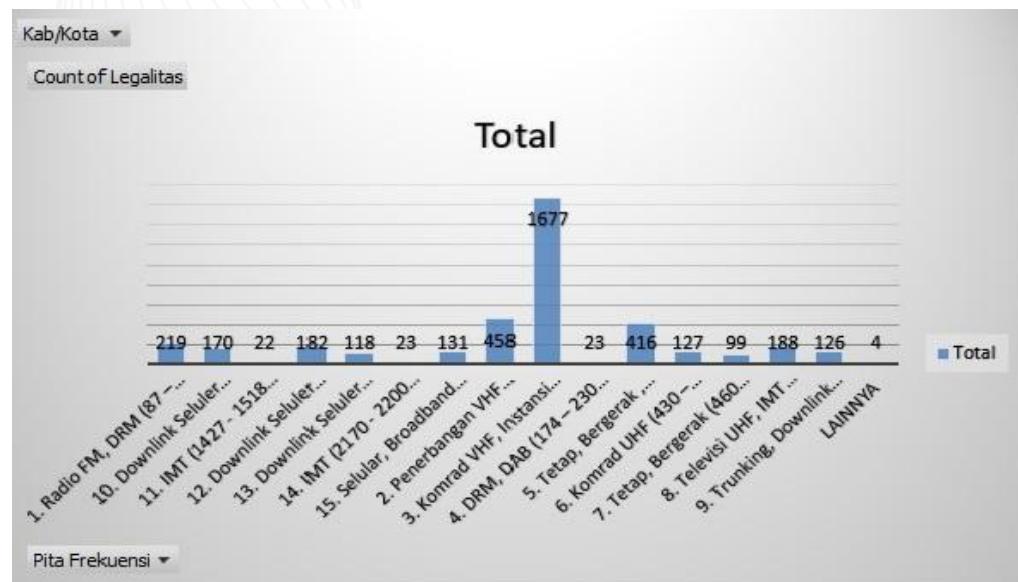
Tabel 7 Total Frekuensi Termonitor per Kabupaten/Kota Termonitor Tahun 2024

PITA FREKUENSI	JUMLAH FREKUENSI TERMONITOR
1. Radio FM, DRM (87 – 108 MHz)	219
2. Penerbangan VHF (108 – 137 MHz)	458
3. Komrad VHF, Instansi Pemerintah atau Badan Usaha, Maritim VHF (137 – 174 MHz)	1677
4. DRM, DAB (174 – 230 MHz)	23
5. Tetap, Bergerak , Marabahaya (300 – 430 MHz)	416
6. Komrad UHF (430 – 460 MHz)	127
7. Tetap, Bergerak (460 – 470 MHz)	99
8. Televisi UHF, IMT (478 – 806 MHz)	188
9. Trunking, Downlink Selular 800 (806 – 880 MHz)	126
10. Downlink Seluler 900 (925 – 960 MHz)	170



PITA FREKUENSI	JUMLAH FREKUENSI TERMONITOR
11. IMT (1427 - 1518 MHz)	22
12. Downlink Seluler 1800 (1805 – 1880 MHz)	182
13. Downlink Seluler 2100 (2110 – 2170 MHz)	118
14. IMT (2170 - 2200 MHz)	23
15. Selular, Broadband 2.3 GHz (2300 – 2400 MHz)	131
Grand Total	3983

Tabel diatas menunjukkan jumlah frekuensi radio termonitor di 14 kabupaten / Kota berdasarkan pita frekuensinya, dari 15 pita frekuensi yang di monitor dapat dilihat bahwa pita frekuensi Komrad VHF, GRN, Maritim VHF pada rentang frekuensi 137 sampai dengan 174 MHz merupakan pita frekuensi dengan jumlah pengguna terbanyak. Penggunaan frekuensi radio berdasarkan Pita Frekuensi lebih jelasnya pada gambar grafik di bawah ini :



Gambar 4 grafik jumlah frekuensi termonitor berdasarkan pita frekuensi

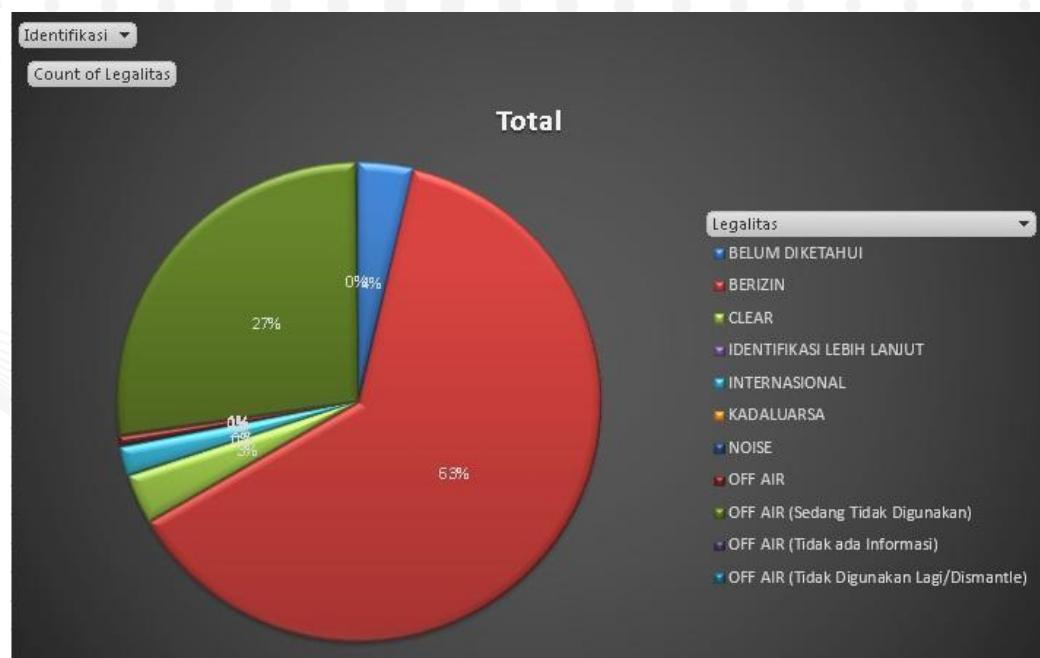
Hasil identifikasi dari kegiatan monitoring 15 pita frekuensi di 14 Kabupaten / Kota dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.



Tabel 8 Jumlah Legalitas Frekuensi Termonitor per Kabupaten/Kota di Tahun 2024

Status Legalitas Frekuensi Termonitor	Jumlah	Persentase
Belum Diketahui	144	3.615%
Berizin	2510	63.017%
Clear	133	3.339%
Identifikasi Lebih Lanjut	3	0.0753%
Internasional	77	1.933%
Kadaluarsa	1	0.025%
Noise	5	0.125%
Off Air	25	0.627%
Off Air (Sedang Tidak Digunakan)	1077	27.039%
Off Air (Tidak Ada Informasi)	5	0.125%
Off Air (Tidak Digunakan Lagi/Dismantle)	3	0.075%
Grand Total	3983	100%

Berdasarkan tabel jumlah legalitas frekuensi termonitor diatas, diketahui bahwasanya dari 3983 frekuensi yang di monitor, terdapat 11 (sebelas) status legalitas yang mana 2510 frekuensi Legal menjadi persentase sebanyak yaitu 63%. Adapun persentase jumlah legalitas frekuensi hasil identifikasi pada kegiatan monitoring 15 pita frekuensi radio di 14 kabupaten / Kota dapat dilihat pula dari gambar grafik persentase dibawah ini.



Gambar 5 grafik persentase legalitas frekuensi termonitor berdasarkan hasil pemantauan SFR 15 Pita di Kab/Kota

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja “Persentase (%) monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota yang ditargetkan mencapai 100% secara akumulasi sampai dengan Desember 2024 telah tercapai 100%.

Monitoring Rutin Harian (30%)

Target pada capaian ini adalah 60% dengan minimal 1 (satu) dari 5 (lima) pita marabahaya yang termonitor menggunakan jenis perangkat berupa *Transportable* pada 14 (empat hari) setiap bulannya. Adapun UPT Pontianak memiliki 6 (enam) titik lokasi stasiun monitoring, diantaranya adalah :

1. Site Kubu Raya (TCI)
2. Site Singkawang (TCI)
3. Site Sambas (TCI)
4. Site Sintang (LSTelecom306)
5. Site Ketapang (LSTelecom306)
6. Site Kapuas Hulu (LSTelecom306)

Tabel 9 Jumlah Pelaksanaan Monitoring Rutin 5 Pita Menggunakan SMFR Transportable Tahun 2024

Bulan	SMFR Transportable					Total
	Kapuas Hulu	Singkawang	Kubu Raya	Sambas	Sintang	
Januari		1	1	1		3



Februari	1	2	1	1	5
Maret	2	2	2	2	8
April	19	18	18	14	69
Mei	17	15	17	22	71
Juni	16	16	16	16	64
Juli	16	17	16	14	63
Agustus	14	14	14	14	70
September	14	14	14	14	70
Oktober	14	14	14	14	70
November	15	14	14	14	73
Desember	14	15	15	14	73
Grand Total	71	143	142	142	141
					639

Tabel diatas menunjukkan pelaksanaan monitoring rutin mengalami peningkatan signifikan mulai bulan April hingga Juli kemudian stabil dari Agustus hingga Desember. Dapat dilihat bahwa dari April sampai dengan Desember dilakukan monitoring secara berkala dalam 14 (empat belas) hari kerja bahkan ada yang ditambah hari nya agar meminimalisir hasil identifikasi yang gagal verifikasi.



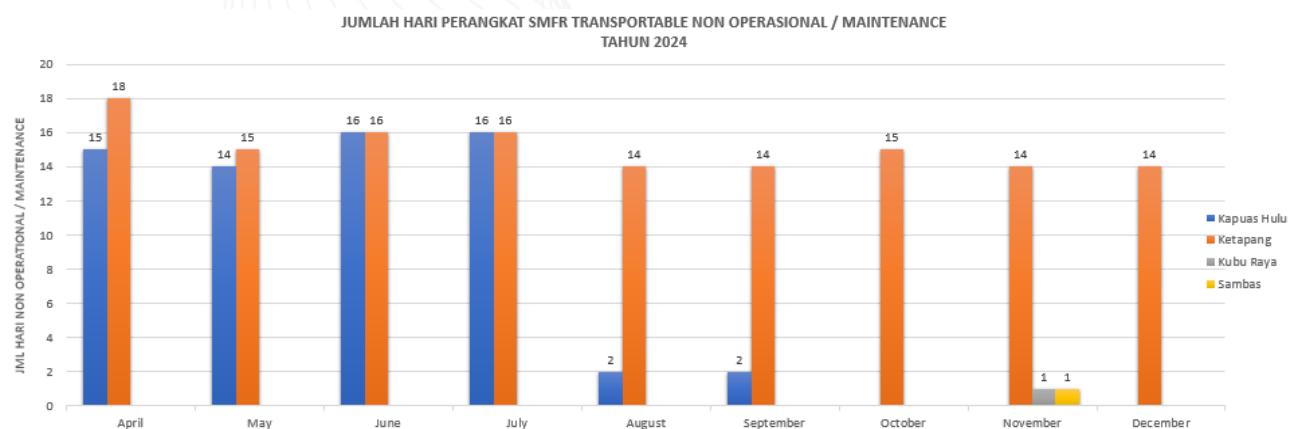
Gambar 6 Grafik Pelaksanaan Monitoring Rutin 5 Pita Menggunakan SMFR Transportable Tahun 2024



Tabel 10 Jumlah Hari Perangkat SMFR Transportable Non Operasional / Maintenance

Bulan	SMFR Transportable				Total
	Kapuas Hulu	Ketapang	Kubu Raya	Sambas	
April	15	18			33
Mei	14	15			29
Juni	16	16			32
Juli	16	16			32
Agustus	2	14			16
September	2	14			16
Oktober		15			15
November		14	1	1	16
Desember		14			14
Grand Total	65	136	1	1	203

Khusus untuk Site Ketapang dilaporakan secara resmi di Bulan April dengan status *Off Air* dikarenakan adanya kerusakan perangkat FMU dan masih berlanjut untuk perbaikkannya. Selebihnya ada beberapa kali *maintenance* di site Kapuas Hulu yang mana ini juga terjadi dari bulan April s/d Juli dengan hari kerja yang lumayan lama, diikuti Kubu Raya dan Sambas yang hanya 1 hari di Bulan November.



Gambar 7 Grafik Jumlah Hari Perangkat SMFR Transportable Non Operasional / Maintenance

Hasil identifikasi dari kegiatan monitoring rutin 15 pada SMFR Transportable dapat dilihat pada tabel dibawah ini

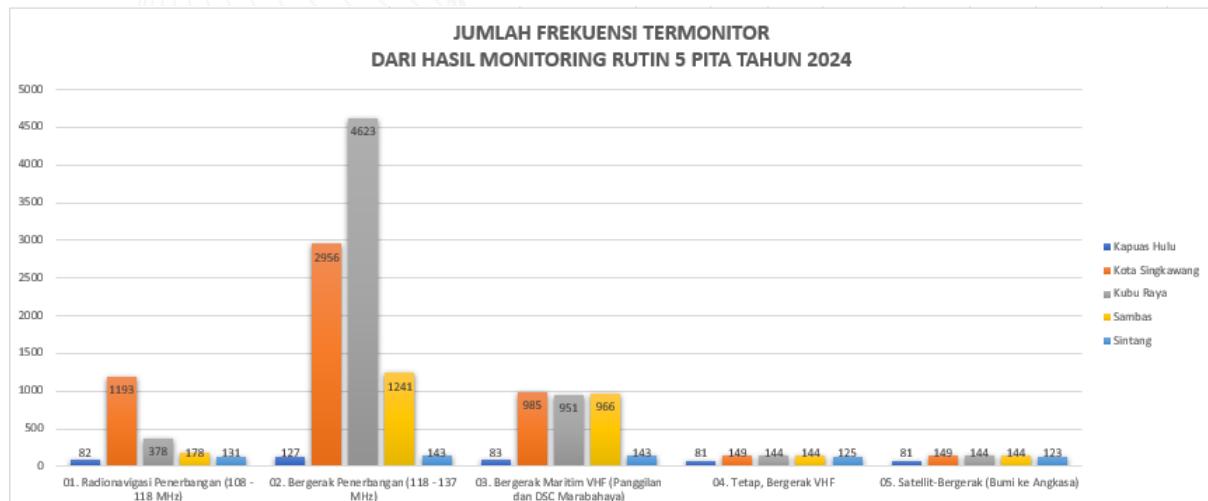
:



Tabel 11 Hasil Frekuensi Termonitor Pada Monitoring Rutin 5 Pita

Pita Frekuensi	SMFR Transportable					Total
	Kapuas Hulu	Singkawang	Kubu Raya	Sambas	Sintang	
Radionavigasi Penerbangan (108 - 118 MHz)	82	1193	378	178	131	1962
Bergerak Penerbangan (118 - 137 MHz)	127	2956	4623	1241	143	9090
Bergerak Maritim VHF (Panggilan dan DSC Marabahaya)	83	985	951	966	143	3128
Tetap, Bergerak VHF	81	149	144	144	125	643
Satellit-Bergerak (Bumi ke Angkasa)	81	149	144	144	123	641
Grand Total	454	5432	6240	2673	665	15464

Hasil monitor didominasi pada Pita Bergerak Penerbangan (118–137 MHz) Pita ini menyumbang jumlah hasil frekuensi terbanyak yaitu 9.090 frekuensi. Site Kubu dan Singkawang menjadi kontributor utama dengan banyaknya frekuensi yang dimonitor dan berhasil diidentifikasi.



Gambar 8 Grafik Hasil Frekuensi Termonitor Pada Monitoring Rutin 5 Pita

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Telah dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Balmon Pontianak dan Balmon Lampung. Balmon Pontianak dan Balmon Lampung merupakan UPT Balmon Kelas II, masing-masing memiliki jumlah kab/kota yang hampir sama,



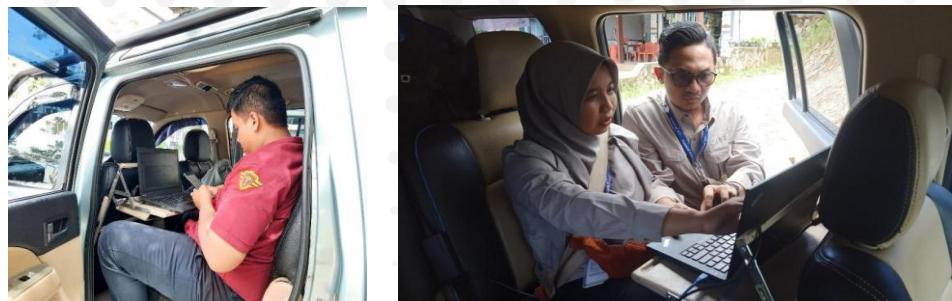
yaitu Jumlah Kab/Kota di wilayah kerja Balmon Pontianak adalah 14 Kab/Kota dan Balmon Lampung adalah 15 Kab/Kota. Walaupun Balmon Lampung memiliki jumlah Kab/Kota lebih banyak 1 Kab/Kota dari Balmon Pontianak, namun keduanya mencapai target capaian kinerja adalah 100%.

Adapun dari benchmark ini digunakan untuk upaya dalam peningkatan kualitas dan akan menjadi perbaikan untuk mencapai pencapaian kinerja di tahun yang akan datang.

Tabel 12. Benchmark Capaian Kinerja (IK-1) dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen SDPPI	Target %	Capaian %	Keterangan
Percentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	Balmon Pontianak	100	100	Percentase Capaian Balmon Pontianak dan Balmon Lampung sama sama 100%
	Balmon Lampung	100	100	





Gambar 9 Monitoring Penggunaan / Pendudukan Spektrum Frekuensi Radio

d. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Pada tahun 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak melaksanakan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio dengan sejumlah inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi pemantauan. Pemanfaatan dengan berbagai jenis perangkat untuk menjangkau seluruh 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Seluruh indikator kinerja dalam kegiatan monitoring telah mencapai target maksimal. Monitoring berhasil dilaksanakan di seluruh 14 kabupaten/kota, dengan cakupan 15 pita frekuensi, menjangkau total 3.983 frekuensi. Capaian ini menegaskan terpenuhinya indikator monitoring kabupaten/kota sebesar 100%. Kegiatan monitoring rutin 5 pita menggunakan SMFR Transportable juga menunjukkan kinerja sangat baik, dengan total 639 kali pelaksanaan dan dominasi hasil pada pita Bergerak Penerbangan (118–137 MHz) sebanyak 9.090 frekuensi. Kabupaten Kubu Raya menjadi kontributor terbanyak dalam monitoring dengan 2.632 frekuensi, menandakan prioritas dan kapasitas lokasi tersebut dalam mendukung kegiatan.

e. Tindak Lanjut

Peningkatan kapasitas teknis perangkat monitoring, khususnya untuk lokasi yang mengalami gangguan operasional seperti Ketapang dan Kapuas Hulu. Optimalisasi penggunaan stasiun monitoring transportable, dengan jadwal perawatan dan rotasi penggunaan antar-site agar kerusakan dapat diminimalkan. Penguatan basis data hasil monitoring, termasuk pelabelan legalitas frekuensi sebagai dasar tindakan penertiban di masa depan. Koordinasi lebih lanjut dengan instansi teknis terkait, untuk penanganan frekuensi ilegal atau tidak berizin. Penambahan hari kerja pemantauan pada bulan-bulan prioritas untuk menjamin validitas data.

Dampak

Kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kabupaten/kota merupakan salah satu fungsi strategis Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak dalam memastikan keteraturan pemanfaatan sumber daya spektrum frekuensi yang terbatas dan bernilai tinggi. Pelaksanaan kegiatan ini memberikan sejumlah dampak positif yang signifikan, baik dalam aspek teknis, regulatif, sosial, maupun ekonomi.

Pertama, dari sisi teknis dan keamanan spektrum, monitoring rutin dan insidental di wilayah kabupaten/kota telah mampu mendeteksi secara dini potensi



gangguan (interferensi) serta penggunaan frekuensi tanpa izin. Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan komunikasi, terutama untuk sektor-sektor vital seperti penyelenggara telekomunikasi, penyiaran, penerbangan, maritim, dan instansi keamanan yang sangat bergantung pada kestabilan sinyal radio.

Kedua, dari aspek penegakan hukum dan ketertiban regulasi, kegiatan monitoring berkontribusi pada peningkatan kesadaran pengguna frekuensi di daerah terhadap pentingnya kepatuhan terhadap izin dan sertifikasi perangkat. Melalui monitoring yang dilanjutkan dengan edukasi, klarifikasi, dan bila perlu penertiban, pemerintah hadir secara aktif dalam menjaga supremasi hukum di bidang komunikasi dan informatika.

Ketiga, secara sosial dan pelayanan publik, kegiatan monitoring di wilayah kabupaten/kota mendorong terciptanya ruang komunikasi yang sehat dan bebas dari gangguan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan komunikasi dan penyiaran tanpa hambatan. Hal ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang adil dan responsif, khususnya dalam menangani aduan gangguan spektrum.

Keempat, dari sisi efisiensi pemanfaatan spektrum dan keberlanjutan ekonomi digital, kegiatan monitoring mendukung terwujudnya efisiensi distribusi spektrum untuk layanan 4G, 5G, dan sistem komunikasi lainnya yang menjadi tulang punggung transformasi digital nasional. Wilayah kabupaten/kota yang tertib frekuensinya akan lebih siap menyambut investasi infrastruktur digital dan penyelenggaraan layanan publik berbasis TIK.

Dengan cakupan kerja yang mencakup beberapa kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Barat, kegiatan monitoring oleh Kantor Balmon Kelas II Pontianak selama tahun 2024 telah memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas spektrum di daerah. Hal ini sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kominfo dan mendorong pemerataan akses layanan komunikasi yang andal hingga ke wilayah perbatasan dan pelosok.

f. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Nilai-nilai pada *core values* ASN yaitu BerAKHLAK telah secara nyata diinternalisasi dalam pelaksanaan kegiatan monitoring tahun ini:

- **Berorientasi Pelayanan:** Pemantauan dilakukan dengan pendekatan menyeluruh terhadap wilayah dan frekuensi yang digunakan masyarakat dan instansi publik.
- **Akuntabel:** Setiap kegiatan terdokumentasi dengan baik, ditunjukkan dengan laporan per kabupaten/kota dan klasifikasi legalitas.
- **Kompeten:** Tim teknis mampu melaksanakan pemantauan lintas pita dan lintas wilayah dengan akurasi tinggi.
- **Harmonis:** Kolaborasi lintas *site* dan antartim lapangan berjalan lancar dan terus berkoordinasi.
- **Loyal:** Seluruh tim monitoring menunjukkan dedikasi tinggi, bahkan dalam kondisi perangkat tidak optimal.



- **Adaptif:** Strategi pelaksanaan berubah sesuai dinamika lapangan, termasuk dengan penambahan hari monitoring di wilayah yang rawan gangguan.
- **Kolaboratif:** Monitoring dan analisa dilakukan bersama dengan pelibatan unit kerja lainnya dalam perencanaan monitoring selanjutnya serta evaluasi hasil.

g. Efisiensi

Dari aspek efisiensi, kegiatan monitoring tahun 2024 dapat dikategorikan sangat optimal. Tim PFR yang menggunakan perangkat dilakukan terukur dan berjadwal, menghindari pemborosan waktu dan sumber daya mengingat pemanfaatan Aplikasi ROL yang bersifat *realtime*. Kegiatan monitoring rutin dimaksimalkan sejak pertengahan tahun dengan menyesuaikan ritme kerja dan kondisi perangkat. Pemeliharaan perangkat dilakukan berbasis kebutuhan dan tidak mengganggu pelaksanaan monitoring secara keseluruhan, walau terdapat 203 hari non-operasional karena *maintenance*. Cakupan dan hasil yang luas dicapai tanpa peningkatan signifikan pada anggaran, menunjukkan manajemen kinerja yang efisien dan profesional.



2. IK-2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

a. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Kegiatan pemeriksaan stasiun radio dilatarbelakangi oleh ketersediaan spektrum frekuensi radio yang terbatas dan perkembangan teknologi radio yang pesat, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan sesama pengguna frekuensi radio jika tidak diatur dengan baik. Peraturan perundang-undangan yang ada menjadi dasar hukum untuk menegakkan ketertiban dalam penggunaan frekuensi radio.

Maksud dari kegiatan pemeriksaan stasiun radio adalah untuk menjaga ketertiban, mencegah terjadinya gangguan, menciptakan penggunaan yang efisien, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Tujuannya adalah untuk memastikan stasiun radio yang beroperasi telah memiliki izin dan sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan, meningkatkan kualitas layanan, dan mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi yang tertib dan teratur untuk kepentingan masyarakat luas.

b. Sasaran Kegiatan

- Penyelenggara Stasiun Radio, mencakup penyelenggara stasiun radio siaran (radio FM dan TV digital) dan penyelenggara jaringan telekomunikasi stasiun radio microwave link (operator seluler). Pemeriksaan bertujuan untuk memastikan stasiun radio telah beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan dan peraturan yang berlaku.
- Pengukuran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio MW Link.
- Penggunaan Spektrum Frekuensi, memastikan bahwa stasiun radio menggunakan frekuensi yang sesuai peruntukannya dan tidak melakukan interferensi dengan layanan lain. Pemeriksaan ini mencakup pengukuran frekuensi, daya pancar, dan parameter teknis lainnya.
- Kepatuhan terhadap Peraturan, memastikan bahwa stasiun radio mematuhi semua peraturan yang berlaku, termasuk peraturan tentang perizinan, penggunaan frekuensi, dan standar teknis.

c. Capaian Target

Indikator kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio di tahun 2024 memiliki target capaian sebesar 100% yang dibagi dalam 2 sub indikator, yaitu Pemeriksaan Stasiun Radio dengan bobot 80%, dan Monitoring Perangkat dengan bobot 20%.

Sub indikator pemeriksaan stasiun radio dengan bobot 80% diperoleh dari target kinerja pada kegiatan-kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi yaitu; Pemeriksaan Stasiun Radio *Microwave Link* yang dilakukan secara *Open Shelter* atau *On Site* dengan jumlah target sebanyak 687 stasiun radio, Pemeriksaan Stasiun Radio *Microwave Link* yang dilakukan secara *Remote Site* dengan jumlah target sebanyak 3479 stasiun radio, Pemeriksaan Stasiun Radio TV Digital dengan jumlah target sebanyak 11 stasiun radio dan Radio FM dengan jumlah target sebanyak 53 stasiun radio.



Sepanjang tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan stasiun radio di wilayah Kalimantan Barat dengan capaian sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

Tabel 13 Capaian Pemeriksaan Stasiun Radio

No	Kinerja (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%

Capaian indikator kinerja berdasarkan dengan RPJMN 2020 – 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 14 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-2) 2020-2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Percentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	85%	100%	90%	97.71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

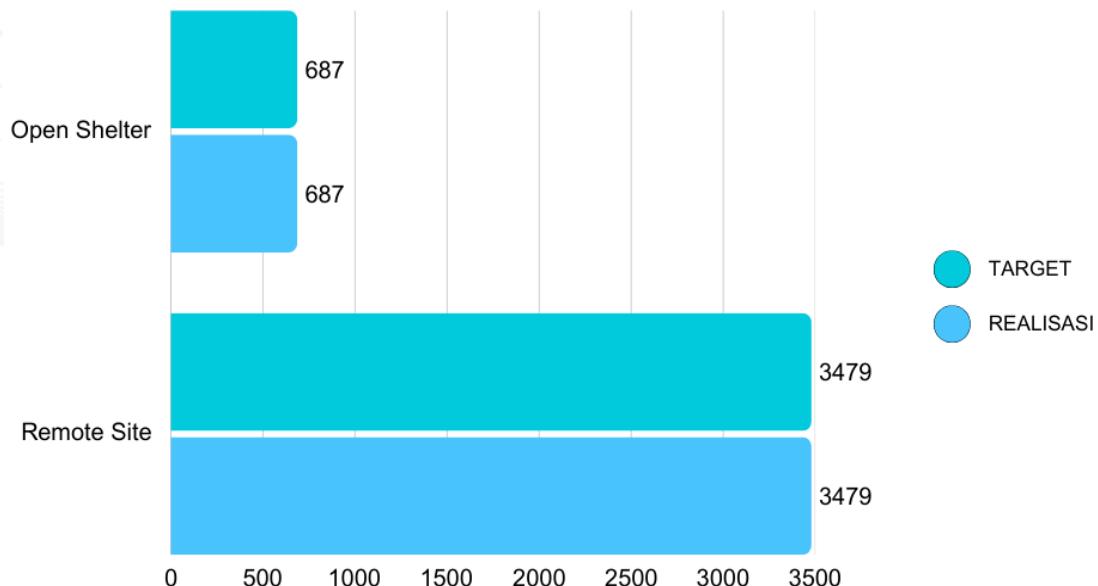
Berdasarkan jumlah target dan hasil realisasi, Balmon Kelas II Pontianak telah berhasil memperoleh capaian 100% pada Indikator Kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio.

Pemeriksaan Stasiun Radio (80%)

Pemeriksaan stasiun radio dilakukan dengan tujuan untuk memastikan stasiun radio yang beroperasi telah memiliki izin, sesuai dengan parameter standar teknis, menggunakan perangkat yang telah tersertifikasi, dan beroperasi pada frekuensi radio sesuai peruntukannya sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap pengguna lain.

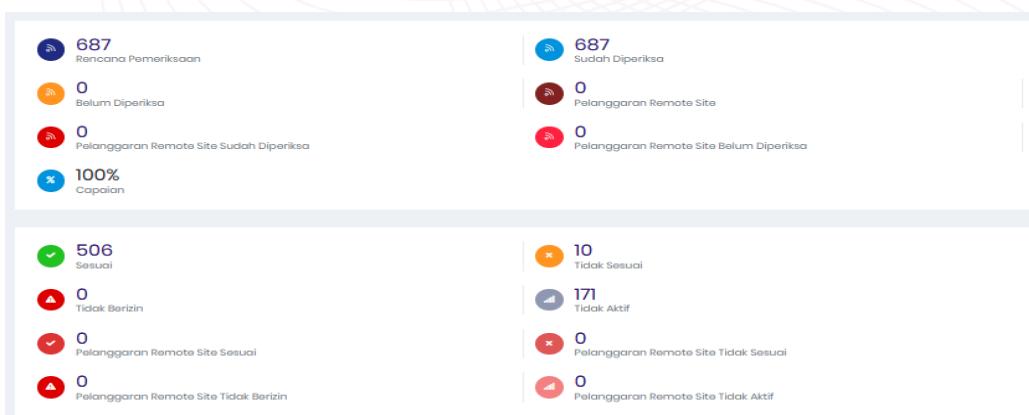


TARGET VS REALISASI
PEMERIKSAAN STASIUN RADIO MW LINK TAHUN 2024



Gambar 10 Grafik target vs realisasi pemeriksaan stasiun radio *microwave link*

Grafik tersebut menyajikan perbandingan antara target dan realisasi capaian pemeriksaan stasiun radio *microwave link* pada tahun 2024, dimana berdasarkan target pada dua metode pemeriksaan stasiun radio *microwave link* baik secara *open shelter* maupun *remote site* dapat direalisasikan sesuai jumlah target yang telah ditentukan. Pelaporan hasil dari kegiatan pemeriksaan stasiun radio *microwave link* dilaporkan melalui aplikasi APSTARD, dengan hasil *capture* sebagaimana terlampir:

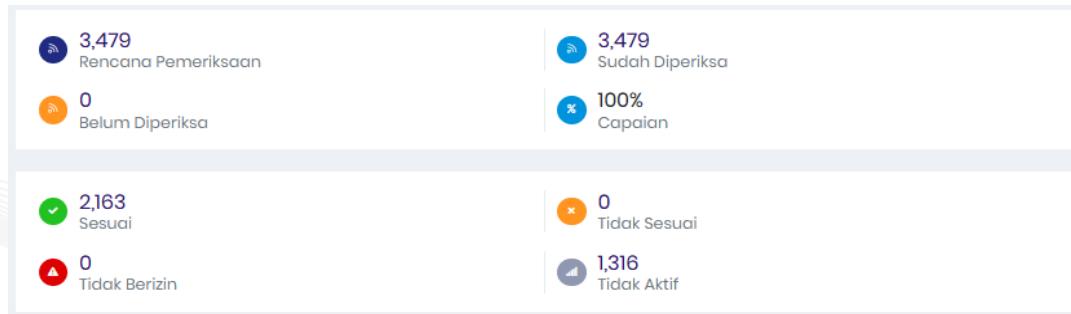


Gambar 11 Gambar pelaporan pemeriksaan stasiun radio *mw link* secara *open shelter*

Berdasarkan hasil pemeriksaan stasiun radio *microwave link* secara *open shelter* dengan jumlah target sebanyak 687 stasiun radio, dimana terdapat 506



stasiun radio sesuai ISR, 10 stasiun radio tidak sesuai ISR, dan 171 stasiun radio dalam kondisi tidak aktif atau *off air*.



Gambar 12 pelaporan pemeriksaan stasiun radio *mw link* secara *remote site*

Berdasarkan hasil pemeriksaan stasiun radio *microwave link* secara *remote site* dengan jumlah target sebanyak 3479 stasiun radio, dimana terdapat 2163 stasiun radio sesuai ISR dan 1316 stasiun radio dalam kondisi tidak aktif atau *off air*.

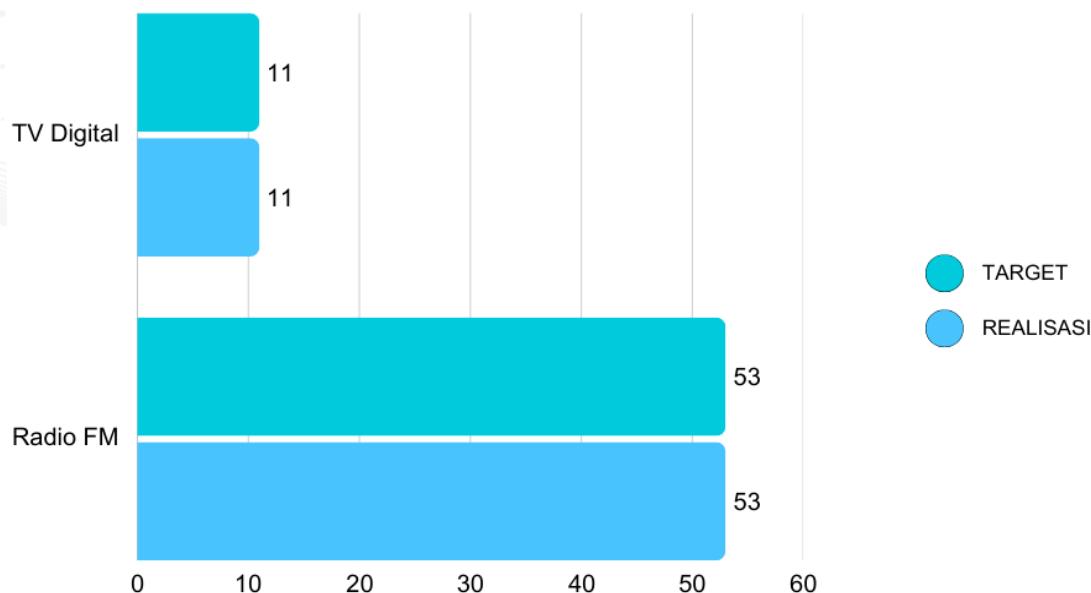


Gambar 13 Dokumentasi kegiatan pemeriksaan stasiun radio *microwave link*

Selain pemeriksaan stasiun radio *microwave link*, Balmon Pontianak juga melaksanakan kegiatan pemeriksaan stasiun radio siaran TV Digital dan Radio FM, dengan jumlah target sebanyak 11 stasiun radio TV digital dan 53 stasiun radio FM. Data target vs realisasi pemeriksaan stasiun radio siaran seperti terlampir pada tabel berikut:



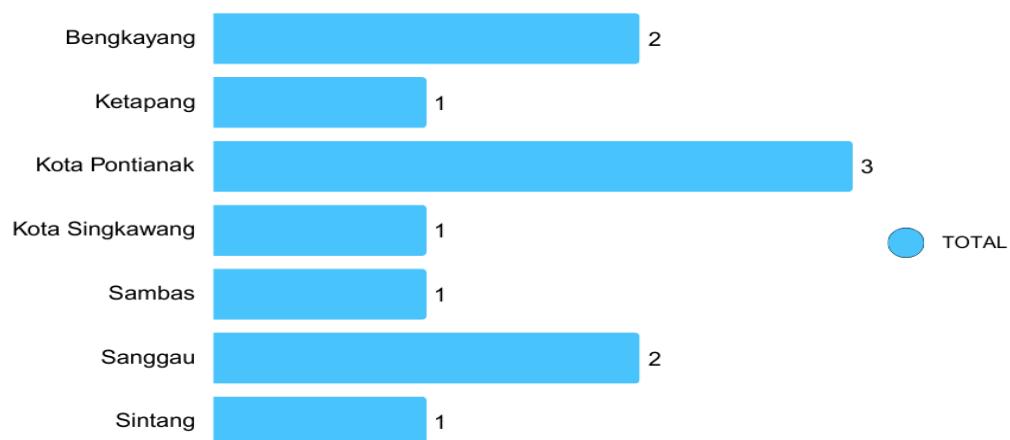
TARGET VS REALISASI
PEMERIKSAAN/PENGUKURAN PARAMETER TEKNIS
STASIUN SIARAN TAHUN 2024



Gambar 14 Grafik target vs realisasi pemeriksaan stasiun radio siaran

Data lebih rinci terkait target stasiun radio siaran TV digital dijabarkan pada tabel berikut yang dikelompokkan berdasarkan kab/kota, dimana target stasiun radio siaran TV Digital adalah 100% seluruh stasiun radio diperiksa/diukur. Dari total 14 kab/kota di wilayah Kalimantan Barat, terdapat 11 stasiun radio TV Digital yang berlokasi di Kab. Bengkayang, Kab. Ketapang, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Sambas, Kab. Sanggau, dan Kab. Sintang.

JUMLAH STASIUN RADIO TV DIGITAL DIPERIKSA/DIUKUR
BERDASARKAN KAB./KOTA TAHUN 2024

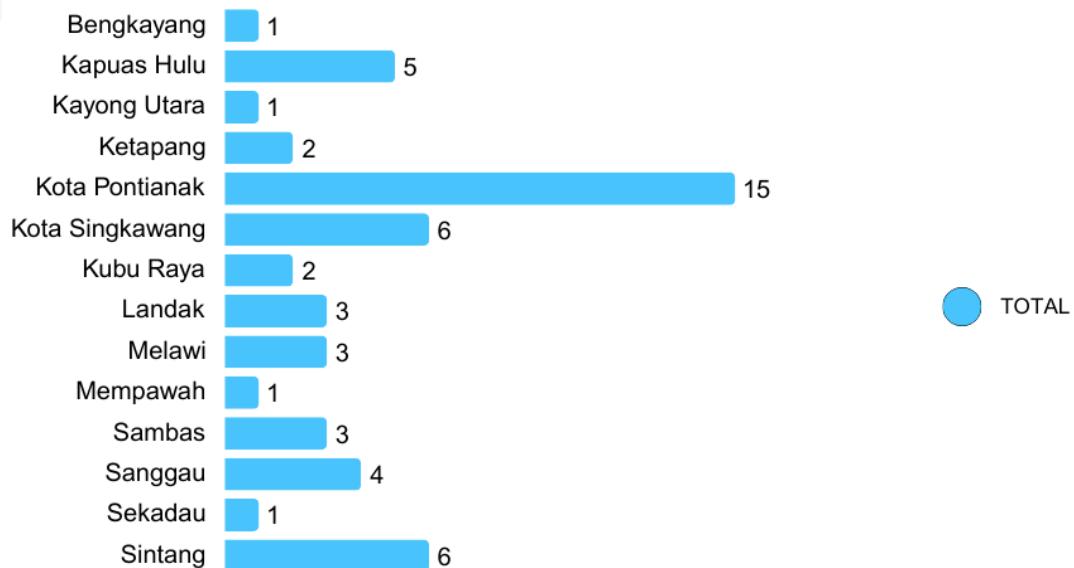


Gambar 15 Grafik jumlah stasiun radio siaran TV Digital berdasarkan kab/kota wilayah
Kalimantan Barat



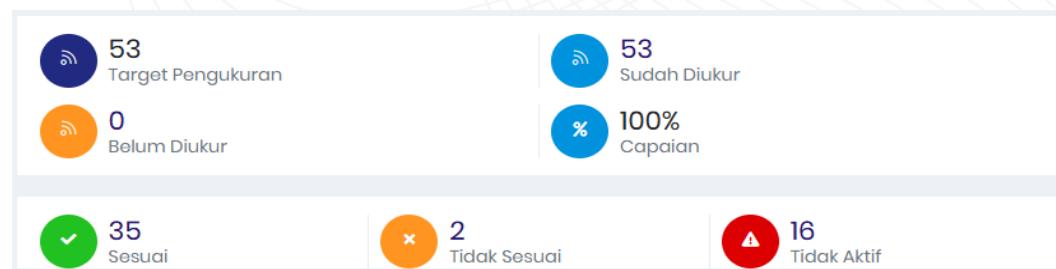
Sedangkan untuk data lebih rinci terkait target stasiun siaran radio FM dijabarkan pada tabel berikut yang dikelompokkan berdasarkan kab/kota, dimana target stasiun siaran radio FM adalah 100% seluruh stasiun radio diperiksa/diukur.

JUMLAH STASIUN RADIO SIARAN FM DIPERIKSA/DIUKUR
BERDASARKAN KAB./KOTA TAHUN 2024



Gambar 16 Grafik jumlah stasiun radio FM berdasarkan kab/kota wilayah Kalimantan Barat

Pelaporan hasil dari kegiatan pemeriksaan stasiun siaran radio FM dilaporkan melalui aplikasi APSTARD, dengan hasil *capture* sebagaimana terlampir:



Gambar 17 pelaporan pemeriksaan stasiun siaran radio FM

Berdasarkan hasil pemeriksaan stasiun siaran radio FM dengan jumlah target sebanyak 53 stasiun radio, dimana terdapat 35 stasiun radio sesuai ISR, 2 stasiun radio tidak sesuai ISR, dan 16 stasiun radio dalam kondisi tidak aktif atau *off air*. Untuk stasiun radio yang tidak sesuai parameter teknis telah diberikan peringatan kepada penanggung jawab stasiun untuk melakukan pemeliharaan/perbaikan



perangkat pemancar nya agar ketidaksesuaian parameter yang ditemukan dapat diperbaiki.



Gambar 18 Dokumentasi kegiatan pemeriksaan stasiun radio siaran TV Digital dan Radio FM

Hasil capaian kegiatan pemeriksaan stasiun radio siaran TV Digital dan Radio FM yang telah dilaksanakan oleh Balmon dapat dilihat pada tabel berikut ini dalam bentuk perbandingan data antara target dan realisasi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 15 perbandingan target vs realisasi capaian pemeriksaan stasiun radio siaran TV Digital dan Radio FM tahun 2022 sampai dengan tahun 2024

Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pengukuran parameter teknis stasiun radio siaran FM	24	53	29	48	53	53
Pengukuran parameter teknis stasiun radio TV Digital	9	9	10	10	11	11
Capaian	100%		100%		100%	



Monitoring Perangkat (20%)

Kegiatan monitoring alat/perangkat telekomunikasi merupakan salah satu dari tugas dan fungsi Balmon Pontianak. Monitoring perangkat telekomunikasi dilakukan untuk memeriksa kesesuaian standar dari perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dan atau dipergunakan di wilayah Kalimantan Barat. Pemeriksaan perangkat diprioritaskan pada 16 jenis perangkat telekomunikasi yaitu : *HF All Band Tranceiver, Wireless Access Point, Pemancar FM, Simbox/modempool, Repeater GSM, Radio RIG, GPS Tracker, Microwavelink (ODU/IDU), Handy Talkie, Set Top Box, Perangkat Low Power (Wireless Keyboard, TWS, Smart Watch), OLT dan ONT, Radio POC, Jammer, Fake BTS, dan Alat/Perangkat Rakitan.*

Target kegiatan monitoring perangkat telekomunikasi didasarkan pada:

- Jumlah kegiatan sebanyak 8 kali kegiatan
- Kegiatan di kab/kota yang sama atau pernah dilakukan monitoring sebelumnya maksimal sebanyak 2 kali kegiatan
- Jumlah jenis perangkat prioritas yang dimonitor dalam setiap kegiatan minimal 3 jenis perangkat

Hasil capaian dari kegiatan monitoring perangkat telekomunikasi di tahun 2024 adalah sebanyak 11 kegiatan sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

Tabel 16 hasil kegiatan monitoring perangkat telekomunikasi

No	Kab./Kota Termonitor	Jenis Perangkat	Total Jenis Perangkat
1	Bengkayang	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Low Power • Set Top Box • Wireless Access Point 	3 jenis
2	Landak	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Low Power • Set Top Box • Pemancar FM 	3 jenis
3	Sekadau	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Low Power • Set Top Box • Pemancar FM 	3 jenis
4	Sanggau	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Low Power • Set Top Box • Pemancar FM 	3 jenis
5	Sambas	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Low Power • Optical Line Terminal (OLT) & Optical Network Terminal (ONT) • Set Top Box • Handy Talkie 	5 jenis



• Radio RIG

6	Kota Singkawang	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Low Power • Set Top Box • Pemancar FM • Handy Talkie • Wireless Access Point 	5 jenis
7	Ketapang	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Low Power • Handy Talkie • Wireless Access Point 	3 jenis
8	Bengkayang	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Low Power • Handy Talkie • Wireless Access Point • Radio RIG 	4 jenis
9	Kota Singkawang	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Low Power • Set Top Box • Wireless Access Point 	3 jenis
10	Mempawah	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Low Power • Set Top Box • Wireless Access Point 	3 jenis
11	Kubu Raya	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Low Power • Set Top Box • Wireless Access Point 	3 jenis



Gambar 19 Dokumentasi kegiatan monitoring perangkat telekomunikasi



Hasil capaian kegiatan monitoring perangkat telekomunikasi yang telah dilaksanakan oleh Balmon dapat dilihat pada tabel berikut ini dalam bentuk perbandingan data antara target dan realisasi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 17 perbandingan target vs realisasi capaian monitoring perangkat telekomunikasi tahun 2022 sampai dengan tahun 2024

Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Monitoring alat/perangkat telekomunikasi	4 kegiatan	4 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	8 kegiatan	11 kegiatan
Capaian	100%		100%		100%	

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Telah dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Balmon Pontianak dan Balmon Palangkaraya. Balmon Pontianak dan Balmon Palangkaraya memiliki jumlah Kab/Kota yang sama, yaitu 14 kab/kota. Namun untuk luas wilayah kerja, Balmon Palangkaraya memiliki luas wilayah yaitu 153.564,50, sedangkan balmon pontianak luas wilayah kerjanya yaitu 147.307. Balmon Pontianak dan Balmon Palangkaraya sama-sama memiliki nilai capaian 100% pada kegiatan pemeriksaan stasiun radio.

Adapun dari benchmark ini digunakan untuk upaya dalam peningkatan kualitas dan akan menjadi perbaikan untuk mencapai pencapaian kinerja di tahun yang akan datang.

Tabel 18 Benchmark Capaian Kinerja (IK-2) dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen SDPPI	Target %	Capaian %	Keterangan
Percentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	Balmon Pontianak	100	100	Percentase Capaian Balmon Pontianak dan Balmon Palangkaraya sama sama 100%
	Balmon Palangkaraya	100	100	

d. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Keberhasilan pemeriksaan stasiun radio diukur dari berbagai aspek, baik angka maupun kualitas. Dari segi kuantitatif, tercapainya target pemeriksaan, seperti yang terlampir pada tabel realisasi capaian, menunjukkan efisiensi dan



efektivitas pelaksanaan. Jumlah pelanggaran yang menurun juga menandakan peningkatan kepatuhan. Secara kualitatif, pengurangan gangguan frekuensi dan peningkatan kualitas layanan menunjukkan dampak positif pemeriksaan. Kepatuhan terhadap regulasi diukur dari tingkat kepatuhan stasiun radio dan efektivitas penegakan hukum. Dampak sosial, seperti kepuasan dan kesadaran masyarakat, juga menjadi indikator keberhasilan pemeriksaan.

e. Tindak Lanjut

Untuk menindaklanjuti keberhasilan pencapaian target pemeriksaan stasiun radio, perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap faktor-faktor yang berkaitan, efektivitas prosedur, dan data pelanggaran yang ditemukan. Selanjutnya, kualitas pelayanan perlu ditingkatkan melalui sosialisasi, peningkatan kompetensi petugas, dan pemanfaatan teknologi. Penegakan hukum pada tindak lanjut pelanggaran dan peningkatan pengawasan juga penting. Pengembangan sistem dan regulasi melalui evaluasi regulasi dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi diperlukan untuk mendukung pengelolaan yang lebih baik.

Dampak

Pemeriksaan stasiun radio memiliki dampak strategis dalam pengelolaan spektrum frekuensi yang efisien dan berkeadilan. Dari aspek teknis, pemeriksaan memastikan bahwa parameter teknis stasiun, seperti frekuensi kerja, daya pancar, jenis modulasi, serta koordinat lokasi, sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Stasiun Radio (ISR). Hal ini penting untuk mencegah terjadinya interferensi antar pengguna spektrum, terutama di kawasan padat layanan komunikasi seperti kota dan daerah perbatasan.

Selain itu, dari aspek regulasi dan kepatuhan hukum, kegiatan pemeriksaan mendorong para pengguna frekuensi, baik instansi pemerintah, lembaga penyiaran, maupun sektor swasta, untuk melaksanakan kewajiban perizinan secara lengkap dan tepat waktu. Pemeriksaan di lapangan juga berfungsi sebagai sarana edukasi langsung, terutama terhadap operator atau pengelola stasiun yang belum sepenuhnya memahami ketentuan teknis penggunaan spektrum dan ketentuan administratif yang berlaku.

Dampak sosial dan pelayanan publik juga signifikan. Dengan terlaksananya pemeriksaan secara rutin dan selektif, masyarakat sebagai pengguna akhir layanan penyiaran (radio FM/AM), komunikasi radio layanan publik (seperti ORARI/RAPI), maupun komunikasi institusional (pemerintah, transportasi, keamanan) dapat merasakan kualitas layanan yang lebih stabil dan bersih dari gangguan frekuensi.

Selama tahun 2024, Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan stasiun radio secara selektif dan responsif terhadap potensi gangguan maupun temuan lapangan. Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti melalui pemberian teguran, pembinaan teknis, maupun rekomendasi penertiban apabila ditemukan pelanggaran berat. Capaian ini sejalan dengan sasaran strategis Kementerian Kominfo untuk mewujudkan tata kelola spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan mendukung ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan.



f. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target pada pelaksanaan Pemeriksaan Stasiun Radio menggunakan prinsip-prinsip BerAKHLAK sebagai berikut :

- **Berorientasi Pelayanan:** kegiatan pemeriksaan stasiun radio bertujuan untuk memastikan bahwa frekuensi radio digunakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak saling mengganggu antar pengguna.
- **Akuntabel:** dilakukan secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Petugas harus mencatat hasil pemeriksaan secara cermat dan melaporkannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- **Kompeten:** memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang memadai serta memahami tentang peraturan frekuensi radio dan mahir mengoperasikan alat ukur yang digunakan.
- **Harmonis:** mampu membangun komunikasi yang baik dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif selama pelaksanaan kegiatan.
- **Loyal,** memberikan layanan sesuai prinsip dan aturan yang berlaku serta menjaga nama baik khususnya Balmon SFR Kelas II Pontianak.
- **Adaptif,** menyesuaikan diri dan terus berinovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanannya.
- **Kolaboratif:** pemeriksaan stasiun radio seringkali melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemilik/penyelenggara stasiun radio, instansi terkait, dan masyarakat.

g. Efisiensi

Penggunaan aplikasi pelaporan hasil pemeriksaan stasiun radio yang disebut Aplikasi APSTARD (Aplikasi Pemeriksaan Stasiun Radio). Aplikasi APSTARD ini dibuat dengan tujuan bagi UPT mengunduh data target stasiun radio untuk pemeriksaan stasiun radio, dan mengunggah hasil pemeriksaan/ pengukuran stasiun radio yang telah dilaksanakan, dan juga dapat menampilkan hasil capaian terkini pada *dashboard* aplikasi sehingga UPT dapat memonitor persentase capaian khususnya untuk indikator pemeriksaan stasiun radio. Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator Pemeriksaan Stasiun Radio telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, dan dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai 100%.



3. IK-3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

a. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Salah satu bentuk pelayanan terhadap pengguna frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak melakukan penanganan gangguan frekuensi radio sebagai upaya untuk melayani dan melindungi masyarakat dari interferensi gangguan stasiun radio yang telah mendapat izin dari pemerintah. Kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan interferensi tersebut sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat memenuhi standar sesuai dengan Key Performance Indicator (KPI) dan bertujuan untuk menghentikan interferensi frekuensi radio yang berasal dari perangkat yang mengakibatkan interference serta bebas dari gangguan (interference) yang merugikan pengguna frekuensi radio lainnya.



b. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio tersebut dilaksanakan oleh petugas untuk :

- Melaksanakan pengecekan kesesuaian Izin Stasiun Radio (ISR) dengan parameter teknis serta penggunaan frekuensi radio dan oleh pelapor;
- Melakukan monitoring stasiun radio terganggu;
- Melaksanakan Identifikasi sumber gangguan menggunakan bantuan perangkat direction Finder dan Spectrum Analyzer di stasiun tetap dan bergerak;
- Melaksanakan deteksi, menginspeksi dan mengukur karakteristik sumber gangguan;
- Menghentikan penggunaan frekuensi radio yang telah menyebakan gangguan;
- Melaporkan hasil penanganan gangguan serta evaluasi.

c. Capaian Target

Pada Tahun 2024 Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio di UPT selama Tahun 2024 memiliki target realisasi sebesar 100%. Berdasarkan data capaian diketahui bahwa nilai dari realisasi sampai akhir Desember 2024 sebesar 100%.



Tabel 19 Capaian Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2024

No	Kinerja (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	100%	100%	100%

Capaian indikator kinerja berdasarkan dengan RPJMN 2020 – 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 20 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-3) 2020-2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Percentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	100%	100%	97%	100%	98%	100%	99%	100%	100%	100%

Pada tahun anggaran 2024, Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak dapat menyelesaikan 2 (dua) gangguan frekuensi radio di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat dengan target pada perjanjian kinerja 100% aduan/klaim yang diselesaikan, upaya penanganan gangguan frekuensi radio telah dselesaikan 100% terselesaikan atau tidak terjadi lagi interference pada aduan yang sama (clear).

Komposisi aduan gangguan frekuensi yang terjadi selama tahun 2024 adalah :

Tabel 21 Aduan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

NO.	PENGADUAN	PIHAK TERGANGGU	FREKUENSI RADIO	PIHAK PENGGANGGU	STATUS
1	9 Agustus 2024	Ade Kunriawan (Ketua Tim Monev Balmon Kelas II Pontianak	173 MHz	Kalbar Media Vision (TV Kabel)	Clear
2	27 Juli 2024	PT. Radio Ramera Sintang	88.3 MHz	Internal Perangkat	Clear

Target kinerja untuk penanganan gangguan frekuensi radio yang telah ditetapkan adalah sebesar 100 % pada tahun 2024. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak dapat menyelesaikan seluruh aduan



gangguan frekuensi dengan baik dan maksimal, sehingga capaian kinerja adalah 100 %.

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Telah dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Balmon Pontianak dan Balmon Palangkaraya. Balmon Pontianak dan Balmon Palangkaraya memiliki jumlah Kab/Kota yang sama, yaitu 14 kab/kota. Namun untuk luas wilayah kerja, Balmon Palangkaraya memiliki luas wilayah yaitu 153.564,50, sedangkan balmon pontianak luas wilayah kerjanya yaitu 147.307. Balmon Pontianak dan Balmon Palangkaraya sama-sama memiliki nilai capaian 100% pada kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio.

Adapun dari benchmark ini digunakan untuk upaya dalam peningkatan kualitas dan akan menjadi perbaikan untuk mencapai pencapaian kinerja di tahun yang akan datang.

Tabel 22 Benchmark Capaian Kinerja (IK-3) dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen SDPPI	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	Balmon Pontianak	100	100	Persentase Capaian Balmon Pontianak dan Balmon Palangkaraya sama sama 100%
	Balmon Palangkaraya	100	100	

d. Inovasi /Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Gangguan frekuensi radio dapat berdampak negatif pada komunikasi dan operasional berbagai sektor, termasuk telekomunikasi, penerbangan, maritim, dan penyiaran. Oleh karena itu, upaya yang efektif diperlukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi gangguan ini. Untuk menganalisis keberhasilan dan ketidaktercapaian dalam menyelesaikan gangguan frekuensi radio serta menyusun program inovatif untuk meningkatkan capaian di masa depan.

e. Tindak Lanjut

Berikut adalah faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan dalam menangani gangguan frekuensi radio:

- **Adanya website** <https://laporgangguansfr.postel.go.id> yang disediakan oleh Direktorat Pengendalian SDPPI memudahkan dalam melakukan pelaporan gangguan pada pengguna.
- **Kerjasama tim** dalam melaksanakan tugas penanganan gangguan di UPT dalam segi penggunaan dan pemanfaatan kegiatan tersebut dengan lebih berhati hati dan profesional, sehingga tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sangat tinggi.



- **Ketidaktercapaian target** harus di perhatikan karena kegiatan penanganan gangguan melibatkan masyarakat luas dan ada yang mengerti dan tidak mengerti tentang penggunaan frekuensi radio.
- **Peningkatan Pengawasan:** Implementasi sistem pemantauan spektrum radio berbasis AI memungkinkan deteksi gangguan lebih cepat dan akurat.
- **Koordinasi dengan Pihak Terkait:** Kerja sama dengan operator telekomunikasi, penyedia layanan radio, dan regulator meningkatkan efektivitas dalam menyelesaikan gangguan.
- **Penerapan Teknologi Mitigasi:** Penggunaan filter frekuensi dan perangkat mitigasi lainnya membantu mengurangi gangguan sinyal.
- **Kampanye Edukasi:** Sosialisasi kepada pengguna radio mengenai penggunaan frekuensi yang benar membantu mengurangi interferensi yang tidak disengaja.
- **Respon Cepat terhadap Laporan:** Adanya pusat layanan pengaduan yang responsif mempercepat penyelesaian gangguan.

Dampak

Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio merupakan salah satu kegiatan inti dari Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak dalam menjalankan mandat pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi di wilayah kerjanya. Kegiatan ini memiliki dampak yang sangat penting terhadap kelancaran komunikasi nasional, perlindungan terhadap layanan vital, serta peningkatan kepercayaan masyarakat dan pengguna layanan komunikasi terhadap kehadiran pemerintah.

Dari sisi teknis dan operasional, kegiatan penanganan gangguan telah mampu menjaga kestabilan komunikasi radio, khususnya pada layanan-layanan yang bersifat strategis seperti komunikasi penerbangan (aeronautical), maritim, pertahanan dan keamanan, penyiaran, serta layanan darurat dan kebencanaan. Gangguan frekuensi yang tidak tertangani dapat menyebabkan disrupsi komunikasi, yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan jiwa manusia dan kerugian ekonomi yang signifikan. Melalui deteksi cepat, pelacakan sumber gangguan, dan penindakan lapangan, Kantor Balmon Pontianak telah berperan aktif dalam mencegah terjadinya eskalasi gangguan yang lebih luas.

Dari aspek regulasi dan kepatuhan, penanganan gangguan juga berfungsi sebagai pengingat dan penguat terhadap pentingnya penggunaan spektrum secara sah dan sesuai izin. Banyak kasus gangguan yang bersumber dari penggunaan perangkat ilegal atau tidak tersertifikasi, serta dari pengoperasian frekuensi tanpa izin (illegal transmitter). Dengan adanya langkah penertiban dan sosialisasi yang mengikuti penanganan gangguan, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, semakin meningkat di kalangan pengguna frekuensi radio di wilayah Kalimantan Barat.



Dampak sosial dan pelayanan publik juga signifikan. Respon cepat terhadap laporan gangguan dari masyarakat maupun instansi pengguna frekuensi menunjukkan komitmen Kantor Balmon Kelas II Pontianak terhadap prinsip pelayanan prima dan responsif. Penanganan gangguan tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan publik bahwa negara hadir dalam menjamin kualitas layanan komunikasi dan penyiaran yang mereka terima.

Secara strategis dan nasional, kegiatan ini mendukung pelaksanaan Transformasi Digital Nasional yang diusung dalam RPJMN 2020–2024 dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika. Spektrum frekuensi merupakan infrastruktur tak kasat mata yang menjadi fondasi bagi layanan 4G/5G, penyiaran digital, dan berbagai inovasi teknologi berbasis komunikasi nirkabel. Keberhasilan dalam menjaga spektrum tetap bersih dari gangguan berarti memperkuat daya saing ekonomi digital dan menjamin keberlanjutan layanan publik berbasis TIK di seluruh Indonesia, termasuk wilayah perbatasan dan terpencil.

Selama tahun 2024, seluruh laporan gangguan yang masuk telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai prosedur operasional tetap, dengan peningkatan efektivitas pelacakan sumber gangguan melalui sistem monitoring digital dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Hasil ini menunjukkan bahwa Kantor Balmon Kelas II Pontianak mampu melaksanakan peran kunci dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Kalimantan Barat.

f. Implementasi Budaya Nilai Berakhlak

Dalam proses pencapaian target pada pelaksanaan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio menggunakan prinsip-prinsip berAKHLAK sebagai berikut :

- **Berorientasi pelayanan** : petugas dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan, bersikap ramah, tanggap, berusaha memberikan solusi terbaik, dan ‘update’ terhadap pembaharuan sistem.
- **Akuntabel** : memberikan pelayanan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin sesuai aturan dan berintegritas.
- **Kompeten** : meningkatkan kemampuan dengan banyak menggali informasi dan pengetahuan.
- **Harmonis** : menghargai dan menghormati setiap klien, calon klien, dan masyarakat yang membutuhkan layanan, mengetahui dan semaksimal mungkin memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, jika perlu berkolaborasi dengan tim kerja yang lain.
- **Loyal** : memberikan layanan sesuai prinsip dan aturan kenegaraan dan menjaga nama baik khususnya Balmon SFR Kelas II Pontianak.



- **Adaptif** : terus belajar dan segera menyesuaikan diri terhadap perubahan yang sifatnya membawa kemajuan karena pelayanan selalu berkembang terutama memasuki era digitalisasi.
- **Kolaboratif** : selalu terbuka terhadap saran dan masukan dan bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan agar pelayanan kepada masyarakat menjadilebih baik.

g. Efisiensi

Salah satunya yaitu dibuatnya aplikasi pelaporan aduan gangguan yang disebut Aplikasi Trouble Ticket. Aplikasi Trouble Ticket ini dibuat bertujuan mempercepat respon penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang terjadi / dilaporkan oleh masyarakat hal ini hal ini sudah termasuk efisien dalam hal waktu dan laporan. Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio di UPT” telah tercapai sesuai PK yang ditetapkan, karena dapat dilihat dari jumlah aduan dan aduan tertangani pada Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai (100%).



4. IK-4 Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi

a. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Spektrum Frekuensi radio adalah sumber daya alam yang terbatas oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaannya. Undang - undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah mengatur penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi bahwa setiap penggunaan spektrum frekuensi radio wajib memiliki izin dari Pemerintah dan setiap perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak senantiasa melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dengan mengamati, memantau, memeriksa, mengukur, dan pada akhirnya melaksanakan operasi penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio ilegal dan yang tidak sesuai ketentuan teknis perangkat.

Dari hasil pengawasan dan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio, Balmon Kelas II Pontianak telah melakukan sosialisasi denda terhadap pengguna spektrum frekuensi radio yang ditemukan pelanggaran tidak memiliki izin stasiun radio, tidak sesuai parameter teknis serta merakit, menggunakan dan memperdagangkan perangkat yang tidak dilengkapi dengan sertifikat resmi dari pemerintah.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Penertiban pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah setiap pengguna frekuensi radio yang tidak memiliki Izin Stasiun Radio (ISR), tidak sesuai dengan parameter teknis, perakit, pembuat perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat resmi dari pemerintah dan digunakan maupun di perdagangkan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

c. Capaian Target

Target Penertiban adalah hasil dari kegiatan Observasi Monitoring, Pengukuran Parameter Teknis Radio Siaran dan Televisi, Pemeriksaan Stasiun Radio serta Penanganan Gangguan yang telah dilakukan dan terdapat penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Ilegal maupun tidak sesuai izin stasiun radio (ISR).

Pada tahun 2024 dilakukan sebanyak 6 (enam) kegiatan penertiban dengan persentase (%) target perjanjian kinerja sebesar 91% untuk penertiban spektrum frekuensi radio dan 96% untuk penertiban alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.



Tabel 23 Capaian Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi

No	Kinerja (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	4. Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%	100	108.74%

Capaian indikator kinerja berdasarkan dengan RPJMN 2020 – 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 24 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-4) 2020-2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	50%	100%	70%	100%	95%	100%	93%	100%	93%	100%

Dengan formula perhitungan capaian kinerja penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagai berikut:

% Total Capaian =% Capaian Penertiban SFR +% Capaian Penertiban APT

$$\% \text{ Capaian Tib SFR} = \frac{\text{Jumlah data ilegal menjadi Off Air}}{\text{Jumlah data ilegal yang ditertibkan}} \times 100 \%$$

$$\% \text{ Capaian Tib APT} = \frac{\text{Jumlah tindak lanjut monitoring APT}}{\text{Jumlah data APT ilegal}} \times 100 \%$$

Tabel berikut adalah hasil Penertiban Nasional Tahap I-IV dan Penertiban terhadap pelanggaran tidak memiliki ISR, tidak sesuai parameter teknis serta perangkat tidak bersertifikat.



Tabel 25 Daftar Jumlah Pelanggaran dan Tindak Lanjut

No	Jenis	Pelanggaran		Tindak Lanjut		
		Ilegal	Tidak Sesuai Pertek / Standar Teknis	Pengehentian	Pengamanan / Segel	Penyesuaian
1	SFR	45	31	30	15	31
2	APT	12	6	12	0	6
Total		57	37	42	15	37

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Telah dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Balmon Pontianak dan Balmon Lampung. Balmon Pontianak dan Balmon Lampung merupakan sama-sama Balmon Kelas II. Sehingga Balmon Lampung sesuai untuk dijadikan *benchmark* oleh Balmon Pontianak. Balmon Pontianak dan Balmon Lampung sama-sama memiliki nilai capaian 100% pada kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi.

Adapun dari benchmark ini digunakan untuk upaya dalam peningkatan kualitas dan akan menjadi perbaikan untuk mencapai pencapaian kinerja di tahun yang akan datang.

Tabel 26 Benchmark Capaian Kinerja (IK-4) dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen SDPPI	Target %	Capaian %	Keterangan
Percentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	Balmon Pontianak	100	100	Percentase Capaian Balmon Pontianak dan Balmon Lampung sama sama 100%
	Balmon Lampung	100	100	

d. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penertiban spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi ilegal di wilayah kerja Balmon Pontianak, berbagai inovasi dan pendekatan strategis telah diterapkan sepanjang tahun 2024.

1. Pemetaan Proaktif Daerah Rawan Gangguan Balmon Pontianak melakukan pemetaan berbasis data historis dan laporan gangguan dari tahun-tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi daerah rawan pelanggaran frekuensi. Wilayah-wilayah ini dijadikan prioritas operasi penertiban.
2. Kolaborasi Lintas Instansi dan Stakeholder Lokal Pendekatan kolaboratif diterapkan dengan menggandeng aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan komunitas pengguna radio untuk meningkatkan efektivitas penindakan serta memperluas jangkauan pengawasan.



3. Penggunaan Perangkat Monitoring Portabel Berbasis Digital Tim lapangan mulai menggunakan perangkat monitoring portable (DF Receiver dan Spectrum Analyzer) berbasis digital yang memungkinkan penelusuran sumber gangguan secara lebih cepat dan akurat, khususnya di wilayah sulit dijangkau.
4. Digitalisasi Laporan Penertiban melalui e-Monitoring Seluruh kegiatan penertiban terdokumentasi secara real time melalui sistem e-Monitoring SDPPI, sehingga memudahkan proses pelaporan, evaluasi, dan pelacakan tindak lanjut.

e. Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari siklus pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, kegiatan penertiban yang telah dilakukan tidak berhenti pada aksi penghentian penggunaan perangkat atau frekuensi ilegal semata. Untuk menjamin keberlanjutan keteraturan spektrum serta mencegah berulangnya pelanggaran, UPT Balmon Pontianak telah menetapkan beberapa langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan Edukasi Pasca-Penertiban

Pelaku yang terbukti menggunakan perangkat atau frekuensi secara ilegal diberikan pembinaan secara langsung di lapangan, disertai penyampaian informasi mengenai mekanisme perizinan resmi dan dampak hukum dari pelanggaran spektrum. Hal ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan kepatuhan.

2. Koordinasi dengan Direktorat Pengendalian SDPPI

Kasus-kasus dengan tingkat pelanggaran berat atau yang berulang telah dilaporkan ke Direktorat Pengendalian untuk diberikan sanksi administratif lebih lanjut, termasuk pemblokiran izin ISR (Izin Stasiun Radio) apabila diperlukan.

3. Monitoring Ulang terhadap Lokasi Rawan Pelanggaran

Lokasi-lokasi yang menjadi titik penertiban dilakukan pemantauan ulang dalam kurun waktu tertentu untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran ulang. Pemantauan ini dilakukan secara mobile maupun stasioner oleh petugas monitoring.

4. Peningkatan Kolaborasi dengan Pemda dan Komunitas

Sebagai langkah pencegahan, dilakukan pendekatan persuasif dan pembentukan jejaring informasi di tingkat lokal, seperti kerja sama dengan dinas komunikasi kabupaten/kota, komunitas amatir radio, serta kelompok pengguna frekuensi di sektor perikanan dan logistik.

5. Evaluasi dan Updating Data Pelanggaran

Seluruh data hasil penertiban diinput ke dalam sistem informasi pengendalian frekuensi secara nasional (e-Monitoring), yang menjadi acuan dalam perencanaan kegiatan pengawasan tahun berikutnya serta sebagai dasar pengambilan kebijakan pengelolaan spektrum secara menyeluruh.

Dampak

Kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi merupakan bagian integral dari fungsi pengawasan dan



pengendalian oleh Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak dalam menjamin tertibnya penggunaan spektrum frekuensi yang merupakan sumber daya alam terbatas dan strategis. Kegiatan ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan, serta mendukung pelaksanaan transformasi digital secara berkelanjutan.

Dari aspek legalitas dan regulasi, penertiban dilakukan terhadap penggunaan spektrum frekuensi dan perangkat yang tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Menteri Kominfo terkait penggunaan spektrum dan sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi. Penertiban ini berfungsi menegakkan hukum dan mendorong tertib administrasi dalam penggunaan spektrum dan perangkat di wilayah Kalimantan Barat.

Dari sisi teknis, penertiban memberikan dampak positif dalam menjaga kualitas layanan komunikasi, mencegah gangguan (interferensi) antar pengguna legal, dan memastikan bahwa hanya perangkat yang telah memenuhi standar teknis (bersertifikat) yang beroperasi. Penggunaan perangkat ilegal atau tidak tersertifikasi dapat menyebabkan gangguan frekuensi, menurunkan efisiensi jaringan komunikasi, serta menimbulkan risiko keamanan dan keselamatan, terutama pada layanan vital seperti penerbangan, maritim, dan darurat.

Dalam dimensi sosial dan pelayanan publik, kegiatan penertiban memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir untuk memastikan hak publik atas layanan komunikasi yang aman, stabil, dan berkualitas. Penertiban juga menjadi bagian dari upaya edukasi kepada para pengguna, baik perorangan, instansi, maupun pelaku usaha, agar menggunakan perangkat dan spektrum secara sah dan bertanggung jawab. Pendekatan yang humanis dalam pelaksanaan penertiban turut membangun kesadaran kolektif dan kemitraan yang konstruktif antara regulator dan masyarakat.

Secara ekonomi dan tata kelola, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari sektor perizinan dan sertifikasi, serta menciptakan iklim usaha yang adil dan kondusif. Penggunaan perangkat ilegal dapat merugikan industri dalam negeri dan menciptakan praktik usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, penertiban turut mendukung keberlangsungan industri alat/perangkat telekomunikasi yang sah dan kompetitif.

Selama tahun 2024, Kantor Balmon Kelas II Pontianak telah melaksanakan kegiatan penertiban secara selektif berdasarkan hasil monitoring, pengaduan masyarakat, dan laporan gangguan. Tindakan penertiban dilakukan melalui proses persuasif, klarifikasi, hingga penindakan administratif sesuai ketentuan hukum. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan penurunan jumlah pelanggaran berulang serta meningkatnya kepatuhan terhadap perizinan spektrum dan sertifikasi perangkat.



Dengan demikian, kegiatan penertiban tidak hanya menjadi sarana pengendalian, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kehadiran negara dalam mengelola spektrum frekuensi dan perangkat telekomunikasi secara berkelanjutan, sejalan dengan strategi nasional RPJMN 2020–2024 dan Renstra Kementerian Kominfo 2020–2024.

f. Implementasi Budaya Nilai Berakhlak

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan etika pelayanan publik, UPT Balmon Pontianak secara konsisten mengintegrasikan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam pelaksanaan kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi. Implementasi nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai aspek kegiatan, baik secara teknis operasional maupun dalam interaksi dengan masyarakat.

- **Berorientasi Pelayanan:** Penertiban dilakukan tidak hanya sebagai tindakan represif, tetapi juga mengedepankan edukasi kepada masyarakat. Setiap petugas dibekali pemahaman untuk menyampaikan informasi perizinan secara jelas dan ramah, terutama kepada pengguna yang tidak menyadari bahwa perangkat atau frekuensi yang digunakan melanggar aturan.
- **Akuntabel:** Seluruh proses penertiban didokumentasikan dan dilaporkan secara transparan melalui sistem pelaporan elektronik (e-Monitoring dan e-Laporan) yang dapat ditelusuri jejaknya, baik oleh internal maupun oleh instansi pengawas. Langkah ini memastikan bahwa setiap tindakan didasarkan pada data dan prosedur yang sah.
- **Kompeten:** Petugas yang terlibat dalam kegiatan penertiban adalah SDM yang telah memiliki sertifikasi teknis serta pemahaman regulasi yang memadai. Selain itu, pelatihan internal dilakukan secara rutin guna meningkatkan kemampuan teknis dan etika profesionalisme petugas di lapangan.
- **Harmonis:** Dalam menghadapi pelanggar, pendekatan persuasif dan humanis selalu dikedepankan. Petugas menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta menghindari konflik terbuka dengan tetap menjunjung tinggi prinsip penghormatan dan kesopanan dalam bertindak.
- **Loyal:** Seluruh jajaran UPT Balmon Pontianak menunjukkan loyalitas terhadap tugas negara dalam menjaga keteraturan spektrum frekuensi. Setiap kegiatan penertiban dijalankan berdasarkan kepentingan publik dan kebijakan nasional tanpa adanya intervensi kepentingan pribadi atau kelompok.
- **Adaptif:** Tim penertiban terus menyesuaikan metode kerja dengan perkembangan teknologi, termasuk penggunaan alat monitoring portable, drone, serta aplikasi digital untuk efektivitas pelacakan dan pelaporan. Penyesuaian strategi juga dilakukan dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat pengguna perangkat ilegal.
- **Kolaboratif:** Penertiban dilakukan melalui kerja sama lintas sektor, baik dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, komunitas pengguna radio, maupun instansi teknis lainnya. Sinergi ini menjadi kunci dalam



memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan efektivitas penindakan.

Implementasi nilai-nilai BerAKHLAK tidak hanya memperkuat integritas dan profesionalisme pelaksana penertiban, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Balmon Pontianak sebagai garda terdepan dalam pengawasan spektrum frekuensi radio di wilayah Kalimantan Barat.

g. Efisiensi

Kegiatan penertiban yang dilaksanakan oleh UPT Balmon Pontianak selama tahun 2024 mengedepankan prinsip efisiensi dari berbagai aspek, mulai dari metode pelaksanaan, penggunaan anggaran, optimalisasi waktu, efektivitas tenaga SDM, hingga capaian kinerja yang dapat disejajarkan secara kompetitif di tingkat nasional.

Metode dan Aplikasi yang Digunakan

Untuk meningkatkan efektivitas tanpa membebani anggaran, kegiatan penertiban dilakukan dengan pendekatan *data-driven* dan *mobile monitoring*, memanfaatkan:

- Aplikasi pelaporan online dari Direktorat Pengendalian SDPPI, sehingga proses dokumentasi dan pelaporan menjadi lebih ringkas dan efisien.

Penggunaan perangkat portable berbasis digital (Direction Finder dan Spectrum Analyzer mini) yang ringan, hemat energi, dan tidak memerlukan infrastruktur stasioner.

- Sistem informasi gangguan terintegrasi, yang memungkinkan pemetaan lokasi prioritas berbasis laporan masyarakat secara daring.

• Efisiensi Anggaran

Dengan memadukan kegiatan penertiban dengan agenda monitoring dan inspeksi lainnya, pengeluaran operasional dapat ditekan hingga 20–30% lebih rendah dibanding pelaksanaan secara terpisah. Selain itu, penggunaan kendaraan operasional bersama antar-kegiatan dan optimalisasi perjalanan dinas lintas kegiatan turut mengurangi beban biaya bahan bakar dan penginapan.

• Efisiensi Waktu dan SDM

Kegiatan penertiban dilakukan secara terjadwal dan terintegrasi dengan data gangguan yang masuk sebelumnya, sehingga waktu pelaksanaan di lapangan lebih fokus dan terarah. Jumlah personel yang diterjunkan dalam satu kegiatan ditentukan berdasarkan peta kebutuhan dan risiko di lokasi sasaran. Dengan komposisi tim kecil namun terlatih, efisiensi tenaga kerja tetap dijaga tanpa mengurangi kualitas hasil penertiban.



5. IK-5 Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Indikator Kinerja Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur memiliki target realisasi sebesar 95%. Berdasarkan data capaian diketahui bahwa nilai dari realisasi sampai akhir Desember 2024 sebesar 100%, sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Tabel 27 Capaian Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio

No	Kinerja (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Percentase (5)*
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	95%	100%	118.81%

Capaian indikator kinerja berdasarkan dengan RPJMN 2020 – 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 28 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-5) 2020-2024

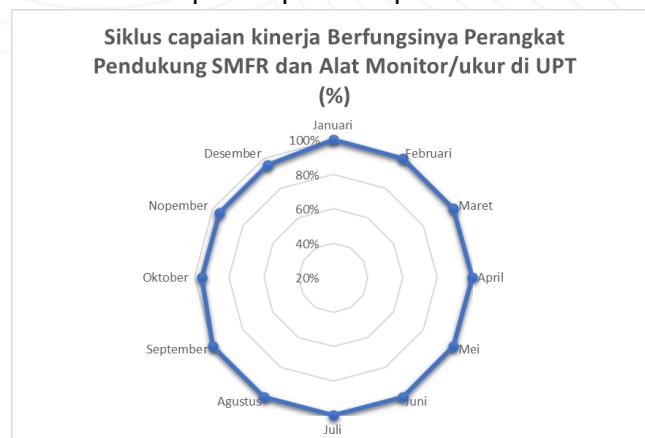
Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	96.09%	85%	96.13%	95%	95.2%	95%	100%	95%	100%





Gambar 20 Foto kegiatan pemeliharaan perangkat SMFR tetap,bergerak dan jinjing

Capaian kinerja berfungsinya perangkat sistem monitoring frekuensi radio di tahun 2024 yang terdiri dari Perangkat Utama dan Perangkat pendukung, berdasarkan dari laporan *Service Level Agreement* mencapai 100% . Terdapat 3 site SMFR Transportable yang telah di lakukan reinstall baik dari sisi jaringan data dan jaringan Listrik untuk tetap menjaga performa kinerja dari perangkat yang telah 10 tahun tanpa henti beroperasi memonitor spektrum frekuensi radio. Terdapat 2 site SMFR Transportable yang telah di lakukan perbaikan berat pada perangkat utama/receiver dikarenakan terjadi kerusakan pada komponen - komponen perangkat utama/receiver. Hasil dari perbaikan perangkat utama pada 2 site SMFR Transportable terdapat 1 site yang terjadi perubahan aplikasi monitoring dan belum bisa di manfaatkan hasil rekamannya di karenakan tidak terdaftarnya aplikasi tersebut pada aplikasi laporan hasil monitoring (ROL).



Gambar 21 Siklus Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT sepanjang Tahun 2024



Diharapkan dengan ketersediaan alat dukung monitoring dan ukur tersebut dapat menunjang kegiatan tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak kedepan.

Tabel 29 Jumlah Perangkat Monitoring / Ukur Utama dan Pendukung

No	Bulan	Perangkat Utama siap pakai	Perangkat Pendukung siap pakai	% Siap Pakai	% Difungsikan
1	Januari	20	178	100	100
2	Februari	20	178	100	100
3	Maret	20	178	100	100
4	April	20	178	100	100
5	Mei	20	178	100	100
6	Juni	20	178	100	100
7	Juli	20	178	100	100
8	Agustus	20	178	100	100
9	September	20	178	100	100
10	Oktober	20	178	100	100
11	Nopember	20	178	100	100
12	Desember	20	178	100	100

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa capaian untuk indikator "Persentase (%) capaian kinerja berfungsinya perangkat sistem monitoring frekuensi radio di tahun 2024 yang terdiri dari Perangkat Utama dan Perangkat pendukung, dan dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai 100 % dari target (95%) di Tahun 2024.



6. IK-6 Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT

a. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Perkembangan teknologi komunikasi radio telah mengalami kemajuan pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan komunikasi yang efisien dan andal. Dalam dunia komunikasi radio, amatir radio memiliki peran penting sebagai salah satu bentuk komunikasi alternatif yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk komunikasi darurat dan kebencanaan. Oleh karena itu, pengelolaan spektrum frekuensi radio amatir harus dilakukan dengan baik agar tidak menimbulkan gangguan serta tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis **Computer Assisted Test (CAT)** merupakan salah satu langkah strategis yang diterapkan oleh pemerintah dalam memastikan bahwa setiap calon amatir radio memiliki kompetensi yang memadai. UNAR berbasis CAT mengacu pada **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018** tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk. Melalui sistem ini, ujian dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan efisien dengan menggunakan teknologi komputer.

Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik, UNAR berbasis CAT dilaksanakan secara **Reguler** maupun **Non-Reguler**. UNAR Reguler diadakan setiap bulan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak, sedangkan UNAR Non-Reguler diselenggarakan untuk menjangkau lebih banyak peserta di berbagai wilayah.

Dengan adanya sistem UNAR berbasis CAT, diharapkan bahwa proses **Izin Amatir Radio (IAR)** dapat berjalan dengan lebih efektif dan profesional serta membantu menciptakan ekosistem komunikasi yang tertib dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

b. Sasaran Kegiatan

Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis Computer Assisted Test (CAT) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam memahami regulasi, teknik komunikasi radio, serta etika penggunaan spektrum frekuensi. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran kegiatan sebagai berikut:

- Meningkatkan Jumlah Peserta UNAR
- Meningkatkan Jumlah Peserta Terverifikasi
- Meningkatkan Jumlah Kelulusan Peserta UNAR
- Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas Ujian
- Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Regulasi Frekuensi Radio
 - Dengan meningkatnya jumlah peserta yang lulus, diharapkan pemanfaatan frekuensi radio menjadi lebih tertib dan sesuai aturan.
 - Dampaknya, pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi amatir dapat diminimalisir.



c. Capaian Target

Target indikator kinerja ini adalah 100%. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan hasil kegiatan dalam rangka capaian indikator kinerja ini:

Tabel 30 Capaian Pelaksanaan UNAR berbasis CAT

No	Kinerja (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	6. Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%	193%	193%

Capaian indikator kinerja berdasarkan dengan RPJMN 2020 – 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 31 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-6) 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target (1)	Capaian (2)	Target (3)	Capaian (4)	Target (5)	Capaian (6)	Target (7)	Capaian (8)	Target (9)	Capaian (10)
1	Percentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%	100%	100%	520%	100%	480%	100%	197.5%	100%	193%

Data detil capaian kegiatan dari pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 32 Daftar Capaian Jumlah Peserta

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Pelaksanaan Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	12	12	100%
	Jumlah Peserta UNAR Mendaftar	46	92	200%
	Jumlah peserta Terverifikasi UNAR		89	193%
	Jumlah Peserta LuLus		74	160,87%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

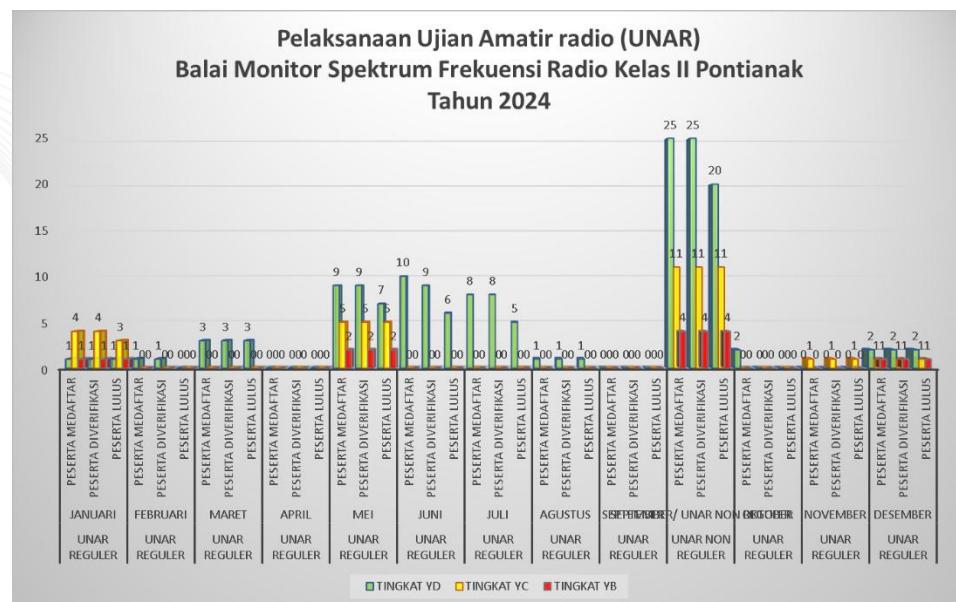


Tabel 33 Pelaksanaan UNAR berbasis CAT Tahun 2024

Kegiatan	Bulan	Status Peserta	Tingkat			
			YD	YC	YB	
UNAR REGULER	Januari	Peserta Mendaftar	1	4	1	
		Peserta Diverifikasi	1	4	1	
		Peserta Lulus	1	3	1	
UNAR REGULER	Februari	Peserta Mendaftar	1	0	0	
		Peserta Diverifikasi	1	0	0	
		Peserta Lulus	0	0	0	
UNAR REGULER	Maret	Peserta Mendaftar	3	0	0	
		Peserta Diverifikasi	3	0	0	
		Peserta Lulus	3	0	0	
UNAR REGULER	April	Peserta Mendaftar	0	0	0	
		Peserta Diverifikasi	0	0	0	
		Peserta Lulus	0	0	0	
UNAR REGULER	Mei	Peserta Mendaftar	9	5	2	
		Peserta Diverifikasi	9	5	2	
		Peserta Lulus	7	5	2	
UNAR REGULER	Juni	Peserta Mendaftar	10	0	0	
		Peserta Diverifikasi	10	0	0	
		Peserta Lulus	6	0	0	
UNAR REGULER	Juli	Peserta Mendaftar	8	0	0	
		Peserta Diverifikasi	8	0	0	
		Peserta Lulus	5	0	0	
UNAR REGULER	Agustus	Peserta Mendaftar	1	0	0	
		Peserta Diverifikasi	1	0	0	
		Peserta Lulus	1	0	0	
UNAR REGULER	September	Peserta Mendaftar	0	0	0	
		Peserta Diverifikasi	0	0	0	
		Peserta Lulus	0	0	0	
UNAR NON REGULER	September	Peserta Mendaftar	25	11	4	
		Peserta Diverifikasi	25	11	4	
		Peserta Lulus	20	11	4	
UNAR REGULER	Oktober	Peserta Mendaftar	2	0	0	
		Peserta Diverifikasi	0	0	0	
		Peserta Lulus	0	0	0	
UNAR REGULER	November	Peserta Mendaftar	0	1	0	
		Peserta Diverifikasi	0	1	0	
		Peserta Lulus	0	1	0	
UNAR REGULER	Desember	Peserta Mendaftar	2	1	1	
		Peserta Diverifikasi	2	1	1	
		Peserta Lulus	2	1	1	
Total Pendaftar			62	22	8	
Total Terverifikasi			59	22	8	
Total Lulus			45	21	8	



Berdasarkan penjelasan tabel diatas diketahui bahwa sepanjang 2024, Indikator "Pelaksanaan UNAR berbasis CAT dengan target jumlah 46 peserta dan terverifikasi sebanyak 89 peserta" telah tercapai sesuai program kerja tahun anggaran 2024, sehingga dapat disimpulkan hasil capaian meningkat sebesar 193 %.



Gambar 22 Grafik Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio CAT Tahun 2024

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Telah dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Balmon Pontianak dan Balmon Lampung. Balmon Pontianak dan Balmon Lampung merupakan UPT Balmon Kelas II, masing-masing memiliki jumlah kab/kota yang hampir sama, yaitu Jumlah Kab/Kota di wilayah kerja Balmon Pontianak adalah 14 Kab/Kota dan Balmon Lampung adalah 15 Kab/Kota. Walaupun Balmon Lampung memiliki jumlah Kab/Kota lebih banyak 1 Kab/Kota dari Balmon Pontianak, namun keduanya mencapai target perjanjian kinerja.

Adapun dari benchmark ini digunakan untuk upaya dalam peningkatan kualitas dan akan menjadi perbaikan untuk mencapai pencapaian kinerja di tahun yang akan datang.

Tabel 34 Benchmark Capaian Kinerja (IK-6) dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen SDPPI	Target %	Capaian %	Keterangan
Percentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	Balmon Pontianak	100	193	Percentase Capaian Balmon Pontianak lebih tinggi dibanding Balmon Lampung
	Balmon Lampung	100	102.7	



d. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Dalam pelaksanaannya, UNAR berbasis CAT menghadirkan berbagai inovasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses ujian, di antaranya:

1. Penggunaan Sistem Computer Assisted Test (CAT)
 - a. Memastikan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penilaian ujian.
 - b. Mengurangi potensi kecurangan atau penyimpangan dalam proses evaluasi.
2. Pelaksanaan UNAR Non-Reguler
 - a. Memperluas akses bagi calon amatir radio yang berada di luar lokasi penyelenggaraan UNAR Reguler.
 - b. Menjangkau lebih banyak peserta, seperti yang telah berhasil dilakukan contoh UNAR Non Reguler di Kota Singkawang.
3. Digitalisasi Proses Pendaftaran dan Verifikasi
 - a. Memungkinkan calon peserta untuk mendaftar secara online.
 - b. Meminimalisir hambatan administratif dan mempercepat proses persiapan ujian.
4. Pemantauan dan Evaluasi Berbasis Data
 - a. Menggunakan data untuk menganalisis tingkat kelulusan dan efektivitas program UNAR.
 - b. Membantu dalam perencanaan dan peningkatan kualitas ujian di masa mendatang.

Dengan berbagai inovasi tersebut, UNAR berbasis CAT tidak hanya menjadi alat uji kompetensi tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab dalam komunitas amatir radio di Indonesia.

e. Tindak Lanjut

Sebagai bentuk pelayanan publik yang mendukung legalitas penggunaan spektrum frekuensi radio oleh masyarakat, khususnya kalangan amatir radio, pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis CAT oleh UPT Balmon Pontianak terus ditingkatkan tidak hanya dari sisi kuantitas peserta, tetapi juga kualitas penyelenggaraan dan pemenuhan standar pelayanan.

Dampak

Dari aspek peningkatan kualitas SDM, kegiatan UNAR berbasis CAT memberikan kemudahan dan keadilan bagi masyarakat yang ingin memperoleh Izin Amatir Radio (IAR), baik pada tingkat Siaga, Penggalang, maupun Penegak. Metode CAT menjamin bahwa hasil ujian lebih objektif, cepat, dan efisien, sekaligus mendorong peserta untuk memahami regulasi, etika berkomunikasi, serta teknis dasar komunikasi radio. Hal ini berdampak pada terciptanya sumber daya manusia amatir radio yang berpengetahuan, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio.

Dari sisi tata kelola pelayanan publik, penggunaan sistem CAT memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan UNAR. Proses



ujian yang berbasis sistem digital meminimalkan potensi manipulasi hasil dan memastikan bahwa semua peserta mendapat perlakuan yang adil. Selain itu, sistem ini mampu memberikan hasil ujian secara langsung, sehingga mempercepat proses penerbitan IAR dan memudahkan monitoring data keikutsertaan dan kelulusan secara nasional.

Dari perspektif pengelolaan spektrum frekuensi, kegiatan ini berdampak pada terciptanya tertib administrasi dan pengendalian penggunaan frekuensi amatir yang sah. Peserta yang lulus UNAR akan mendapatkan IAR yang terdaftar resmi, sehingga penggunaan frekuensi dalam band amatir dapat diawasi dan dikendalikan dengan baik. Ini turut mendukung program nasional dalam menertibkan penggunaan spektrum secara legal dan efisien.

f. Implementasi Budaya Nilai Berakhlik

- **Berorientasi Pelayanan:** Memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi peserta ujian.
- **Akuntabel:** Menjamin transparansi dalam setiap tahapan ujian.
- **Kompeten:** Menghasilkan amatir radio yang benar-benar memahami aspek teknis dan regulasi.
- **Harmonis:** Mendorong peserta untuk menjunjung tinggi etika komunikasi radio.
- **Loyal:** Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan aturan yang berlaku.
- **Adaptif:** Menyesuaikan sistem ujian dengan perkembangan teknologi komunikasi.
- **Kolaboratif:** Melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan komunitas amatir radio (ORARI).

g. Efisiensi

Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis CAT oleh UPT Balmon Pontianak selama tahun 2024 dilakukan dengan prinsip efisiensi secara menyeluruh, baik dari sisi perencanaan, penggunaan sumber daya, hingga capaian output kegiatan. Efisiensi ini tercermin dalam beberapa aspek berikut:

1. Optimalisasi Sistem Digital (CAT)

Pemanfaatan sistem Computer Assisted Test (CAT) secara penuh telah menghilangkan kebutuhan akan soal ujian cetak, lembar jawaban, dan pengoreksian manual. Hal ini secara langsung menekan biaya operasional kegiatan, mempercepat proses pengolahan hasil ujian, dan mengurangi potensi kesalahan administratif.

2. Efisiensi Anggaran

Dengan sistem CAT, hanya diperlukan penyediaan perangkat komputer dan koneksi internet stabil, tanpa perlu mencetak dokumen, menyewa tempat besar, atau menyiapkan personel pengawas dalam jumlah besar. Pelaksanaan UNAR bisa dilakukan di kantor UPT Balmon sendiri atau bekerja sama dengan mitra lokal (seperti SMK atau lembaga pelatihan), yang menghemat biaya penyelenggaran hingga 30–40% dibanding metode konvensional.



3. Pemanfaatan SDM Secara Terukur

Pelaksanaan UNAR dilakukan oleh tim kecil dengan pembagian tugas yang jelas dan dukungan sistem otomatis. Petugas cukup memonitor pelaksanaan ujian dan memastikan keamanan teknis sistem, tanpa harus melakukan koreksi hasil ujian atau validasi manual, sehingga efisiensi tenaga kerja dapat dicapai secara signifikan.

4. Efisiensi Waktu dan Pelayanan

Proses pendaftaran, verifikasi, pelaksanaan ujian, hingga pengumuman hasil dilakukan dalam satu hari yang sama. Hal ini meningkatkan efisiensi waktu, baik bagi peserta maupun petugas. Peserta tidak perlu datang berulang kali, dan hasil ujian dapat langsung diakses, sehingga mempercepat proses penerbitan IAR (Izin Amatir Radio).



7. IK-7 Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Kegiatan Penanganan Penagihan Piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio bertujuan untuk meningkatkan pengurangan wababerpiutang BHP Frekuensi Radio, pembaharuan data terkini terkait waba/client yang sudah melakukan pelunasan piutang BHP Frekuensi Radio dan sebagai tahapan lanjutan penagihan piutang yang berdampak pada berkurangnya beban piutang Negara di bidang Frekuensi Radio.

b. Sasaran Kegiatan

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat permintaan pendampingan oleh pihak KPKNL Singkawang maupun KPKNL Pontianak. Namun Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak tetap berupaya melakukan koordinasi ke KPKNL guna pendataan terhadap piutang negara yang sudah dilimpahkan ke KPKNL, termasuk sewaktu-waktu dapat melakukan pendampingan terhadap penagihan piutang BHP frekuensi radio jika diminta.

c. Capaian Target



Gambar 23 Foto Kegiatan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL

Indikator Kinerja Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL memiliki target laporan sebanyak 3 kegiatan dalam tahun 2024. Dengan capaian Indikator hingga akhir Desember 2024 sebanyak 3 laporan atau 3 kali kegiatan. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.



Tabel 35 Capaian Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL

No	Kinerja (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Percentase (5)*
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	7. Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%	100	100%

Capaian indikator kinerja berdasarkan dengan RPJMN 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 36 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-7) 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024			
		Target (1)	Capaian (2)	Target (3)	Capaian (4)	Target (5)	Capaian (6)	Target (7)	Capaian (8)	Target (9)	Capaian (10)	Target (11)	Capaian (12)
1	Percentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel 37 Kegiatan Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL

No	Kegiatan	Target	Hasil	
			Penanganan UPT	Penanganan KPKNL
1	Penanganan Pencegahan Piutang SPP BHP Frekuensi Radio di Kota Singkawang	Tidak Ada Pelimpahan Piutang	Jumlah SPP BHP/ ST1/2/3/T yang terbit dan Jumlah Upaya yang dilakukan berbanding lurus dengan jumlah upaya yang dilakukan.	Update informasi secara berkala jika ada WaBa yang memiliki Piutang SPP BHP diatas Rp. 8.000.000,.
2	Penanganan Pencegahan Piutang SPP BHP Frekuensi Radio di Kab. Sanggau	Tidak Ada Pelimpahan Piutang	Jumlah SPP BHP/ ST1/2/3/T yang terbit dan Jumlah Upaya yang dilakukan berbanding lurus dengan jumlah upaya yang dilakukan.	Update informasi secara berkala jika ada WaBa yang memiliki Piutang SPP BHP diatas Rp. 8.000.000,.



No	Kegiatan	Target	Hasil	
			Penanganan UPT	Penanganan KPKNL
1	Penanganan Pencegahan Piutang SPP BHP Frekuensi Radio di Kota Singkawang	Tidak Ada Pelimpahan Piutang	Jumlah SPP BHP/ ST1/2/3/T yang terbit dan Jumlah Upaya yang dilakukan berbanding lurus dengan jumlah upaya yang dilakukan.	Update informasi secara berkala jika ada WaBa yang memiliki Piutang SPP BHP diatas Rp. 8.000.000,.
3	Penanganan Pencegahan Piutang SPP BHP Frekuensi Radio di Kota Pontianak	Tidak Ada Pelimpahan Piutang	Jumlah SPP BHP/ ST1/2/3/T yang terbit dan Jumlah Upaya yang dilakukan berbanding lurus dengan jumlah upaya yang dilakukan.	Update informasi secara berkala jika ada WaBa yang memiliki Piutang SPP BHP diatas Rp. 8.000.000,.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2024, indikator kinerja "Persentase Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL telah dilaporkan sebanyak 3 laporan, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 100%.

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Telah dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Balmon Pontianak dan Balmon Lampung. Balmon Pontianak dan Balmon Lampung merupakan UPT Balmon Kelas II, masing-masing memiliki jumlah kab/kota yang hampir sama, yaitu Jumlah Kab/Kota di wilayah kerja Balmon Pontianak adalah 14 Kab/Kota dan Balmon Lampung adalah 15 Kab/Kota. Walaupun Balmon Lampung memiliki jumlah Kab/Kota lebih banyak 1 Kab/Kota dari Balmon Pontianak, namun keduanya mencapai target perjanjian kinerja.

Adapun dari benchmark ini digunakan untuk upaya dalam peningkatan kualitas dan akan menjadi perbaikan untuk mencapai pencapaian kinerja di tahun yang akan datang.

Tabel 38 Benchmark Capaian Kinerja (IK-7) dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen SDPPI	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	Balmon Pontianak	100	100	Persentase Capaian Balmon Pontianak dan Balmon Lampung adalah 100%
	Balmon Lampung	100	100	

d. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Pada Tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak melakukan sejumlah inovasi dalam pengelolaan piutang BHP Frekuensi Radio, diantaranya adalah Penerapan strategi pencegahan piutang yang mengutamakan tindakan administratif seperti penerbitan SPP BHP dan pemberitahuan bertahap (ST-1,



ST-2, ST-3, dan ST-T) secara berkelanjutan sebelum piutang menunggak. Pemutakhiran data secara berkala untuk memantau WaBa (Wajib Bayar) dengan piutang potensial, terutama di atas ambang batas Rp8.000.000,-. Koordinasi aktif ke KPKNL tanpa menunggu permintaan resmi, sebagai bentuk inovasi kolaboratif untuk menjaga akurasi dan kesiapan data piutang negara. Inovasi ini menunjukkan komitmen dalam menciptakan sistem pengelolaan piutang yang preventif, terstruktur, dan siap ditindaklanjuti kapanpun diperlukan. Target indikator kinerja berupa tiga laporan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan telah dicapai sepenuhnya (100%). Keberhasilan ini mencakup Pelaksanaan kegiatan penanganan piutang di tiga wilayah kerja (Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak), dengan seluruhnya menunjukkan hubungan yang konsisten antara jumlah tagihan dan upaya penagihan. Konsistensi penerapan sistem pelaporan dan dokumentasi kegiatan, yang mencerminkan tata kelola kerja yang baik dan sesuai ketentuan. Meningkatnya kesadaran internal terhadap pentingnya *early detection* dan *early action* terhadap piutang yang berpotensi menunggak. Keberhasilan ini menegaskan bahwa unit kerja telah menjalankan tugas pengawasan piutang secara aktif dan bertanggung jawab.

e. Tindak Lanjut

Sebagai langkah lanjutan dari pencapaian dan hasil evaluasi tahun berjalan, tindak lanjut yang direncanakan berupa, Penguatan sistem monitoring internal berbasis data *real-time* guna mendeteksi lebih awal kemungkinan piutang bermasalah. Penyusunan pedoman internal tentang pelimpahan piutang, agar dapat dilaksanakan secara lebih sistematis bila diperlukan pelimpahan resmi ke KPKNL. Peningkatan koordinasi teknis dengan KPKNL melalui jadwal tetap, baik untuk pemutakhiran data maupun simulasi pelimpahan. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin tentang proses penanganan piutang dan prosedur pelimpahan, termasuk integrasi aplikasi keuangan negara.

Dampak

Secara umum, penanganan piutang negara berkaitan dengan kewajiban pembayaran dari pihak ketiga (pengguna frekuensi atau perangkat telekomunikasi) yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap negara atas penggunaan sumber daya frekuensi maupun layanan lainnya. Proses ini mencakup identifikasi piutang, penagihan aktif, pengiriman surat peringatan, serta apabila diperlukan, pelimpahan penanganannya ke KPKNL untuk langkah penyelesaian selanjutnya, termasuk penagihan paksa atau lelang.

Dampak utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya kepatuhan para pengguna spektrum frekuensi radio terhadap kewajiban finansial mereka, sekaligus memberikan sinyal kuat bahwa negara memiliki mekanisme tegas namun terukur dalam mengelola piutang yang timbul dari pelayanan publik. Proses pelimpahan ke KPKNL menunjukkan adanya sinergi antarlembaga negara dalam menegakkan kewajiban publik terhadap keuangan negara.

Selain itu, dari aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan, kegiatan ini memastikan bahwa potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tetap dapat ditindaklanjuti dan tidak dibiarkan menjadi piutang tak tertagih. Melalui pelimpahan ke KPKNL, proses pencatatan dan penyelesaian piutang menjadi lebih transparan, tertelusur, dan sesuai mekanisme pembendaharaan negara. Ini sangat penting dalam mendukung opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan pemerintah pusat maupun kementerian/lembaga.



f. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Budaya kerja BerAKHLAK yang menjadi *core values* ASN ini dapat dikatakan telah diimplementasikan dalam berbagai aspek kegiatan ini:

- **Berorientasi Pelayanan:** UPT Pontianak aktif menyampaikan pemberitahuan dan melakukan pencegahan dini terhadap piutang.
- **Akuntabel:** Pelaporan kegiatan dilakukan secara tepat waktu dan sesuai target indikator, lengkap dengan dokumentasi.
- **Kompeten:** Pegawai menunjukkan kemampuan dalam memahami mekanisme piutang dan regulasi yang berlaku.
- **Harmonis:** Terus menjalin hubungan yang baik dengan KPKNL dan *stakeholder* lain terkait meskipun belum ada pelimpahan formal.
- **Loyal:** Pelaksanaan tugas dilakukan secara konsisten dengan arahan dan tanggung jawab sebagai bentuk pengabdian kepada negara.
- **Adaptif:** Cepat menyesuaikan pendekatan terhadap karakteristik piutang dan perilaku WaBa di lapangan.
- **Kolaboratif:** Kegiatan penanganan piutang dilaksanakan dengan koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan berbasis data bersama.

g. Efisiensi

Kegiatan penanganan piutang tahun 2024 dilaksanakan dengan prinsip efisiensi yang tinggi, tanpa tambahan anggaran khusus, namun dengan hasil pelaporan maksimal dan terdokumentasi. Penggunaan sumber daya internal dan sistem pelaporan yang telah ada untuk menjalankan tugas secara optimal. Tidak adanya pelimpahan bukan karena kegagalan, tetapi sebagai hasil dari efektivitas upaya pencegahan, yang pada akhirnya menekan potensi beban negara dan proses hukum.



8. IK-8 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat

a. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Kegiatan sosialisasi pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat dilaksanakan sebagai bentuk respons terhadap tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan kualitas pelayanan publik, serta amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pelayanan publik, mengumpulkan masukan dan aspirasi, mendorong partisipasi masyarakat, dan mengevaluasi kinerja pelayanan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat.

b. Sasaran Kegiatan

Target jenis peserta sosialisasi pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat terdiri atas:

- Instansi Pemerintah, mencakup Diskominfo Wilayah Kalimantan Barat
- Operator Seluler Wilayah Kalimantan Barat
- Penyelenggara Siaran TV dan Radio FM
- Penyelenggara Internet Service Provider
- Toko Elektronik, Aksesoris, Komputer, CCTV dan Handphone

Penggunaan Spektrum Frekuensi, memastikan bahwa peserta sosialisasi dan responden survei kepuasan masyarakat memahami tujuan dilaksanakannya sosialisasi agar penggunaan frekuensi sesuai peruntukannya dan tidak melakukan interferensi dengan layanan lain. Pengguna frekuensi radio wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku, termasuk peraturan tentang perizinan, penggunaan frekuensi, penggunaan perangkat telekomunikasi yang telah tersertifikasi, dan standar teknis.

c. Capaian Target

Indikator Kinerja sosialisasi pelayanan publik dan survei kepuasan Masyarakat diperoleh dari 2 sub indikator, yaitu persentase hasil survei kepuasan Masyarakat ditambah persentase peserta sosialisasi. Survei kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan terdiri dari 2 jenis survei yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP). Target capaian nilai survei di tahun 2024 adalah di atas 3.2 (skala 4) untuk nilai IKM, dan di atas 3.6 (skala 4) untuk nilai IIPP.

Sedangkan sub indikator lain dalam penilaian adalah persentase peserta sosialisasi, dengan target jumlah peserta minimal 30 orang, dan target Kab./Kota peserta sosialisasi adalah sebesar 50% dari total Kab./Kota, dimana target untuk Balmon Pontianak adalah mencakup peserta sosialisasi dari minimal 7 Kab./Kota di wilayah Kalimantan Barat.

Sepanjang tahun 2024, Balmon Pontianak telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pelayanan publik dan survei kepuasan Masyarakat di wilayah Kalimantan Barat dengan capaian sebesar 100% sebagaimana terlampir pada tabel berikut:



Tabel 39 Capaian Persentase % Sosialisasi Pelayanan Publik Dan Survei Kepuasan Masyarakat

No	Kinerja (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	8. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100	100%

Hasil capaian kegiatan tersebut dapat dilihat lebih detil pada tabel berikut:

Tabel 40 hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik Dan Survei Kepuasan Masyarakat

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	<p>% Capaian = Hasil Survey Kepuasan Masyarakat + Peserta Sosialisasi</p> <p>a. Survey Kepuasan Masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) • Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) <p>b. Peserta Sosialisasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Peserta Sosialisasi • Kab/Kota Peserta Sosialisasi 	<p>100%</p> <p>> 3.2 > 3.6</p> <p>> 30 org > 7 Kab.</p>	<p>100%</p> <p>3.74 3.72</p> <p>157 org 13 Kab.</p>	100%

Balmon Pontianak telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pada tanggal 7 Mei 2024 tentang Pengenaan Denda Sanksi Administratif Pelanggaran Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi, dengan tema “Harmoni di Udara; Membangun Kesadaran dan Kepatuhan dalam Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi”, yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Jumlah peserta yang hadir adalah sebanyak 157 orang yang berasal dari 13 Kab/Kota di wilayah Kalimantan Barat. Berdasarkan target jumlah peserta dan Kab/Kota peserta sosialisasi, maka sub indikator untuk peserta sosialisasi telah tercapai dimana jumlah minimal peserta adalah 30 orang yang terdiri dari minimal 50% dari total Kab/Kota. Rincian jumlah peserta dan Kab/Kota peserta sosialisasi selama pelaksanaan tahun 2024 seperti terlampir pada tabel berikut:



Tabel 41 Capaian Sosialisasi Pelayanan Publik

SMT	Target Wilayah Sosialisasi		Jumlah Kehadiran		Percentase Capaian (%) (merefer ke PK)	Nilai Sosialisasi (Merefer ke PK)
	Kabupaten /Kota	50% Wilayah	Peserta (min 30 psrt)	Wilayah (Kab/Kota)		
1	14	7	157	13	100%	100%
2			-	-	-	
Jumlah		7	157	13	100%	

Nilai hasil survei kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Balmon Pontianak pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut, dimana selama semester pertama (bulan Januari – Juni 2024) dengan total responden sebanyak 41 orang, hasil nilai untuk survei IKM adalah sebesar 3.71 (skala 4) dan nilai untuk survei IIPP adalah sebesar 3.67 (skala 4), dengan persentase capaian sebesar 100%.

Sedangkan pada semester kedua dengan tambahan 7 orang responden yang mengisi survei kepuasan masyarakat, didapat nilai capaian akumulasi (bulan Januari sampai Desember 2024) untuk survei IKM adalah 3.74 (skala 4) dan survei IIPP adalah 3.72 (skala 4) sehingga capaian nilai Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Tabel 42 Capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

SMT	Waktu Pelaksanaan		Jumlah Responden (Minimal 30 Responden)				Hasil Survei		Nilai Capaian Survei (%) merefer ke PK
	Dari	Sampai	SFR	SOR	Mitra	Totai	IKM (skala 4)	IIPP (skala 4)	
1	Januari	Juni	30	11	-	41	3.71	3.67	100%
2	Juli	Desember	36	12	-	48	3.74	3.72	100%
Jumlah (akumulasi)			36	12	-	48	3.74	3.72	100%

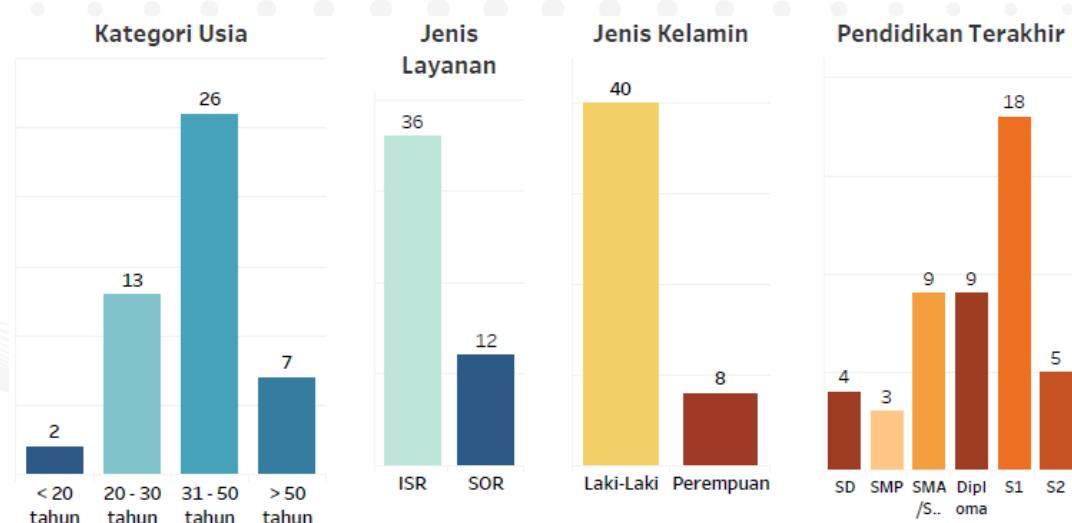
Data rincian responden survei kepuasan masyarakat seperti terlampir pada tabel berikut, dimana responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan jenis layanan yang diperoleh.



Tabel 43 Rincian Responden Survei Kepuasan Masyarakat

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	40	83 %
		PEREMPUAN	8	17 %
2	KATEGORI USIA	< 20 TAHUN	2	4.2 %
		20 – 30 TAHUN	13	27 %
		31 – 50 TAHUN	26	54.2 %
		> 50 TAHUN	7	14.6 %
3	PENDIDIKAN TERAKHIR	SD	4	8.3 %
		SMP	3	6.2 %
		SMA	9	18.8 %
		DIPLOMA	9	18.8 %
		STRATA-1 (S1)	18	37.5 %
		STRATA-2 (S2)	5	10.4 %
4	JENIS LAYANAN	IZIN STASIUN RADIO (ISR)	36	75 %
		SERTIFIKASI OPERATOR RADIO	12	25 %

Dapat dilihat bahwa responden terbanyak adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 40 orang atau 83% dari total responden. Berdasarkan kategori usia, responden terbanyak ada di kelompok usia 31 sampai 50 tahun yaitu sebanyak 26 orang atau 54.2% dari total responden. Pendidikan terakhir responden terbanyak adalah Strata-1 (S1) sebanyak 18 orang atau 37.5% dari total responden. Dan responden terbanyak adalah orang-orang yang memperoleh layanan terkait Izin Stasiun Radio (ISR) dengan persentase 75% atau sebanyak 36 orang dari total responden. Data rincian responden survei kepuasan Masyarakat dapat dilihat dalam bentuk grafik berikut ini:



Gambar 24 Grafik Rincian Responden Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai dari hasil survei IKM pada tahun 2024 dengan jumlah responden sebanyak 48 orang adalah sebesar 3.74 dalam skala 4 dengan mutu "A", dimana telah mencapai target capaian untuk nilai survei IKM adalah diatas 3.2. Dari beberapa kategori untuk penilaian survei IKM, Perilaku Pelaksana memiliki nilai indeks tertinggi yaitu sebesar 3.83, sedangkan kategori dengan nilai indeks terendah adalah Biaya/tarif dengan nilai indeks 3.56. Rincian nilai indeks setiap kategori pada survey IKM terlampir pada tabel berikut:

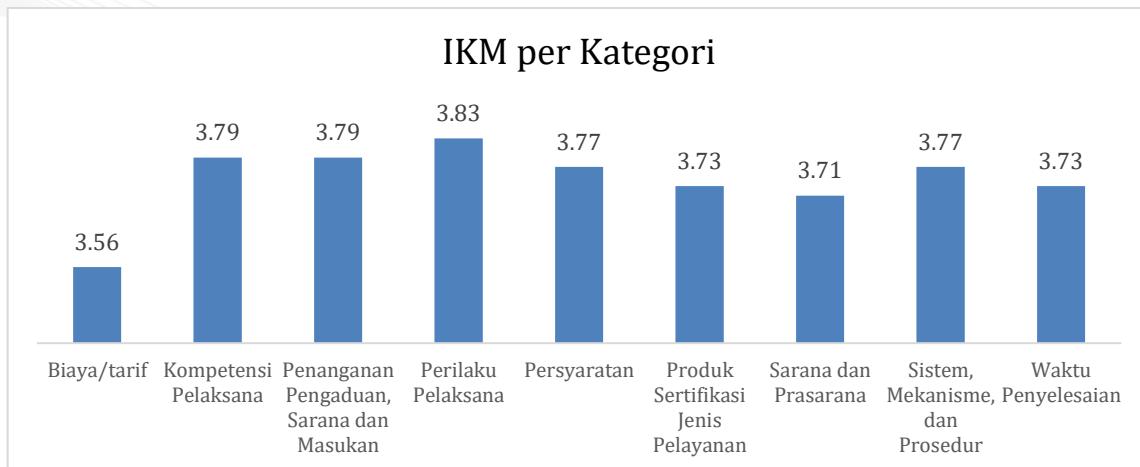
Tabel 44 Rincian Nilai Indeks per Kategori pada Survei IKM

NO	JENIS SURVEI	KATEGORI	INDEKS	NILAI SURVEI	
				NILAI (SKALA 4)	MUTU (ANGKA)
1	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	Biaya/tarif	3.56	3.74	A
		Kompetensi Pelaksana	3.79		
		Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	3.79		
		Perilaku Pelaksana	3.83		
		Persyaratan	3.77		
		Produk Sertifikasi Jenis Pelayanan	3.73		
		Sarana dan Prasarana	3.71		



		Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.77		
		Waktu Penyelesaian	3.73		

Data rincian pada tabel diatas dapat dilihat dalam bentuk grafik berikut ini:



Gambar 25 Grafik indeks kategori pada survei IKM

Sedangkan untuk nilai dari hasil survey IIPP pada tahun 2024 dengan jumlah responden sebanyak 48 orang adalah sebesar 3.72 dalam skala 4 dengan mutu "A", dimana telah mencapai target capaian untuk nilai survei IIPP adalah diatas 3.6. Dari beberapa kategori untuk penilaian survey IIPP, Pungutan Liar (Pungli) memiliki nilai indeks tertinggi yaitu sebesar 3.76, dan kategori dengan nilai indeks terendah adalah Diskriminasi Pelayanan dengan nilai indeks 3.60. Rincian nilai indeks setiap kategori pada survei IIPP terlampir pada tabel berikut:

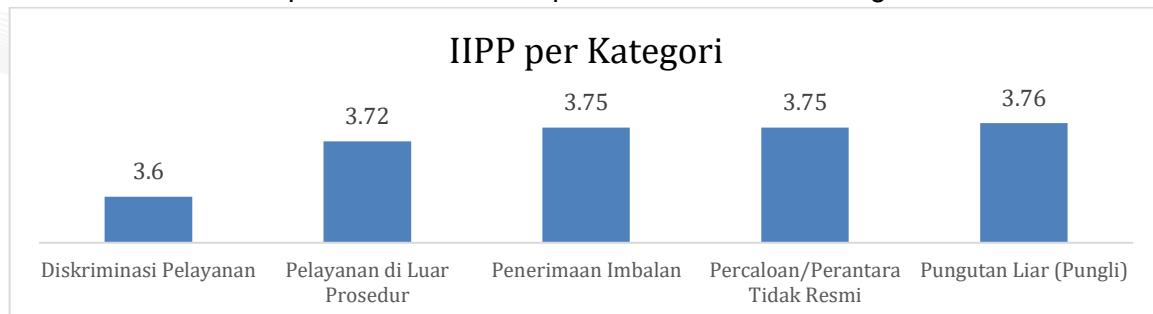
Tabel 45 Rincian Nilai Indeks per Kategori pada Survei IIPP

NO	JENIS SURVEI	KATEGORI	INDEKS	NILAI SURVEI	
				NILAI (SKALA 4)	MUTU (ANGKA)
2	INDEKS INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK (IIPP)	Diskriminasi Pelayanan	3.60	3.72	A
		Pelayanan di Luar Prosedur	3.72		
		Penerimaan Imbalan	3.75		



		Percaloan/Perantara Tidak Resmi	3.75		
		Pungutan Liar (Pungli)	3.76		

Data rincian pada tabel diatas dapat dilihat dalam bentuk grafik berikut ini:

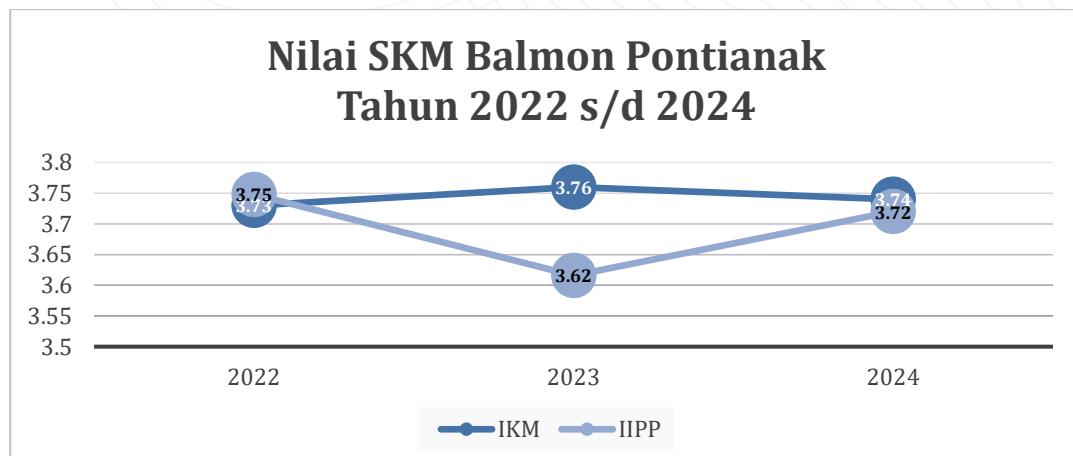


Gambar 26 Grafik indeks kategori pada survei IIPP

Hasil nilai survei kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Balmon Pontianak dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini dalam bentuk perbandingan nilai survei dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 46 perbandingan nilai survei kepuasan masyarakat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024

Jenis Survei Kepuasan Masyarakat	2022	2023	2024
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	3.73	3.76	3.74
INDEKS INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK (IIPP)	3.75	3.62	3.72



Gambar 27 Grafik perbandingan nilai survei IKM dan IIPP dari tahun 2022 sampai tahun 2024



Dari grafik di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kenaikan nilai pada survei IKM di tahun 2023 yaitu dari 3.73 menjadi 3.76 dan kemudian mengalami penurunan nilai di tahun 2024 dari 3.76 menjadi 3.74. Sedangkan untuk nilai survei IIPP di tahun 2023 mengalami penurunan nilai dari 3.75 menjadi 3.62, namun di tahun 2024 mengalami kenaikan nilai survei dari 3.62 menjadi 3.72.

Persentase capaian untuk sub indikator survei kepuasan masyarakat adalah 100%, dengan rincian nilai untuk survei IKM sebesar 3.74 (lebih dari target capaian yaitu 3.2) dan nilai untuk survei IIPP sebesar 3.72 (lebih dari target capaian yaitu 3.6).

Sehingga diperoleh persentase capaian untuk indikator kinerja sosialisasi pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Balmon Pontianak adalah sebesar 100%, dapat dilihat pada tabel berikut ini dalam bentuk perbandingan data antara target dan realisasi persentase capaian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 47 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-8) 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

d. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Inovasi dalam sosialisasi pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat mencakup pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi *mobile*, media sosial, *website* interaktif, serta video animasi dan infografis untuk menyajikan informasi secara menarik dan mudah dipahami.

Analisis keberhasilan mencakup beberapa aspek seperti dari segi partisipasi, jumlah peserta sosialisasi, tingkat pengisian survei, dan keterlibatan dalam sesi tanya jawab menunjukkan antusiasme dan minat masyarakat. Selanjutnya, peningkatan pemahaman masyarakat diukur melalui perubahan tingkat pengetahuan dan umpan balik positif. Dari sisi pelayanan publik, perubahan kebijakan, penurunan keluhan, dan peningkatan IKM dan IIPP menjadi indikator utama.

Ketidaktercapaian dapat disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat yang dipicu oleh minimnya kesadaran, keterbatasan akses, atau jadwal yang tidak sesuai, menjadi hambatan utama. Metode sosialisasi yang kurang efektif, seperti



penyampaian informasi yang sulit dipahami, metode yang monoton, atau kurangnya media yang sesuai, juga dapat mengurangi minat Masyarakat.

e. Tindak Lanjut

- Dimulai dengan analisis dan evaluasi mencakup evaluasi metode dan media, serta analisis data survei untuk memahami tren dan pola kepuasan. Kualitas sosialisasi ditingkatkan melalui pengembangan materi, peningkatan kompetensi petugas, dan pemanfaatan teknologi.

f. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target pada pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat menggunakan prinsip-prinsip BerAKHLAK sebagai berikut :

- Berorientasi Pelayanan:** dengan memahami kebutuhan masyarakat, mendengarkan masukan, dan memberikan pelayanan yang ramah serta solutif.
- Akuntabel:** dilakukan secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan.
- Kompeten:** melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
- Harmonis:** dengan menghargai perbedaan, menghindari diskriminasi, dan membangun kerja sama yang baik.
- Loyal:** memberikan layanan sesuai prinsip dan aturan yang berlaku serta menjaga nama baik khususnya Balon SFR Kelas II Pontianak.
- Adaptif:** dengan memanfaatkan teknologi dan mengembangkan metode inovatif.
- Kolaboratif:** dengan bekerja sama lintas sektor, membangun kemitraan dengan masyarakat, dan menerima masukan untuk perbaikan.

g. Efisiensi

Penggunaan aplikasi survei kepuasan Masyarakat yang telah disediakan oleh pusat. Aplikasi ini dibuat sebagai media pengisian survei yang dilakukan oleh masyarakat baik pengguna jenis layanan Izin Stasiun Radio (ISR) maupun Sertifikasi Operator Radio (SOR). Aplikasi ini dapat menampilkan hasil survei dalam bentuk nilai indeks untuk setiap kategori sesuai jenis survei, IKM dan IIPP, sehingga bisa diperoleh nilai hasil survei dalam bentuk angka (skala sampai 4). Capaian untuk indikator sosialisasi pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, dan dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai 100%.



9. IK-9 Persentase (%) Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC

a. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang memiliki peran strategis dalam dunia komunikasi, termasuk dalam sektor maritim. Pemanfaatan spektrum frekuensi radio di sektor ini sangat penting bagi para nelayan untuk memastikan keselamatan pelayaran, koordinasi operasional, serta komunikasi darurat di laut.

Maritim On The Spot mempunyai tujuan sebagai langkah strategis untuk mengatasi gangguan frekuensi radio yang berpotensi membahayakan penerbangan dan pelayaran. Dengan pendekatan ini, diharapkan nelayan dapat lebih memahami regulasi penggunaan spektrum frekuensi, sehingga keselamatan dan ketertiban komunikasi radio, baik di laut maupun udara, dapat terjaga dengan baik. Dan meningkatkan pemahaman nelayan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio maritim sehingga nelayan tidak menggunakan perangkat telekomunikasi yang salah dan tidak menggunakan spektrum frekuensi radio di luar peruntukannya.

b. Sasaran Kegiatan

Dengan adanya Bimbingan Teknis ini, diharapkan nelayan lebih memahami regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio maritim dan mengurus izin stasiun radio (ISR) secara resmi.

Kegiatan Sosialisasi dan/atau Bimtek Sertifikasi Maritim Nelayan (SRC/LRC) pada tahun 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak memiliki target sejumlah 30 Sertifikat SRC diterbitkan.

c. Capaian Target

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2024 jenis bimbingan teknis yang diberikan adalah Short Range Certificate (SRC) / Sertifikat Jarak Jangkau Dekat (SJJD). Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah kantor PPN Pemangkat, Kab. Sambas pada tanggal 20-22 Mei 2024.

Tabel 48 Capaian Persentase (%) Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC

No	Kinerja (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	9. Persentase (%) Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC	100%	120%	120%

Capaian indikator kinerja berdasarkan dengan RPJMN 2020 – 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Tabel 49 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-9) 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Percentase (%) Sosialisasi/ Bimbingan Teknis SRC/LRC	-	-	100%	800%	100%	140%	100%	141%	100%	120%

Peserta kegiatan adalah para nelayan, nakhoda, ABK. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik sesuai rencana kegiatan, dan tidak ada kendala dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Materi Bimtek SKOR GMDSS Non Konvensi Solas SRC, disampaikan oleh Narasumber Ikbal Mawaldi, PFR Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak. Materi yang diberikan adalah tentang tata cara komunikasi marabahaya maritim, dan juga melakukan praktik tata cara komunikasi marabahaya.
2. Materi Penggunaan spektrum frekuensi radio pada kapal perikanan yang tertib dan bebas gangguan, disampaikan oleh Narasumber Wawan Kurnawan, PFR Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak. Materi yang diberikan adalah regulasi tentang penggunaan spektrum frekuensi radio maritim, dan juga study case gangguan frekuensi radio penerbangan yang disebabkan oleh nelayan.
3. Materi Izin stasiun radio maritim, disampaikan oleh Narasumber Sunardi, Ketua Tim PISMFR dan KP Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak. Materi yang disampaikan adalah tentang perizinan ISR Maritim, dan juga Izin Komunikasi Radio Nelayan (IKRAN).





Gambar 28 Foto Kegiatan Bimbingan Teknis SRC



BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Telah dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Balmon Pontianak dan Balmon Lampung. Balmon Pontianak dan Balmon Lampung merupakan UPT Balmon Kelas II, masing-masing memiliki jumlah kab/kota yang hampir sama, yaitu Jumlah Kab/Kota di wilayah kerja Balmon Pontianak adalah 14 Kab/Kota dan Balmon Lampung adalah 15 Kab/Kota. Walaupun Balmon Lampung memiliki jumlah Kab/Kota lebih banyak 1 Kab/Kota dari Balmon Pontianak, namun keduanya mencapai target perjanjian kinerja. Hasil capaian Balmon Lampung yang lebih tinggi dari balmon pontianak, maka Balmon Lampung sesuai untuk dijadikan benchmark balmon pontianak.

Adapun dari benchmark ini digunakan untuk upaya dalam peningkatan kualitas dan akan menjadi perbaikan untuk mencapai pencapaian kinerja di tahun yang akan datang.

Tabel 50 Benchmark Capaian Kinerja (IK-9) dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen SDPPI	Target %	Capaian %	Keterangan
Percentase (%) Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC	Balmon Pontianak	100	120	Percentase Capaian Balmon Lampung lebih tinggi dibanding Balmon Pontianak
	Balmon Lampung	100	363.3	

d. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Dalam pelaksanaannya, Bimbingan Teknis *Short Range Sertificate* (SRC) pendaftaran dilakukan secara *online* sehingga menghilangkan kebutuhan pendaftaran manual yang memakan waktu, menyediakan materi pembelajaran berbentuk Buku Saku Nelayan sebagai panduan Komunikasi Radio bagi Nelayan dan melakukan simulasi Komunikasi Marabahaya secara langsung terhadap Peserta.

e. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dari kegiatan bimtek SRC/LRC ini adalah melakukan pengawasan dan memonitoring penggunaan frekuensi di lapangan oleh para nelayan. Diharapkan agar potensi gangguan penggunaan frekuensi radio yang disebabkan oleh nelayan dapat berkurang.

Dampak

Dampak lainnya adalah terbangunnya sinergi dan kesadaran bersama antar pemangku kepentingan terhadap pentingnya sistem monitoring spektrum yang modern dan terintegrasi. Dengan memahami cara kerja dan fungsi SRC/LRC, para peserta kegiatan—terutama dari kalangan non-teknis—menjadi lebih menghargai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi penggunaan spektrum dan mendukung proses pengawasan secara aktif.



Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini memperkuat posisi Balmon sebagai pusat informasi dan edukasi teknis spektrum radio di wilayah kerjanya, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan yang berbasis teknologi dan transparansi. Keberlanjutan sosialisasi dan bimtek ini juga mendorong terjadinya peningkatan standar operasional di internal Balmon dalam pengelolaan infrastruktur monitoring secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis SRC/LRC telah memberikan dampak nyata dalam mendorong adopsi teknologi pengawasan yang lebih modern, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mendukung tercapainya target kinerja pengawasan spektrum frekuensi radio secara lebih efektif dan efisien.

f. Implementasi nilai BerAKHLAK

- **Berorientasi Pelayanan** : Meningkatkan Kualitas Layanan Sertifikasi
- **Akuntabel**: Transparansi dalam Proses Sertifikasi
- **Kompeten**: Peningkatan Keahlian Petugas dan Nelayan
- **Harmonis**: Membangun Hubungan Baik dengan Nelayan dan Pemangku Kepentingan
- **Loyal**: Komitmen terhadap Keselamatan dan Regulasi Maritim
- **Adaptif**: Responsif terhadap Tantangan di Lapangan
- **Kolaboratif** : Sinergi dengan Berbagai Pihak

g. Efisiensi

Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) radio nelayan dalam Program MOTS-IKRAN yang dilaksanakan oleh UPT Balmon Pontianak selama tahun 2024 dilakukan dengan efisiensi yang signifikan dari berbagai aspek, mulai dari penggunaan metode, pengelolaan anggaran, waktu pelaksanaan, tenaga SDM.



10. IK 10 Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN

a. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kelancaran komunikasi di sektor maritim, khususnya pada kapal nelayan, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) menghadirkan program Maritim On The Spot (MOTS). Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nelayan dan pemilik kapal dalam mendapatkan Izin Stasiun Radio (ISR) Maritim, sehingga mereka dapat menggunakan frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya tanpa menyebabkan gangguan pada layanan komunikasi lainnya, seperti penerbangan dan navigasi maritim.

Peningkatan kesadaran nelayan mengenai pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio yang legal dan tertib menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatnya permohonan ISR Maritim. Dengan adanya program MOTS, diharapkan nelayan lebih mudah mengakses layanan ini tanpa harus datang ke kantor.

Maksud dan Tujuannya adalah :

- Memberikan kemudahan bagi nelayan dalam memperoleh Izin Stasiun Radio (ISR) Maritim melalui layanan jemput bola di lokasi mereka.
- Meningkatkan kepatuhan nelayan dalam penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Mencegah penggunaan frekuensi ilegal yang dapat mengganggu komunikasi darurat dan layanan keselamatan maritim.
- Meningkatkan jumlah ISR Mariti - IKRAN yang diterbitkan.
- Memastikan seluruh perangkat komunikasi radio yang digunakan oleh nelayan telah memiliki izin resmidan bersertifikasi.
- Meningkatkan kesadaran nelayan tentang pentingnya komunikasi yang tertib dan legal di sektor maritim.

b. Sasaran Kegiatan

Kegiatan ini menasaskan para nelayan, nakhoda kapal, serta pemilik kapal perikanan yang memerlukan izin komunikasi radio maritim. Sasaran utamanya adalah kapal-kapal yang belum memiliki ISR Maritim.

c. Capaian Target

Pada tahun 2024, Indikator Kinerja Jumlah ISR Maritim memiliki target yang telah ditetapkan sebanyak 35 ISR. Berdasarkan data capaian hingga akhir Desember 2024, jumlah ISR Maritim yang telah diterbitkan mencapai 112 ISR, dengan persentase capaian sebesar 320%.



Tabel 51 Capaian Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN

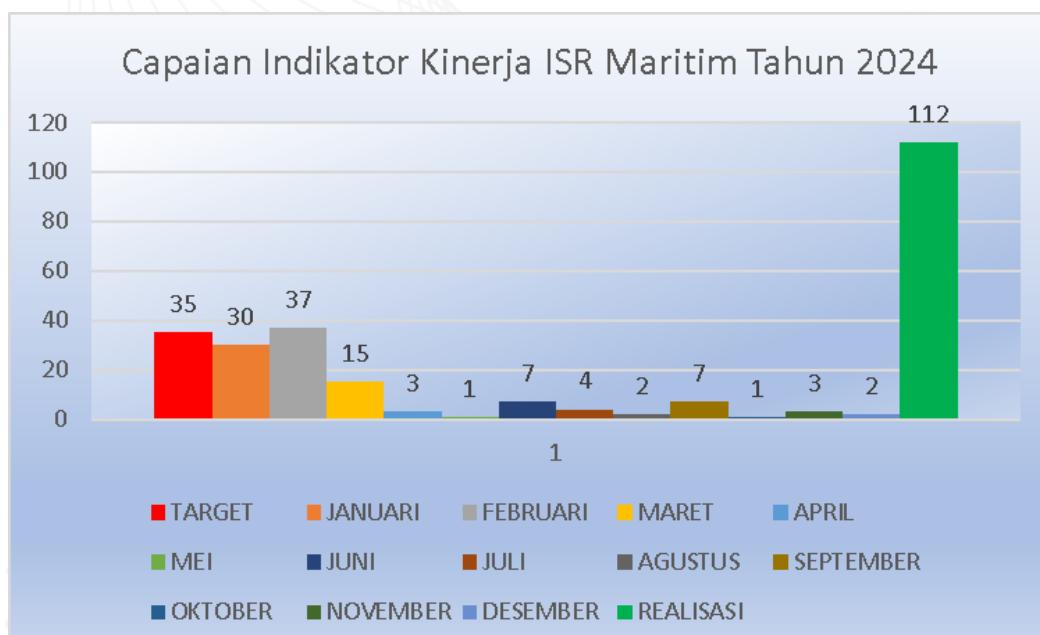
No	Kinerja (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	10. Persentase (%) ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN	100%	100%	320%

capaian indikator kinerja berdasarkan dengan RPJMN 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 52 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-10) 2020-2024

No.	Indikator Kinerja (1)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target (3)	Capaian (4)	Target (5)	Capaian (6)	Target (7)	Capaian (8)	Target (9)	Capaian (10)	Target (11)	Capaian (12)
1	Percentase (%) ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN	10	31	10	80	100%	408.57 %	100%	251.42 %	100%	320%

Peningkatan ini menunjukkan adanya **antusiasme yang tinggi dari nelayan** dalam mengurus ISR Maritim, serta efektivitas layanan jemput bola yang dilakukan dalam program MOTS.



Gambar 29 Grafik Capaian Indikator Kinerja Penerbitan ISR Maritim Nelayan Tahun 2024



BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Telah dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Balmon Pontianak dan Balmon Lampung. Balmon Pontianak dan Balmon Lampung merupakan UPT Balmon Kelas II, masing-masing memiliki jumlah kab/kota yang hampir sama, yaitu Jumlah Kab/Kota di wilayah kerja Balmon Pontianak adalah 14 Kab/Kota dan Balmon Lampung adalah 15 Kab/Kota. Walaupun Balmon Lampung memiliki jumlah Kab/Kota lebih banyak 1 Kab/Kota dari Balmon Pontianak, namun keduanya mencapai target perjanjian kinerja. Hasil capaian Balmon Lampung yang lebih tinggi dari balmon pontianak, maka Balmon Lampung sesuai untuk dijadikan benchmark balmon pontianak.

Adapun dari benchmark ini digunakan untuk upaya dalam peningkatan kualitas dan akan menjadi perbaikan untuk mencapai pencapaian kinerja di tahun yang akan datang.

Tabel 53 Benchmark Capaian Kinerja (IK-10) dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen SDPPI	Target %	Capaian %	Keterangan
Percentase (%) ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN	Balmon Pontianak	100	320	Percentase Capaian Balmon Lampung dibanding dengan Balmon Pontianak
	Balmon Lampung	100	336.6	





Gambar 30 Foto kegiatan MOTS

d. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Beberapa inovasi yang diterapkan dalam pelaksanaan ISR Maritim melalui program MOTS meliputi:

- Layanan Jemput Bola: Pelayanan dilakukan langsung di pelabuhan atau tempat berkumpulnya nelayan, sehingga mereka tidak perlu datang ke kantor.
- Digitalisasi Pendaftaran melalui Aplikasi MySpectra (www.isr.postel.go.id)
Proses pengajuan ISR dapat dilakukan secara online melalui aplikasi MySpectra, mempercepat proses registrasi dan verifikasi dokumen.
- ISR yang telah diterbitkan dapat diakses dan diunduh dalam bentuk digital, mempermudah aksesibilitas bagi nelayan.



e. Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian program ini, beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan meliputi:

- Memperluas cakupan wilayah layanan MOTS ke lebih banyak daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil.
- Meningkatkan sosialisasi kepada nelayan mengenai pentingnya izin frekuensi radio dan bahaya penggunaan frekuensi illegal yang tidak sesuai peruntukannya.
- Mengoptimalkan aplikasi MySpectra untuk mempercepat dan mempermudah pengajuan ISR secara online.
- Bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pelabuhan setempat serta organisasi nelayan, untuk memperluas dampak program ini.

Dampak

Dampak nyata dari kegiatan ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan teknis para nelayan pengguna perangkat radio di wilayah pesisir Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Mempawah, Ketapang, Kayong Utara, dan Sambas. Para nelayan kini mulai memahami pentingnya penggunaan perangkat radio sesuai standar dan regulasi, termasuk dalam hal identitas panggilan, tata cara komunikasi, serta pengelolaan lisensi yang sah.

Lebih jauh, program ini berdampak langsung terhadap peningkatan keselamatan pelayaran nelayan, di mana komunikasi antarkapal maupun antara kapal dengan darat dapat dilakukan lebih efektif, cepat, dan stabil, khususnya dalam kondisi darurat atau cuaca ekstrem. Hal ini turut mendukung fungsi SAR (Search and Rescue) dan pengawasan wilayah laut secara lebih efisien.

Dari aspek pengelolaan spektrum, kegiatan MOTS-IKRAN membantu dalam penertiban penggunaan frekuensi radio maritim, mendorong legalisasi perangkat, serta meminimalisir potensi gangguan (interferensi) dari perangkat ilegal atau tak sesuai standar teknis. Dengan pendekatan pembinaan partisipatif dan edukatif, program ini juga menjadi bagian dari strategi pendekatan humanis dalam pengawasan spektrum di wilayah dengan karakteristik sosial khas seperti komunitas nelayan.

Selain itu, MOTS-IKRAN menjadi media kolaborasi antara Balai Monitor, pemerintah daerah, dan komunitas nelayan, yang pada akhirnya membangun hubungan yang lebih erat dan berkelanjutan dalam menjaga keamanan serta keteraturan pemanfaatan spektrum di sektor kelautan.

f. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam pelaksanaan program MOTS-IKRAN, prinsip **BerAKHLAK** diterapkan sebagai pedoman kerja, meliputi:

- **Berorientasi Pelayanan:** Memberikan layanan yang cepat, mudah, dan tanpa biaya tambahan bagi nelayan.
- **Akuntabel:** Seluruh proses ISR dilakukan secara transparan dan dapat dipantau melalui aplikasi MySpectra.



- **Kompeten:** Tim teknis yang terlibat merupakan tenaga profesional yang memastikan perangkat nelayan memenuhi standar yang ditetapkan.
- **Harmonis:** Menjalin hubungan baik dengan nelayan dan pemangku kepentingan guna meningkatkan kesadaran akan regulasi komunikasi maritim.
- **Loyal:** Berkomitmen dalam memastikan nelayan mendapatkan pelayanan terbaik.
- **Adaptif:** Menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas layanan ISR Maritim.
- **Kolaboratif:** Bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas cakupan layanan.

g. Efisiensi

Keberhasilan program MOTS-IKRAN dalam penerbitan ISR Maritim sebanyak 112 ISR dari target 35 ISR (320%) menunjukkan efisiensi yang signifikan. Beberapa faktor yang mendukung efisiensi program ini adalah:

- **Penggunaan teknologi digital (Aplikasi MySpectra)** yang mempercepat proses pendaftaran dan penerbitan ISR.
- **Pendekatan jemput bola** yang mengurangi hambatan geografis bagi nelayan.
- **Kolaborasi dengan instansi terkait** yang meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pelaksanaan program di lapangan.

Dengan berbagai strategi dan inovasi yang telah diterapkan, program **Maritim On The Spot (MOTS) – IKRAN** berhasil meningkatkan kepatuhan nelayan dalam penggunaan spektrum frekuensi radio secara legal, serta mendukung keselamatan dan kelancaran komunikasi di sektor maritim.

Pelaksanaan program **Maritim On The Spot (MOTS) – IKRAN** telah menunjukkan hasil yang sangat positif dengan capaian penerbitan ISR Maritim sebesar **320% dari target**. Inovasi layanan jemput bola, digitalisasi melalui aplikasi MySpectra, serta implementasi budaya kerja **BerAKHLAK** menjadi faktor utama keberhasilan program ini. Ke depan, program ini akan terus diperluas dan ditingkatkan agar semakin banyak nelayan yang mendapatkan manfaat dari layanan ISR Maritim yang cepat, efisien, dan sesuai regulasi.



11. IK 11 Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR

a. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Kegiatan verifikasi data koordinat site ISR (Izin Stasiun Radio) dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan data yang akurat untuk memastikan penggunaan spektrum frekuensi radio yang efisien, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, serta perencanaan infrastruktur yang tepat. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memastikan keakuratan dan memperbarui data koordinat, mendeteksi penyimpangan, serta meningkatkan efisiensi pengawasan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib, meminimalkan interferensi, meningkatkan efektivitas pengawasan, mendukung pengembangan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas data ISR.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan verifikasi data koordinat site ISR (Izin Stasiun Radio) adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat, dengan jumlah target adalah total stasiun radio sisa target dari kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, yang berlokasi di 8 Kab/Kota berikut; Kab. Bengkayang, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Kayong Utara, Kab. Ketapang, Kab. Landak, Kab. Melawi, Kab. Sekadau, dan Kab. Sintang.

c. Capaian Target

Target pada kegiatan verifikasi data koordinat site ISR pada tahun 2024 merupakan kelanjutan dari kegiatan pada tahun 2023, dimana dari total 14 Kab/Kota di wilayah Kalimantan Barat telah terlaksana kegiatan verifikasi koordinat pada 6 Kab/Kota di tahun 2023 dengan capaian sebesar 100%, sehingga untuk target di tahun 2024 adalah lanjutan verifikasi koordinat di 8 Kab/Kota dengan target sebanyak 6290 ISR terverifikasi. Sepanjang tahun 2024, Balmon Pontianak telah melaksanakan kegiatan verifikasi data koordinat site ISR dengan capaian sebesar 100% sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

Tabel 54 Capaian Persentase % Verifikasi Data Koordinat Site ISR

No	Kinerja (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	11. Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR <i>Microwave Link</i> dan Penyiaran (QR Code Site)	100%	100	100%

capaian indikator kinerja berdasarkan dengan RPJMN 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Tabel 55 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-10) 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian								
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Percentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%

Kegiatan verifikasi data koordinat site ISR ini merupakan bagian dari program Prima-Aksi (Pelayanan Frekuensi untuk Indonesia Maju Terkoneksi) sebagai solusi perizinan melalui pembenahan data dan bisnis proses ISR yang mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Pelaksanaan verifikasi koordinat dibagi menjadi 4 pengelompokan waktu yang dilaksanakan per triwulan dengan jumlah target di setiap Kab/Kota seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 56 Jumlah Target ISR Terverifikasi

Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota	Target ISR Terverifikasi	Waktu
8	Bengkayang	726	Jan - Mar 2024
	Kapuas Hulu	868	
	Kayong Utara	354	
	Ketapang	1736	
	Landak	598	Jul - Sep 2024
	Melawi	272	
	Sekadau	608	Okt - Nov 2024
	Sintang	1128	

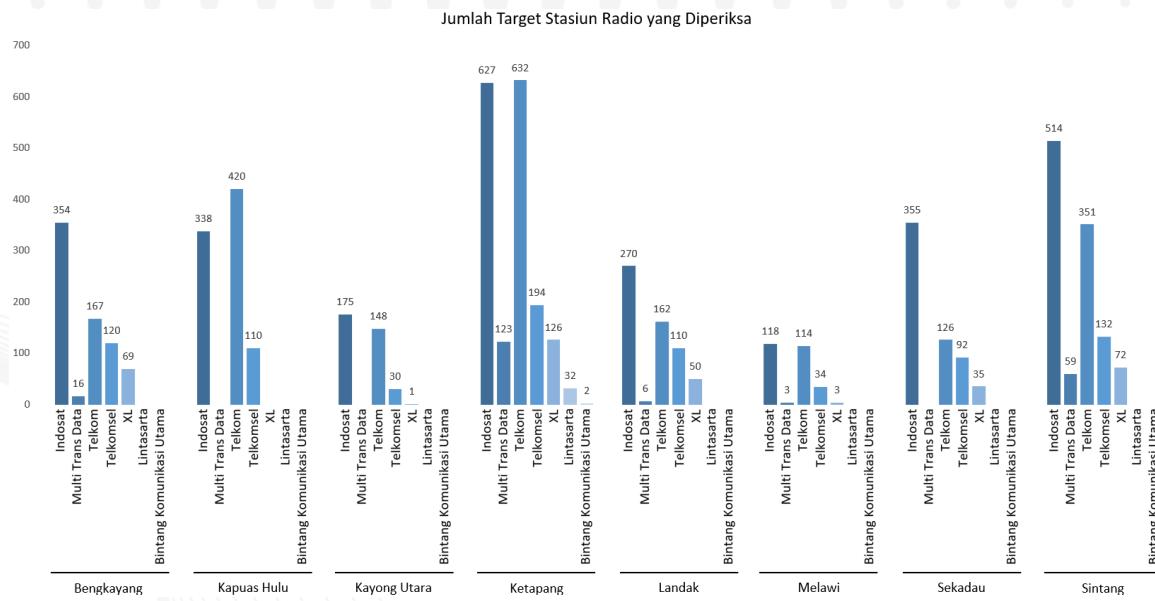
Jumlah target ISR terbanyak ada di Kabupaten Ketapang dengan jumlah target sebanyak 1736 ISR terverifikasi dan di Kabupaten Sintang dengan jumlah target sebanyak 1128 ISR terverifikasi.



Hasil capaian per triwulan kegiatan verifikasi data koordinat site ISR dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 57 Realisasi Kegiatan Verifikasi Data Koordinat Site ISR

REALISASI						
TRIWULAN-1						
Nama Kab/Kota	Status Verifikasi	ISR Terverifikasi	% ISR Terverifikasi	% Realisasi Kab	% Realisasi ISR	% Capaian ISR
BENGKAYANG	Belum	423	58,26%	0,00%	50,55%	0,00%
KAPUAS HULU	Belum	338	38,94%			
KAYONG UTARA	Belum	176	49,72%			
KETAPANG	Belum	753	43,38%			
LANDAK	Belum	320	53,51%			
MELAWI	Belum	121	44,49%			
SEKADAU	Belum	390	64,14%			
SINTANG	Belum	586	51,95%			
TRIWULAN-2						
Nama Kab/Kota	Status Verifikasi	ISR Terverifikasi	% ISR Terverifikasi	% Realisasi Kab	% Realisasi ISR	% Capaian ISR
BENGKAYANG	Belum	710	97,80%	37,50%	97,68%	36,63%
KAPUAS HULU	Ya	868	100,00%			
KAYONG UTARA	Ya	354	100,00%			
KETAPANG	Belum	1579	90,96%			
LANDAK	Belum	592	99,00%			
MELAWI	Belum	269	98,90%			
SEKADAU	Ya	608	100,00%			
SINTANG	Belum	1069	94,77%			
TRIWULAN-3						
Nama Kab/Kota	Status Verifikasi	ISR Terverifikasi	% ISR Terverifikasi	% Realisasi Kab	% Realisasi ISR	% Capaian ISR
BENGKAYANG	Ya	726	100,00%	87,50%	99,76%	87,29%
KAPUAS HULU	Ya	868	100,00%			
KAYONG UTARA	Ya	354	100,00%			
KETAPANG	Belum	1702	98,04%			
LANDAK	Ya	598	100,00%			
MELAWI	Ya	272	100,00%			
SEKADAU	Ya	608	100,00%			
SINTANG	Ya	1128	100,00%			
TRIWULAN-4						
Nama Kab/Kota	Status Verifikasi	ISR Terverifikasi	% ISR Terverifikasi	% Realisasi Kab	% Realisasi ISR	% Capaian ISR
BENGKAYANG	Ya	726	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
KAPUAS HULU	Ya	868	100,00%			
KAYONG UTARA	Ya	354	100,00%			
KETAPANG	Ya	1736	100,00%			
LANDAK	Ya	598	100,00%			
MELAWI	Ya	272	100,00%			
SEKADAU	Ya	608	100,00%			
SINTANG	Ya	1128	100,00%			



Gambar 31 Grafik jumlah stasiun *microwavelink* yang diverifikasi berdasarkan nama operator

Mekanisme pelaksanaan verifikasi data koordinat dapat dilakukan melalui:

1. Pengukuran koordinat oleh UPT, termasuk pemanfaatan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh UPT;
2. Verifikasi dengan operator, dengan melampirkan data dukung yang memadai, berupa hasil pengukuran koordinat oleh operator menggunakan perangkat GPS atau *tool* serupa, disertai foto *geotagging*; atau
3. *Deskwork analysis* menggunakan *Google Earth*, yang dapat menampilkan visual lokasi site untuk mengidentifikasi lokasi site

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Telah dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Balmon Pontianak dan Balmon Palangkaraya. Balmon Pontianak dan Balmon Palangkaraya memiliki jumlah Kab/Kota yang sama, yaitu 14 kab/kota. Namun untuk luas wilayah kerja, Balmon Palangkaraya memiliki luas wilayah yaitu 153.564,50, sedangkan balmon pontianak luas wilayah kerjanya yaitu 147.307. Balmon Pontianak dan Balmon Palangkaraya sama-sama memiliki nilai capaian 100% pada kegiatan pemeriksaan stasiun radio.

Adapun dari benchmark ini digunakan untuk upaya dalam peningkatan kualitas dan akan menjadi perbaikan untuk mencapai pencapaian kinerja di tahun yang akan datang.



Tabel 58 Benchmark Capaian Kinerja (IK-11) dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen SDPPI	Target %	Capaian %	Keterangan
Percentase (%)	Balmon	100	100	Percentase Capaian
Verifikasi Data	Pontianak			Balmon Pontianak
Koordinat Site ISR				dan Balmon
Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)	Balmon Palangkaraya	100	100	Palangkaraya sama sama 100%





Gambar 32 kegiatan verifikasi data koordinat site ISR

d. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Inovasi dalam kegiatan verifikasi data koordinat site ISR (Izin Stasiun Radio) dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas proses verifikasi. Seperti penggunaan perangkat GPS dengan tingkat akurasi tinggi untuk memverifikasi koordinat site ISR di lapangan. Keberhasilan dapat dinilai dari tingkat akurasi data yang diukur melalui persentase data terverifikasi, perbandingan data sebelum dan sesudah verifikasi, serta validasi lapangan. Kegiatan verifikasi data koordinat site ISR dapat terhambat oleh beberapa kendala seperti keterbatasan teknologi GPS yang kurang akurat, kesulitan akses lokasi, dan kerusakan peralatan dapat menyebabkan ketidakakuratan dan kesalahan.

e. Tindak Lanjut

Tindak lanjut keberhasilan verifikasi data koordinat ISR meliputi pemeliharaan dan pembaruan data secara berkala, integrasi data ke sistem informasi, dan pengamanan data.

Dampak

Melalui verifikasi koordinat site, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak memastikan bahwa setiap stasiun radio microwave link maupun penyiaran telah berlokasi sesuai dengan data teknis yang tercantum dalam izin, serta meminimalkan kesalahan administratif yang berpotensi menimbulkan interferensi spektrum, tumpang tindih frekuensi, atau bahkan pelanggaran zona layanan.

Penerapan sistem QR Code Site memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi layanan dan pengawasan. Melalui pemindaian kode QR yang terpasang di lokasi perangkat atau menara, petugas dapat langsung mengakses informasi ISR secara digital, real-time, dan akurat. Ini tidak hanya



mempercepat proses verifikasi lapangan, tetapi juga mendukung kemudahan audit internal dan eksternal, serta memperkuat prinsip transparansi layanan publik.

Dampak lainnya adalah peningkatan kesadaran dan kepatuhan pengguna frekuensi radio terhadap pentingnya ketertiban administratif dan teknis dalam pengelolaan ISR. Pengguna layanan radio microwave dan penyiaran kini lebih terdorong untuk melakukan pembaruan data dan menyelaraskan informasi teknis dengan kondisi faktual di lapangan, termasuk pemberian koordinat geografis dan pengelolaan perizinan berkelanjutan.

Dari perspektif pengawasan spektrum, kegiatan ini mendukung terbentuknya basis data ISR yang akurat dan berbasis spasial (geo-tagged), yang sangat bermanfaat dalam perencanaan nasional, pengendalian interferensi, hingga pengembangan sistem monitoring otomatis berbasis lokasi.

Secara keseluruhan, kegiatan verifikasi koordinat site dan QR Code Site tahun 2024 tidak hanya berdampak pada tertib administrasi perizinan, tetapi juga memperkuat fondasi pengawasan spektrum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, serta memperkuat posisi Balmon Pontianak sebagai pelaksana teknis yang responsif dan modern dalam mendukung pengelolaan spektrum frekuensi radio secara nasional.

f. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target pada pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat menggunakan prinsip-prinsip BerAKHLAK sebagai berikut :

- **Berorientasi Pelayanan:** memahami pentingnya data koordinat yang akurat untuk kepentingan publik.
- **Akuntabel:** melaksanakan verifikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
- **Kompeten:** menggunakan peralatan dan teknologi yang tepat untuk memastikan akurasi hasil verifikasi.
- **Harmonis:** membangun komunikasi yang baik dengan pemegang ISR dan pihak terkait.
- **Loyal:** memegang teguh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Adaptif:** menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi verifikasi.
- **Kolaboratif:** bekerja sama dengan instansi terkait dan pemegang ISR untuk melaksanakan verifikasi data koordinat.

g. Efisiensi

Untuk verifikasi data koordinat ISR yang efisien, gunakan teknologi seperti GPS akurat dan drone, serta aplikasi mobile dan sistem otomatis. Manajemen sumber daya yang baik, koordinasi antar instansi, dan kerja sama dengan pemegang ISR juga penting. Pastikan prosedur standar, proses sederhana, dan evaluasi berkala untuk perbaikan. Capaian untuk indikator verifikasi data koordinat



site ISR telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, dan dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai 100%.



Pada Sasaran Program II “**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien**” yang terdapat 2 (dua) indikator kinerja

12. IK 12 Nilai Kinerja Anggaran UPT Balmon Pontianak Tahun 2024

Nilai Kinerja Anggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di tingkat operasional. UPT sebagai unit kerja yang melaksanakan kebijakan teknis dan operasional pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengelola anggaran agar dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan anggaran di UPT, seperti rendahnya penyerapan anggaran, ketidaktepatan alokasi, serta kurangnya kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran nilai kinerja anggaran untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang maksimal sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pada tahun 2024, target Perjanjian Kinerja (PK) yang ditargetkan oleh Direktorat Jenderal SDPPI untuk Balmon Pontianak minimal memiliki capaian ≥ 94 . **Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2024 adalah 92,19.**

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 59 Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT Balmon Pontianak Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran UPT Balmon Pontianak Tahun 2024	94	92,19	98,07%

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Nilai Kinerja Anggaran UPT Balmon Pontianak Tahun 2024 dari Kementerian Keuangan” telah terlaksana tetapi kurang dari target yang ditetapkan yaitu 98,07%.

13. IK 13 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Pelaporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan negara. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) berperan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam era digitalisasi dan peningkatan akuntabilitas publik, penting bagi UAKPA untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan pemerintah. Permasalahan yang sering muncul dalam pelaporan keuangan meliputi ketidaktepatan pencatatan, keterlambatan dalam penyampaian laporan, serta kurangnya



pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan UAKPA agar lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun anggaran 2024 menargetkan seluruh Satkernya memiliki capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yaitu 100. **Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2024 adalah 95.**

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 60 Capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	100	95	95 %

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)” telah terlaksana tetapi kurang dari target yang ditetapkan yaitu 95%.

Capaian target belum mencapai 100% karena hasil evaluasi kualitas terhadap Laporan Keuangan UAKPA Balmon Pontianak pada Tahun Anggaran 2023 memperoleh nilai 95. Kekurangan 5 poin tersebut berasal dari indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke Entitas Pelaporan, yang tidak terpenuhi sepenuhnya akibat keterlambatan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan capaian target menjadi 100% dan mengatasi kekurangan dalam indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, beberapa upaya yang akan diterapkan Balmon Pontianak diantaranya : meningkatkan perencanaan dan pengelolaan waktu, memperkuat pengawasan dan evaluasi berkala dan meningkatkan koordinasi dengan Entitas Pelaporan. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan diharapkan dapat diminimalisir sehingga target pencapaian kualitas laporan keuangan UAKPA Balmon Pontianak dapat mencapai 100%.



KOMDIGI
DIREKTORAT JENDERAL
INFRASTRUKTUR DIGITAL

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS II PONTIANAK**



B. Kinerja Lainnya

I. LAYANAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di wilayah Kalimantan Barat yang merupakan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak, maka dibutuhkan layanan administrasi sehingga tercapai target yang telah direncanakan.

Salah satu layanan administrasi adalah ketatausahaan yang meliputi administrasi pengagendaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementerian Kominfo, Ditjen SDPPI dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat serta para Penyelenggara/pengguna Spektrum Frekuensi Radio.

- Surat masuk selama periode bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebanyak 620 surat;
- Surat keluar selama periode bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2024 sebanyak 433 surat; dan
- Surat Perintah Tugas sebanyak 330 surat.

II. LAYANAN PERENCANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN

Pada tahun 2024 jumlah anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak sebesar Rp. Rp. 11.702.612.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNBP. Adapun rincian program kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak sebagaimana terlampir.

III. LAYANAN PENGELOLAAN BMN

Dokumen pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku memiliki target sebanyak 3 laporan di tahun 2024 yaitu Laporan BMN Semester I TA. 2024 dengan nomor 224/Balmon.61/KU.01.09/07/2024, tanggal 15 Juli 2024 perihal Penyampaian Laporan Pengguna Barang (LPB) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak Semester I TA 2024, Laporan BMN Semester II TA. 2024 dengan nomor 040/Balmon.61/PL.06.06/02/2025, tanggal 14 Februari 2025 perihal Penyampaian Laporan Pengguna Barang (LPB) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak Semester II TA 2024, dan Laporan BMN Tahunan Tahun 2024 dengan nomor 041/Balmon.61/PL.06.06/02/2025, tanggal 14 Februari 2025 perihal Penyampaian Laporan Pengguna Barang (LPB) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak Tahunan TA 2024 (Unaudited). Selain itu Pengelolaan BMN juga termasuk didalamnya usulan penghapusan BMN diantaranya:

- Penjualan Perangkat Monitoring 2 paket melalui e-Auction dengan nomor risalah lelang 424/11.01/2024-01 tanggal 28 Mei 2024.
- Penjualan Meubelair 1 paket melalui e-Auction dengan nomor risalah lelang 934/11.01/2024-01 tanggal 11 Oktober 2024.



- Penjualan Kendaraan Bermotor Roda Dua 1 paket melalui e-Auction dengan nomor risalah lelang 977/11.01/2024-01 tanggal 31 Oktober 2024.
- Penjualan Perangkat SPA 1 paket melalui e-Auction dengan nomor risalah lelang 1100/11.01/2024-01 tanggal 06 Desember 2024.
- Penjualan Perangkat Monitoring 2 paket melalui e-Auction dengan nomor risalah lelang 424/11.01/2024-01 tanggal 28 Mei 2024.
- Penghapusan dengan cara Hibah berupa Tanah dan Pagar Semi Permanen dengan nomor S-113/MK.6/KNL.1101/2024 tanggal 17 September 2024.

Usulan Penetapan Status Penggunaan yang telah dilakukan di tahun 2024 sebagian telah terbit SK Penetapan Status Penggunaan :

- SK No. 1/KM.6/KNL.1101/2024 Tahun 2024 sebanyak 2 unit total nilai perolehan Rp.1.491.908.237,-
- SK NOMOR 198 TAHUN 2024 sebanyak 27 unit total nilai perolehan Rp.525.704.926,-
- SK NOMOR 377 TAHUN 2024 sebanyak 10 unit total nilai perolehan Rp.219.950.000,-

Pembuatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang dilaksanakan pada tahun 2024 untuk pelaksanaan di tahun 2026 telah diusulkan berdasarkan Nota Dinas Kabalmon nomor 281/Balmon.61/PL.06.01/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang meliputi tentang rencana Pemeliharaan dan Pengadaan di Tahun 2026.

Di Tahun 2024 telah melakukan Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) semester 1 tahun 2024 dengan Nota Dinas nomor 224/Balmon.61/PL.07.04/07/2024 tanggal 03 Juli 2024 Perihal Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester I Tahun 2024 melalui aplikasi SIMAN, Nota Dinas nomor 019/Balmon.61/PL.07.04/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 Perihal Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II Tahun 2024, dan Nota Dinas nomor 020/Balmon.61/PL.07.04/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 Perihal Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Tahunan Tahun 2024 melalui Aplikasi SIMAN v2.

IV. LAYANAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN

Pada tahun 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas II Pontianak memiliki sumber daya manusia sejumlah 22 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 17 pegawai kontrak.

- Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala
Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat 6 (tujuh) pegawai Balai Monitor SFR kelas II Pontianak yang memperoleh Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan terdapat 4 (empat) pegawai yang memperoleh Kenaikan Pangkat (KP), adapun data nama pegawai yang memperoleh KGB dan KP adalah sebagai berikut:



Tabel 61 Data Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai TA. 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak

NO.	NAMA / NIP	GOL / RUANG	TMT	MASA KERJA
1	Tuesy Apriliana, SE NIP. 198204122005022001	Penata / (IIIC)	1 Februari 2024	14 Tahun 00 Bulan
2	Suci Tri Affany, SE NIP. 198606052005022001	Penata Muda Tk. I / (IIIB)	1 Februari 2024	14 Tahun 00 Bulan
3	Rizky Kurniadhi, A.Md T NIP. 199903262022031002	Pengatur / (IIIC)	1 Maret 2024	05 Tahun 00 Bulan
4	Erdi Achmadi NIP. 196806131992031001	Penata Muda / (IIIA)	1 Maret 2024	24 Tahun 00 Bulan
5	Dori Sutopo, SE NIP. 198001102009121001	Penata Tk. I / (IIID)	1 Mei 2024	15 Tahun 00 Bulan
6	Fachriansyah, A.Md NIP. 198102032009121001	Penata Muda / (IIIA)	1 Juli 2024	18 ahun 00 Bulan

Tabel 62 Data Kenaikan Pangkat (KP) Pegawai TA. 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak

NO	NAMA / NIP	URAIAN	TMT	MASA KERJA
1	Dori Sutopo, SE NIP. 198001102009121001	Penata Tk. I / (IIID)	1 April 2024	14 Tahun 11 Bulan
2	Suci Tri Affany, SE NIP. 198606052005022001	Penata / (IIIC)	1 Oktober 2024	14 Tahun 08 Bulan
3	Syarif Muhammad Faisal, ST	Penata / (IIIC)	1 Oktober 2024	17 Tahun 08 Bulan



	NIP. 198203052005021002			
4	Benny Barasila NIP. 197409162006041001	Penata Muda / (IIIa)	1 Oktober 2024	13 Tahun 06 Bulan

- Jenjang Karir Jabatan Fungsional

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat 1 (satu) pegawai Balai Monitor SFR kelas II Pontianak yang telah Lulus Uji Kompetensi dan menduduki Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, dan terdapat 2 (dua) orang yang telah Lulus Uji Kompetensi dan mengalami kenaikan jenjang jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio adapun data nama-nama pegawai tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 63 Data Jabatan Fungsional TA. 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak

NO	NAMA / NIP	URAIAN	TMT	Jenjang Jabatan
1	Suci Tri Affany, SE NIP. 198606052005022001	Penata / (IIIc)	1 November 2024	Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama
2	Syarif Muhammad Faisal, ST NIP198203052005021002	Penata / (IIIc)	1 Oktober 2024	Pengendali Frekuensi Radio Penyelia
3	Benny Barasila NIP. 197409162006041001	Penata Muda / (IIIa)	1 Oktober 2024	Pengendali Frekuensi Radio Mahir

- Kendala dalam bidang kepegawaian:

Posisi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 290 Tahun 2024 mengenai Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan Bezzeting dan Analisis Beban Kerja (ABK) pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak Tahun 2024. Akibatnya, terdapat kendala dalam peluang perpindahan jabatan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional lainnya yang disebabkan oleh keterbatasan dalam peta jabatan tersebut.

C. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran tahun 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak berjumlah sebesar Rp. 11.702.612.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.608.620.557,- atau 99,20%.

Rincian anggaran tersebut dirinci menurut programnya adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:



Tabel 64 Capaian Realisasi Anggaran

SASARAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
PROGRAM 1. 4489 : Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	6.932.315.000	6.904.601.644	99,60 %
SASARAN 2. 6492 : Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio	4.770.297.000	4.704.018.913	98,61 %
TOTAL	11.702.612.000	11.608.620.557	99,20%

Laporan Realisasi Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 11.608.620.557,- atau 99,20% dari pagu anggaran sebesar Rp. 11.702.612.000,- dengan rincian anggaran dan realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 65 Uraian Realisasi Anggaran

URAIAN	Periode 31 Desember 2024		PERSENTASE
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	3.188.145.000	3.186.990.099	99,96 %
Belanja Barang	8.294.467.000	8.201.680.458	98,88 %
Belanja Modal	220.000.000	219.950.000	99,98 %
TOTAL	11.702.612.000	11.608.620.557	99,20%

Realisasi Anggaran dalam OMSPLAN dapat dilihat sebagai berikut :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	LainLain	Transfer		
1	4489 Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	PAGU REALISASI	3.188.145.000 3.186.990.099 (99,96%)	3.524.170.000 3.497.661.545 (99,25%)	220.000.000 219.950.000 (99,98%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	6.932.315.000 6.904.601.644 (99,60%)	
		SISA	1.154.901 0.00%	26.508.455 0.00%	50.000 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	27.713.356 4.770.297.000 4.704.018.913 (98,61%)	
2	6492 Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio	PAGU REALISASI	0 0.00%	4.770.297.000 4.704.018.913 (98,61%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	4.770.297.000 4.704.018.913 (98,61%)	
		SISA	0 0.00%	66.278.087 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	66.278.087 0.00%	
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	3.188.145.000 3.186.990.099 (99,96%)	8.294.467.000 8.201.680.458 (99,88%)	220.000.000 219.950.000 (99,98%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	11.702.612.000 11.608.620.557 (99,20%)	
		SISA	1.154.901 0.00%	92.786.542 0.00%	50.000 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	93.991.443 0.00%	

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK



Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat dilihat sebagai berikut :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output					
1	042	059	654137	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK		Nilai	100.00	82.83	98.96	100.00	100.00	95.00	100.00	96.72	100%	0.00	96.72
						Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
						Nilai Akhir	10.00	12.42	19.79	10.00	10.00	9.50	25.00				
						Nilai Aspek	91.42		98.49				100.00				



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI
RADIO KELAS II PONTIANAK**



BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2024 Balmon Pontianak mencerminkan komitmen dalam menjalankan tugas pengawasan spektrum frekuensi dan perangkat telekomunikasi secara profesional dan akuntabel. Dengan capaian indikator kinerja yang sebagian besar melampaui target, Balmon Pontianak menunjukkan performa yang adaptif, efisien, dan responsif terhadap tantangan operasional di lapangan.

Evaluasi terhadap capaian ini akan menjadi dasar untuk merumuskan strategi perbaikan dan inovasi ke depan, termasuk penguatan sistem informasi pengawasan, peningkatan kolaborasi lintas instansi, serta penyempurnaan layanan publik. Kami berkomitmen untuk terus mendukung transformasi digital nasional melalui pengelolaan spektrum yang tertib, aman, dan berkelanjutan.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

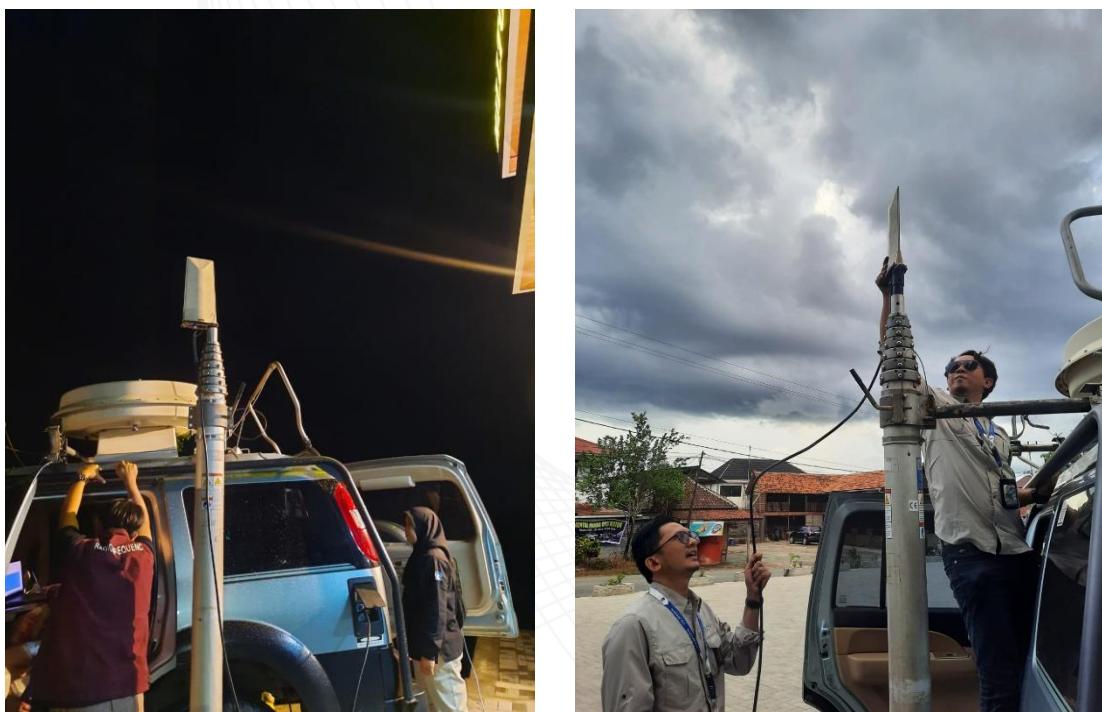
**BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI
RADIO KELAS II PONTIANAK**



LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN

1. OBSERVASI DAN MONITORING PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO







2. PENGAWASAN ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI







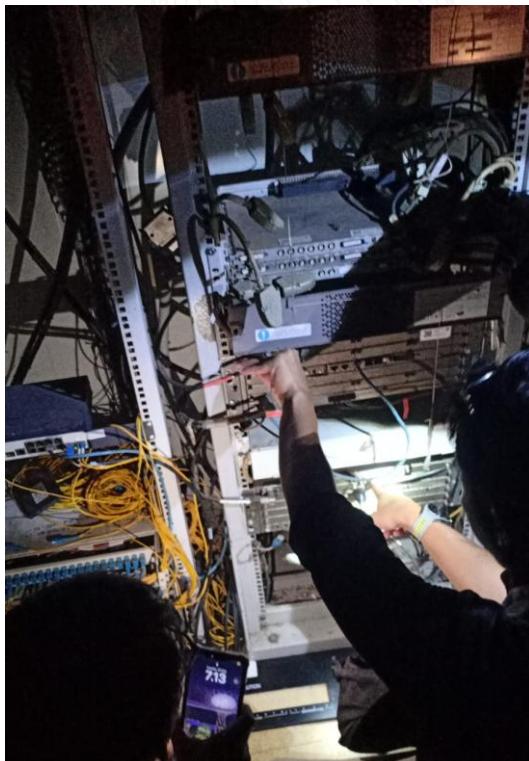
3. PENGUKURAN PARAMETER TEKNIS STASIUN RADIO

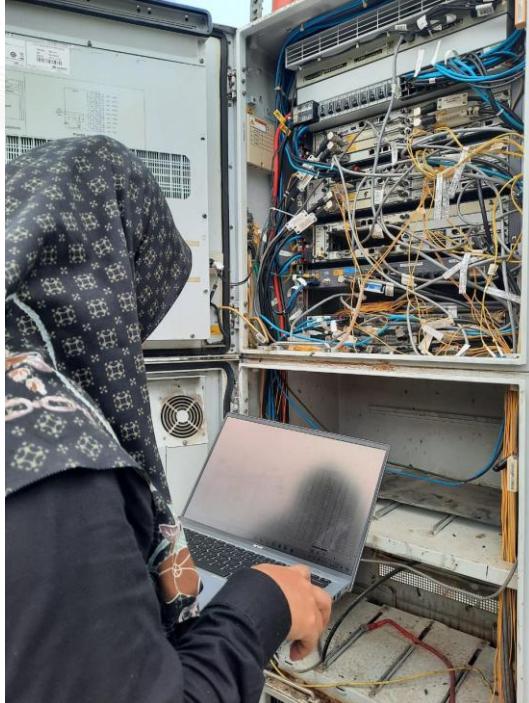


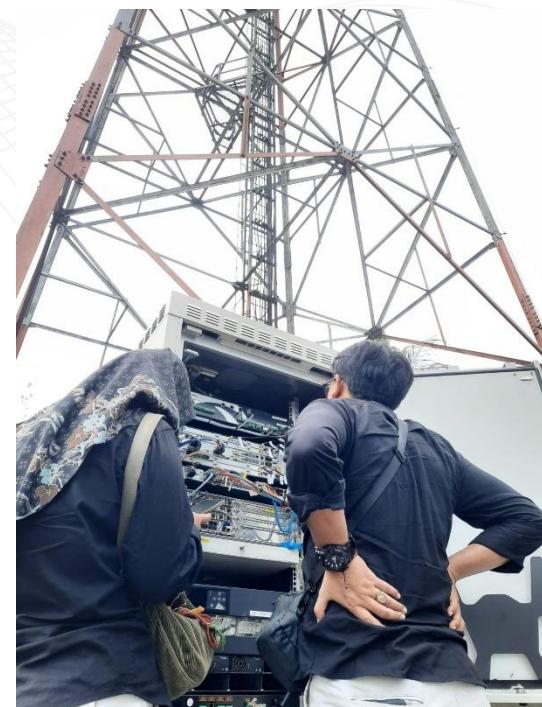




- 4. INSPEKSI/VALIDASI IZIN STASIUN RADIO (ISR) MW LINK DENGAN CARA
REMOTE SITE, OPEN SHELTER DAN KEGIATAN VERIFIKASI KOORDINAT
STASIUN RADIO**











5. INSPEKSI, PEMELIHARAAN STASIUN RADIO/TRANSPORTABLE





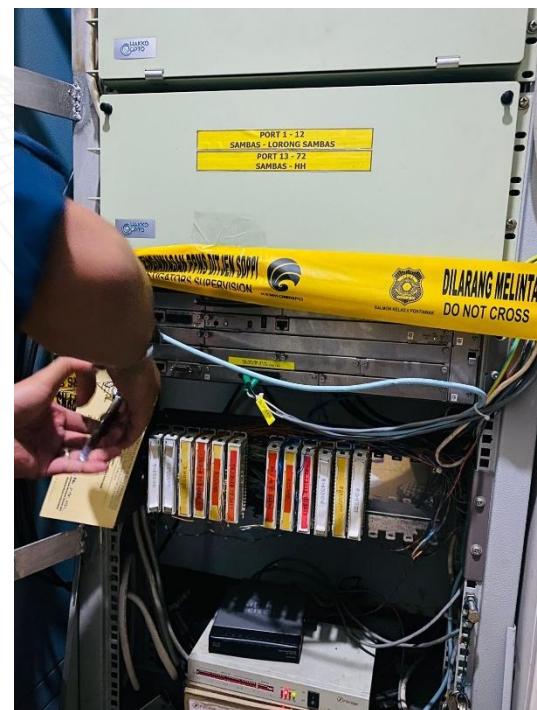
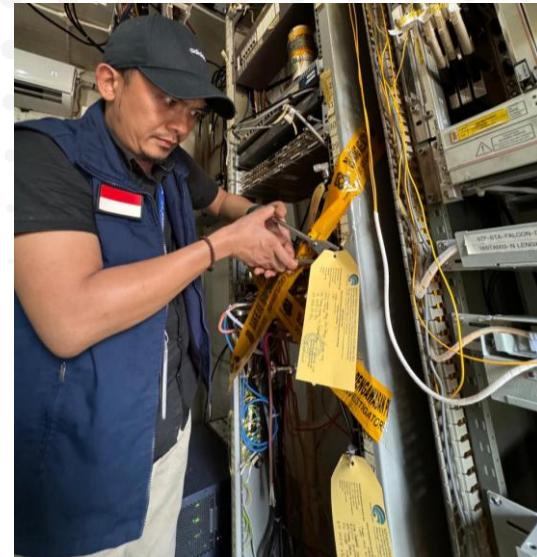


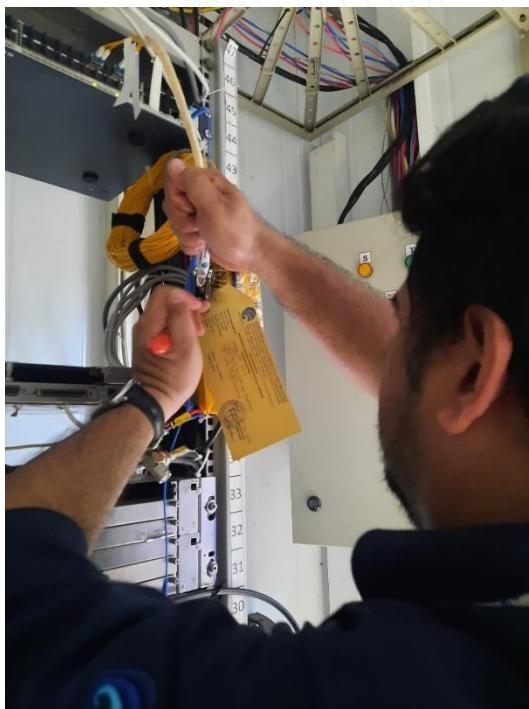


6. KEGIATAN PENERTIBAN, PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

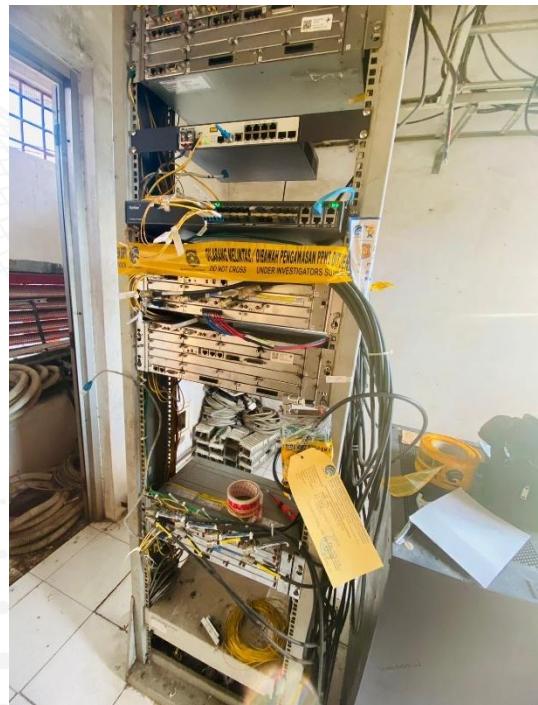














7. UJIAN NEGARA AMATIR RADIO NON REGULER





8. POSKO MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI EVENT PENTING DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI KALIMANTAN BARAT





9. POSKO MONITORING EVENT PENTING DALAM RANGKA HARI RAYA IDUL FITRI





10. POSKO MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI EVENT PENTING DALAM RANGKA PEMILU TAHUN 2024





11. POSKO MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI EVENT PENTING DALAM RANGKA NATAL 2024 DAN TAHUN BARU 2025









12. RANGKAIAN KEGIATAN MEMPERINGATI HARI BHAKTI POSTEL KE 79







13. UPACARA DAN PERLOMBAAN DALAM RANGKA MEMERIAHKAN HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 79







14. PEMBELAJARAN MATERI DAN TEORI PRAKTIK KEPADA MAHASISWA PKL DI KANTOR BALMON PONTIANAK





15. MEDICAL CHECK-UP PEGAWAI





16. KEGIATAN CAPACITY BUILDING PEGAWAI







17. PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS UNTUK MELAWAN JUDI ONLINE DI LINGKUNGAN KERJA BALMON PONTIANAK







LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI
RADIO KELAS II PONTIANAK**